



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR 02 TAHUN 2022

TENTANG

GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021-2028

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** : a. bahwa sub sektor peternakan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018-2023 berperan penting dalam mendukung misi mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil serta membangun Nusa Tenggara Timur sebagai salah satu gerbang dan pusat pengembangan pariwisata nasional (*Ring of Beauty*) melalui kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB, peningkatan nilai tambah petani peternak (NTP), peningkatan nilai tambah industri kecil dan rantai nilai pasok produk peternakan, mengembangkan dan mendukung sektor industri kecil rakyat/rumah tangga dalam pengolahan produk peternakan berbasis dan bernuansa kekuatan budaya lokal;
- b. bahwa untuk mencapai target RPJMD sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pedoman berupa Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2028;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2028;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021-2028.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Batasan, Pengertian dan Definisi

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Nusa Tenggara Timur.
4. Populasi ternak adalah jumlah ternak yang hidup di Provinsi Nusa Tenggara Timur sesuai jenis ternak pada periode satu tahun.
5. Prasarana ternak adalah segala sesuatu baik itu alat maupun penunjang utama untuk mendukung terselenggaranya kegiatan bidang peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari Pusat Kesehatan Hewan (Puskeswan), Rumah Potong Hewan (RPH), Tempat Pemotongan Hewan (TPH), Pasar Hewan, dan Pos Inseminasi Buatan.
6. Unit Usaha adalah unit usaha asal ternak di Provinsi Nusa Tenggara Timur yang memenuhi standar dan bersertifikat nomor kontrol hewan (NKV).
7. Sapi Bali adalah jenis ternak sapi yang di budidayakan dan dikembangkan di Nusa Tenggara Timur dengan ciri pantat dan kaki belakang berwarna putih, jantan dewasa berwarna coklat kehitaman, jantan muda dan betina berwarna merah, ujung hidung berwarna hitam dan punggung ujung ekor bergaris hitam.
8. Sapi Sumba Ongole adalah jenis ternak sapi yang di budidayakan dan dikembangkan di Nusa Tenggara Timur dengan ciri warna kulit putih, disekitar kepala sedikit lebih gelap dan cenderung abu-abu, postur tubuh agak panjang, leher sedikit pendek dan kaki terlihat panjang, memiliki punuk besar dan bergelambir (lipatan-lipatan kulit yang terdapat dibawah leher dan perut), Punuk tumbuh lurus dan berkembang baik pada ternak jantan, telinga panjang dan menggantung, kepala relatif pendek dengan profil melengkung, mata besar dan tenang, kulit disekitar kelopak mata berwarna hitam, tanduk sapi betina lebih panjang dibandingkan sapi jantan.
9. Sapi Persilangan Wagyu adalah jenis sapi persilangan bibit sapi wagyu dan sapi lokal yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur.

10. Babi adalah sejenis hewan ungulata yang bermoncong panjang dan berhidung lempur yang telah dibudidaya dan dikembangkan di Nusa Tenggara Timur.
11. Ayam Kampung Unggul Balitbangtan (KUB) adalah jenis ayam buras atau ayam kampung yang dikembangkan di Nusa Tenggara Timur sebagai penghasil daging dan telur.
12. Instalasi adalah pusat pembibitan ternak Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemebibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah sebagai pedoman merumuskan rencana komprehensif pembangunan peternakan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur dan sejalan perencanaan pembangunan peternakan Nasional Tahun 2021-2025.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah menyediakan dokumen rencana pengembangan peternakan Tahun 2021-2028 dengan pengembangan pada pembibitan ternak sapi, babi dan ayam KUB.

BAB II

GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PETERNAKAN PROVINSI NUSA TENGGERA TIMUR TAHUN 2021-2028

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini ditetapkan Grand Design Pengembangan Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021-2028.
- (2) Grand Design sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 4 (empat) BAB dengan rincian sebagai berikut:
 - a. BAB I Pendahuluan;
 - b. BAB II Kondisi Eksisting Peternakan;
 - c. BAB III Rencana Pengembangan Peternakan Provinsi NTT;
 - d. BAB IV Monitoring dan Evaluasi;
 - e. BAB V Penutup.
- (3) Rincian lebih lanjut dari Grand Design sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

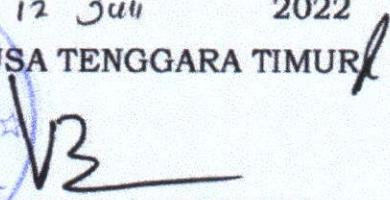
BAB III
PENUTUP
Pasal 4

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2022

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR


VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Diundangkan di Kupang
pada tanggal 12 Juli 2022

PIA SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR


JOHANNA E. LISAPALY

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022 NOMOR 082

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 82 TAHUN 2022

TANGGAL : 12 Juli 2022

**GRAND DESIGN PENGEMBANGAN PETERNAKAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021-2028**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional Tahun 2020-2024, diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Daging, susu dan telur merupakan bahan pangan yang dihasilkan oleh hewan ternak sebagai sumber energy dan protein dan sangat mempengaruhi kualitas kesehatan dan intelejensia masyarakat. Ketersediaan daging sebagai bahan pangan utama sumber protein hewani tidak dapat digantikan oleh bahan pangan lainnya. Daging sapi/kerbau sebagai komoditi pangan strategis asal ternak merupakan komponen penting dalam ketahanan pangan nasional, untuk itu menjadi tantangan bagi masyarakat peternakan untuk membuktikan kemampuannya menyediakan pangan asal ternak dalam jumlah yang cukup dan berkualitas yang baik serta berkesinambungan.

Produksi daging sapi nasional tahun 2020 adalah 515.627,74 ton dan produksi daging sapi Provinsi NTT 13.116, 45 ton (BPS Nasional, 2021). Data menunjukkan sumbangsi produksi daging Provinsi NTT terhadap Nasional adalah 2,54% dan dapat dikatakan masih sangat rendah sehingga sangat berpotensi untuk lebih ditingkatkan lagi. Kebutuhan daging sapi dan kerbau di tahun 2021 diperkirakan 696.956 ton, sementara produksi dalam negeri juga diperkirakan sebesar 473.814 ton (ditjennak.pertanian.go.id, 21 Januari 2021). Angka perkiraan kebutuhan daging tersebut mengindikasikan adanya defisit produksi daging sapi Nasional sehingga perlu dilakukan upaya peningkatan produksi selain impor daging.

Langkah operasional peningkatan produksi daging nasional yang diemban oleh Kementerian Pertanian saat ini adalah : 1) peningkatan produktivitas ternak sapi lokal; 2) pengembangan pakan ternak;

3) penyediaan bibit sapi/kerbau; 4) kesehatan hewan; 5) kesmavet, pasca panen dan pemasaran; dan (6) regulasi pemerintah.

Pembangunan ekonomi daerah NTT terus digalakkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan penduduknya, ditinjau dari aspek demografi pada tahun 2020 penduduk NTT berjumlah 5.325.566 jiwa (Hasil SP2020). Sektor pertanian, yang mencakup Subsektor peternakan merupakan penyerap tenaga kerja terbesar di NTT, yakni mencapai 51,43%, sebagian besar tenaga kerja tersebut bertempat tinggal di daerah pedesaan dengan menempatkan sub sektor peternakan sebagai *New Inisiatif* melalui *breeding farm* dan industri pakan ternak dalam mewujudkan NTT Bangkit 2019 – 2023. Sumbangan subsektor peternakan dan hasil-hasilnya terhadap PDRB NTT atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai 10.530.450.000.000,- atau 9,89% terhadap total PDRB NTT, dengan tingkat pertumbuhan sebesar 2,12% (BPS Prov.NTT, 2021). Pembangunan bidang ekonomi untuk sub sektor peternakan diarahkan pada upaya pemanfaatan potensi peternakan secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pendapatan peternak, pertumbuhan ekonomi dan percepatan perubahan struktur ekonomi serta menjaga kelestariannya untuk kepentingan jangka panjang. Capaian pelaksanaan pembangunan peternakan periode 2018 – 2023 secara akumulasi integratif, ditunjukkan dengan indikator-indikator makro antara lain dari (a) nilai tukar petani (peternak); (b) produksi dan produktivitas; (c) pendapatan per kapita; (d) konsumsi / pengeluaran rumah tangga untuk pangan dan non pangan; (e) manfaat nilai pendapatan regional jumlah pengeluaran / antar pulau dan (f) Pendapatan Asli Daerah.

Pengembangan sistem agribisnis merupakan salah satu strategi pembangunan wilayah yang potensial mengintegrasikan antar sektor dan antar wilayah, namun keberhasilan agribisnis usaha ternak yang dilaksanakan tidak akan terlepas dari peran kelembagaan kelompok peternak itu sendiri. Apabila peran tersebut belum optimal maka pengembangan agribisnis komoditas akan terhambat. Peran kelembagaan kelompok peternak sangat menentukan terhadap keberhasilan

pembangunan peternakan, karena diharapkan akan mampu berkontribusi terhadap aksesibilitas peternak terhadap pengembangan sosial ekonomi peternak, serta pasar. Dalam sistem ekonomi pasar, salah satu aspek penting untuk meningkatkan *output* adalah efisiensi yaitu dengan cara optimalisasi pemanfaatan sumberdaya yang tersedia baik dalam jumlah maupun kombinasi antara berbagai *input* yang digunakan (Kameo, 2013)

Ekspor antar daerah Provinsi NTT terutama adalah ternak (sapi, kerbau, dan kuda). Pada tahun 2020, kinerja ekspor ternak Provinsi NTT berkontraksi -11,56% (yoy), melambat dibandingkan tahun 2019 yang tumbuh 4,83%. Menurunnya ekspor ternak pada tahun 2020 dipengaruhi oleh berkurangnya permintaan sapi terutama di hari raya Idul Adha yang selalu tinggi, seiring himbuan Pemerintah untuk melaksanakan penyembelihan kurban di Rumah Potong Hewan dalam rangka mengurangi risiko penyebaran pandemi COVID-19. Realisasi ekspor ternak Provinsi NTT pada tahun 2020 mencapai 95,1% dari total kuota ekspor ternak tahun 2020. Provinsi Kalimantan Timur dan Jawa Barat menjadi tujuan utama ekspor ternak Provinsi NTT dengan pangsa masing-masing 33,09% dan 27,02%

Peternakan berperan sangat penting dalam perekonomian wilayah NTT maupun perekonomian keluarga tani, khususnya petani miskin di pedesaan. Dari sekitar 80% rumah tangga petani yang dominan tinggal di pedesaan hampir seluruhnya memelihara ternak dan secara langsung ataupun tidak langsung bergantung pada usaha peternakan sebagai sumber uang tunai dan sumber protein hewani keluarga maupun untuk urusan sosial. Pengelolaan ternak yang ramah lingkungan seperti pola penggemukan ternak sapi di Amarasi Kabupaten Kupang telah turut membantu menghentikan sistem perladangan berpindah, meningkatkan kesuburan dan produktivitas lahan kering. Disamping masih merupakan bagian *prestige* bagi masyarakat tradisional, ternak yang dimiliki petani adalah juga bentuk tabungan yang sangat berarti ketika petani membutuhkan uang tunai atau ketika musim paceklik.

Gambaran diatas menunjukkan bahwa usaha peternakan, di NTT adalah usaha yang multi-fungsi: ekonomi, lingkungan dan sosial. Karena

itu pembangunan sub-sektor peternakan mempunyai arti penting bagi pembangunan pedesaan dan sebagai elemen penting dalam upaya penanggulangan kesmiskinan karena sebagian besar penduduk miskin tinggal di pedesaan dan bernetapencarian dari berusaha tani/beternak.

Pembangunan sub sektor peternakan di NTT sampai saat ini mencakup dua peran utama, yakni: 1) turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT melalui peningkatan pendapatan dari ternak dan hasil ternak serta perbaikan gizi masyarakat, dan 2) turut memenuhi kebutuhan akan daging nasional dengan pengeluaran ternak dan hasil ternak bagi masyarakat konsumen di provinsi lain serta dalam rangka memperkecil penggunaan devisa negara bagi import ternak dan hasil ternak. Produksi ternak di NTT, baik produksi per satuan ternak maupun produksi per satuan usaha, per satuan luas serta per satuan waktu, belum mencapai tingkat yang optimal. Selain itu peranan dari produksi yang telah dihasilkan itu secara keseluruhan belum berfungsi optimal sebagai pembentuk kesejahteraan keluarga peternak secara stabil dan nyata baik dalam aspek ekonomi maupun dalam aspek gizi makanan.

Pembangunan bidang peternakan Provinsi NTT sebagaimana dalam RPJMD Perubahan 2018-2023 adalah mendukung misi 1 mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil. Peningkatkan kesejahteraan masyarakat NTT dengan prinsip keterbukaan dan melibatkan semua pihak (*inclusive*) dan dengan pendekatan berkelanjutan merujuk pada empat aspek pembangunan yaitu aspek ekonomi, aspek sosial, aspek lingkungan, dan aspek kelembagaan. Merujuk kepada prioritas pembangunan daerah untuk peningkatan pendapatan masyarakat petani peternak, dapat dilakukan melalui peningkatan produksi bibit benih pertanian, peternakan dan perikanan yang mampu memenuhi kebutuhan daerah, nasional dan ekspor melalui peningkatan nilai tambah dengan indikator kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB.

Pengembangan sektor peternakan melalui peningkatan produksi ternak tahun 2021 – 2028 di Provinsi NTT lebih difokuskan pada komoditas ternak sapi, babi dan ayam KUB. Kajian dalam upaya menggali potensi peternakan daerah ini terutama pada ketiga komoditas tersebut



diperlukan untuk menyusun suatu perencanaan atau *Grand Design* pengembangan peternakan kedepannya.

1.2. Tujuan

Maksud dari kajian *Grand Design* pengembangan peternakan Provinsi NTT Tahun 2021 – 2028 adalah :

1. Merumuskan rencana komprehensif pembangunan peternakan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT dan sejalan perencanaan pembangunan peternakan nasional Tahun 2021 - 2025.
2. Menyusun dokumen rencana pengembangan peternakan Tahun 2021 – 2028 dengan pengembangan pada pembibitan ternak sapi, babi dan ayam KUB.

1.3. Manfaat

Manfaat penyusunan *Grand Design* pengembangan peternakan Provinsi NTT Tahun 2021 – 2028 adalah:

1. Tersedianya dokumen perencanaan jangka menengah terkait pembangunan peternakan yang terintegrasi dengan skenario RPJMD Provinsi dan Nasional.
2. Tersedianya dokumen *Grand Design* pengembangan peternakan yang dapat dijadikan pedoman bagi pemerintah, swasta, stakeholder, masyarakat dan pemangku kepentingan sebagai arah kebijakan dan rencana implementasi bidang peternakan Perovinsi NTT berdasarkan strategi dan rekomendasi yang diperoleh dari hasil analisis berupa sektor – sektor unggulan untuk peningkatan pertumbuhan ekonomi Provinsi NTT dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan.

1.4. Landasan Hukum

Landasan hukum serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan *Grand Design* pengembangan peternakan Provinsi NTT Tahun 2021-2028 adalah sebagai berikut:



1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
4. Undang-undang Nomor Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Perubahannya;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 – 2025;



14. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT dan Perubahannya;
15. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT;
16. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Peternakan dan Kesehatan Hewan;
17. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTT Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi NTT Tahun 2021 Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi NTT Nomor 0116);
18. Peraturan Gubernur NTT No. 13 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Peternakan Provinsi NTT;
19. Peraturan Gubernur NTT Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Lampiran XI dan Lampiran XXX Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2019 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Perangkat Daerah Provinsi NTT.

1.5. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari kajian *Grand Design* Pengembangan Peternakan Provinsi NTT tahun 2021 – 2028 adalah:

1. Kondisi eksisting peternakan
2. Pengembangan Pembibitan ternak sapi bali.
3. Pengembangan pembibitan ternak sapi sumba ongole.
4. Pengembangan pembibitan ternak sapi persilangan wagyu.
5. Pengembangan pembibitan ternak babi
6. Pengembangan pembibitan ternak ayam KUB
7. Penumbuhan kelembagaan dan agribisnis peternakan.
8. Pengembangan industri pakan
9. Pengendalian kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.



BAB II KONDISI EKSISTING PETERNAKAN

2.1. Populasi Ternak

Populasi ternak merupakan gambaran potensi ternak yang berpeluang untuk dikembangkan serta sebagai aset dan modal bagi peningkatan taraf perekonomian masyarakat setempat. Populasi ternak selama ini menunjukkan perkembangan yang positif walaupun belum optimal untuk semua jenis ternak. Populasi ternak Provinsi NTT Tahun 2016-2020 tertera pada tabel 1.

Tabel 1. Populasi Ternak di Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Jenis Ternak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi (ekor)	984.508	1.007.608	1.027.256	1.087.761	1.188.982
Kerbau (ekor)	134.457	141.075	156.957	175.007	189.972
Kuda (ekor)	112.946	114.879	112.557	109.549	115.129
Kambing (ekor)	609.367	626.431	637.969	835.614	999.730
Domba (ekor)	64.685	65,422	66.884	64.507	76.532
Babi (ekor)	1.845.408	2.073.446	2.141.243	2.266.222	2.694.222
Unggas (ekor)	15.702.304	16.997.993	17.687.278	18.251.171	23.491.887

Sumber : Data sektoral Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Populasi tertinggi sesuai tabel 1 adalah ternak unggas. Populasi untuk Ternak kecil didominasi oleh ternak babi, sedangkan untuk ternak besar terbanyak adalah ternak sapi. Kondisi ini menunjukkan bahwa ketiga jenis ternak ini merupakan komoditas unggulan bagi masyarakat NTT. Populasi ketiga jenis ternak ini juga selalu meningkat setiap tahun dengan persentase pertumbuhan yang bervariasi. Pertumbuhan populasi ternak unggas, babi dan sapi tahun 2017 – 2020 terlihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Grafik persentase pertumbuhan populasi ternak Unggas, Babi dan Sapi

Pertumbuhan populasi ternak unggas, babi dan sapi sesuai grafik sangat bervariasi dan cenderung tidak stabil setiap tahunnya. Persentase pertumbuhan populasi ternak tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain :

1. **Angka Kelahiran**

Upaya peningkatan angka kelahiran (kesuburan) ternak sapi dapat menjadi alat yang ampuh dalam meningkatkan populasi ternak sapi di daerah ini. Kajian terhadap beberapa faktor penyebab penurunan angka kelahiran akan sangat membantu dalam menyusun strategi peningkatan angka kelahiran tersebut. Beberapa penyebab yang mungkin menyebabkan penurunan kesuburan termasuk pemotongan betina produktif, kekurangan pejantan, penyebaran penyakit brucellosis, dan stress nutrisi yang makin meningkat.

Hingga saat ini telah banyak program yang telah dijalankan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan populasi dan pemerataan pemilikan ternak. Program-program tersebut telah dilakukan bahkan jauh sebelum adanya indikasi penurunan populasi. Berbagai program seperti sapi Kopel, telah menjadi program yang sangat populer dan telah dijalankan selama bertahun-tahun. Walaupun belum terdapat cukup publikasi tentang seberapa besar dampaknya pada peningkatan populasi, namun sedikit tidaknya telah berdampak positif terhadap peningkatan populasi pada beberapa dekade belakangan ini. Namun demikian dampak tersebut mungkin agak kecil mengingat sumber bakalan tersebut berasal

dari populasi yang ada. Dampak yang lebih besar mungkin pada pemerataan jumlah kepemilikan ternak sapi.

Penerapan larangan Pematangan Betina Produktif juga telah dilakukan dengan berbagai permasalahan yang ditemui. Pembelian betina bunting yang dijual peternak merupakan alternatif yang baik. Beberapa pengusaha juga telah membeli betina bunting yang dijual dipasaran, namun demikian hingga saat ini belum menjadi trend secara meluas.

2. **Angka Kematian**

Tingginya tingkat mortalitas merupakan faktor utama yang menyebabkan rendahnya produktivitas ternak di NTT. Sebagai contoh tingkat mortalitas pedet mencapai 35,1% jumlah kematian pedet per tahunnya mencapai 66.464 ekor pedet dengan asumsi 192.024 ekor yang dilahirkan oleh sekitar 302.400 ekor betina pada tahun 1998 pada saat populasi sapi di Nusa Tenggara Timur mencapai 720 ribu ekor (Jelantik, 2001a).

Berbagai pengkajian dan penelitian yang telah dilakukan mendapatkan beberapa faktor yang menyebabkan tingginya angka kematian ternak sapi terutama pedet di NTT. Faktor-faktor seperti lemahnya hubungan induk-anak (Kirby, 1979), kekurangan susu (Wirdahayati dan Bamualim, 1990; Jelantik, 2001a; Jelantik, 2001b), predasi (Jelantik, dkk, 2002) dan peningkatan kebutuhan nutrisi selama ikut menggembala dan kekurangan pakan hijauan selama akhir musim kemarau (Jelantik dkk, 2003, 2004) merupakan faktor yang telah diidentifikasi sebagai penyebab kematian pedet.

Berbagai pendekatan yang mungkin dapat diterapkan untuk menekan angka kematian pedet antara lain modifikasi musim kelahiran yang kini jatuh pada periode kekurangan pakan selama musim kemarau ke periode kelimpahan hijauan pakan berkualitas (pertengahan sampai akhir musim hujan) (Toelihere dkk., 1990). Di samping itu, pendekatan lainnya yang telah banyak diteliti adalah memberikan pakan suplemen baik kepada induk (Jelantik dkk., 1998; Belli, 2002) maupun langsung kepada pedet (Jelantik, 2001c; Jelantik dkk. 2002, Jelantik dkk., 2003, 2004). Paket

strategi suplementasi dan beberapa produk pakan suplemen seperti Pakan Cair Penambah Susu (PCPS) dan Pakan Padat Pemula (P3) (Jelantik, dkk., 2004) telah dihasilkan yang dapat digunakan untuk menekan angka kematian pedet dan meningkatkan laju pertumbuhan pedet.

Peningkatan produktivitas sapi Timor nampaknya dapat dilakukan dengan penyapihan dini. Upaya ini akan meningkatkan pengelolaan pada pedet yang akan berdampak pada menurunnya angka kematian, meningkatkan pertumbuhan dan berdampak positif terhadap peningkatan kesuburan. Di samping strategi tersebut di atas, angka kematian pedet sebenarnya secara sederhana dapat ditekan dengan manajemen pemeliharaan anak (Jelantik, 2001d) dengan cara menghindarkan pedet untuk ikut menggembala bersama induknya.

3. Pemotongan Ternak Betina Produktif

Penjualan ternak secara berlebihan dapat secara langsung akan menguras ternak yang ada. Ini terjadi jika laju pengeluaran melebihi laju produksi. Laju produksi hasil penelitian dan simulasi saat ini mencapai 12% dari populasi (Jelantik, 2001a) berupa jantan siap ekspor sebanyak 6,9% dan 5,1% betina afkir untuk dipotong. Dari data yang dipublikasikan oleh Littik (2001) nampak bahwa telah sejak tahun 1990'an sebenarnya telah terjadi kelebihan laju penjualan dibandingkan dengan laju produksi ternak jantan. Pengurasan terbesar terjadi pada tahun 1998 dimana jumlah jantan yang dijual hampir 2 kali lipat dari yang mampu diproduksi. Sementara itu seperti sebelumnya disampaikan bahwa pemotongan betina secara berlebihan hanya terjadi selama tahun 2000 saja. Dengan demikian total off-take nampaknya baru melebihi total produksi sejak tahun 1998.

Rincian pemotongan ternak tahun 2016 – 2020 (Tabel 2) menunjukkan peningkatan yang cukup berarti terkait dengan meningkatnya jumlah penduduk dan kesadaran masyarakat akan konsumsi protein hewani. Data pemotongan ternak tersebut telah diperhitungkan juga dengan perkiraan pemotongan ternak yang tidak tercatat baik di dalam rumah potong hewan (RPH), maupun di luar rumah potong hewan.

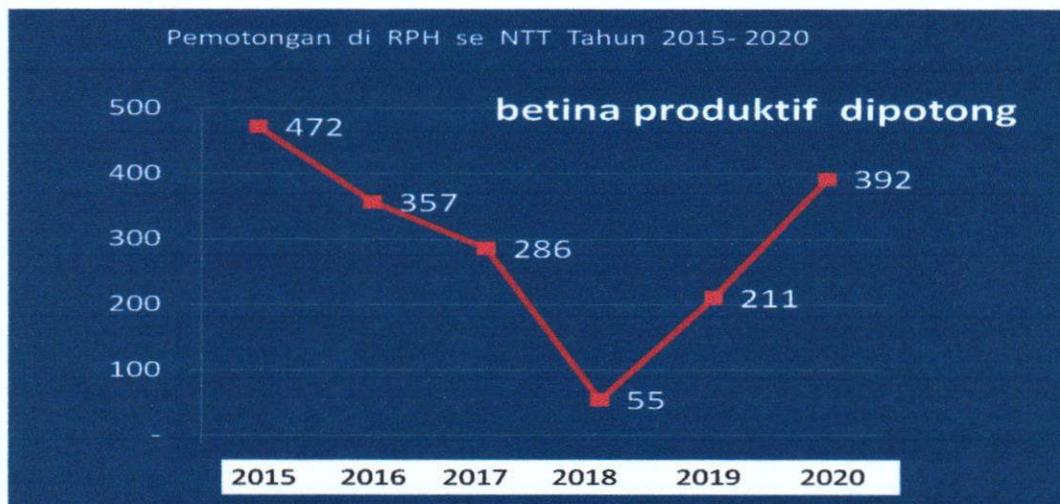


Tabel 2. Pemotongan ternak di RPH Tahun 2016-2020

Jenis Ternak	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi (ekor)	82.944	84.793	83.112	72.340	87.443
Kerbau (ekor)	8.020	8.053	8.170	8.688	9.373
Kuda (ekor)	4.465	4.573	4.582	3.173	3.487
Kambing (ekor)	139.388	144.840	166.584	192.353	230.939
Domba (ekor)	24.416	24.684	25.560	4.270	5.122
Babi (ekor)	792.295	820.762	834.280	927.879	1.139.254

Sumber : Data sektoral Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Pemotongan betina produktif terutama pada ternak sapi baik yang tercatat di RPH dan yang tidak tercatat (di luar RPH) sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan populasi. Data pemotongan sapi betina produktif di RPH tahun 2015 – 2020 tertera pada gambar 2.



Gambar 2. Grafik pemotongan ternak sapi betina produktif

Grafik pemotongan sapi betina produktif di RPH menunjukkan terjadi penurunan pemotongan dari 472 ekor di tahun 2015 menjadi 55 ekor di tahun 2018. Pada tahun 2019 kembali terjadi peningkatan menjadi 211 ekor dan terus naik menjadi 392 ekor di tahun 2020. Kondisi ini diakibatkan oleh berbagai faktor antara lain lemahnya pengawasan terhadap penerapan larangan pemotongan ternak betina produktif yang diamanatkan oleh undang-undang. Upaya yang pernah dilakukan oleh pemerintah yaitu membentuk tim terpadu dalam pengawasan pemotongan ternak betina produktif dan pemberian insentif kepada peternak pemilik sapi betina bunting.

4. Pengeluaran Ternak

Usaha agribisnis di bidang peternakan di Nusa Tenggara Timur menunjukkan adanya perkembangan dari tahun ke tahun, baik ditinjau dari segi kuantitas jenis komoditinya maupun kualitasnya. Kondisi ini dapat dilihat dari tataniaga ternak yang diantarpulaukan dari NTT ke luar daerah yang terpantau dan terawasi. Salah satu tugas Dinas Peternakan adalah pengawasan pemasukan dan pengeluaran ternak dan hasil ternak, pasar ternak dan monitoring harga ternak. Dengan adanya pengawasan dimaksud dapat dilakukan pembinaan terhadap pelaku usaha mitra, kelompok tani ternak dan peternak individu. Pengeluaran ternak besar potong sejak tahun 2016 s/d 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Realisasi pengeluaran ternak besar potong di NTT Tahun 2016 – 2020

No	Jenis Ternak	T A H U N									
		2016		2017		2018		2019		2020	
		Kuota	Realisasi	Kuota	Realisasi	Kuota	Realisasi	Kuota	Realisasi	Kuota	Realisasi
1.	Sapi (ekor)	65.600	65.235	70.800	66.574	69.950	67.454	69.650	66.222	64.620	62.997
2.	Kerbau (ekor)	5.940	4.699	5.410	3.750	4.720	3.857	4.970	3.517	3.470	2.604
3.	Kuda (ekor)	5.990	5.695	6.338	5.628	6.075	5.388	5.830	5.519	4.900	3.857
	Jumlah	77.530	75.629	82.548	75.952	80.745	76.699	80.450	75.258	72.990	69.458

Sumber : Data sektoral Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Secara deskriptif sesuai data pada tabel 3 dapat dikatakan bahwa kuota dan realisasi pengeluaran ternak bervariasi setiap tahun. Kuota pengeluaran ternak sapi, kerbau dan kuda pada tahun 2017 meningkat dibanding tahun sebelumnya namun mulai tahun 2018 sampai tahun 2020 cenderung menurun. Demikian pula halnya dengan realisasi pengeluaran sampai dengan tahun 2018 cenderung meningkat namun mulai tahun 2019 terjadi penurunan realisasi. Hal menarik yang perlu mendapat perhatian yakni realisasi pengeluaran ternak baik itu sapi, kerbau maupun kuda yang selalu tidak mencapai kuota setiap tahunnya. Regulasi penetapan kuota pengeluaran ternak yang telah dilakukan berdasarkan *supply and demand* perlu dianalisa kembali.

2.2. Produksi daging

Hasil produksi usaha peternakan rakyat setiap tahun digunakan untuk konsumsi lokal, konsumsi Provinsi lain dan untuk penambahan populasi. Produksi daging di Provinsi Nusa Tenggara Timur selama periode lima tahun terakhir terlihat pada tabel 4.

Tabel 4. Produksi daging di NTT tahun 2016 - 2020

Jenis	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Sapi (Kg)	12.441.780	12.285.360	12.466.800	10.851.000	7.350.555
Kerbau (Kg)	1.503.675	1.474.875	1.531.800	1.629.036	1.069.030
Kuda (Kg)	544.026	549.552	558.370	386.709	80.090
Kambing (Kg)	1.763.257	2.018.130	2.107.288	2.433.268	741.260
Domba (Kg)	311.609	321.666	326.210	54.497	136.390
Babi (Kg)	32.682.169	33.464.681	34.414.050	38.275.012	12.912.220
Ayam Buras (Kg)	11.515.000	11.098.150	11.306.390	10.835.070	10.489.150
Jumlah	60.761.516	61.212.414	62.710.908	64.464.592	32.778.695

Sumber : Data sektoral Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Produksi daging sesuai data pada tabel 4 menunjukkan trend peningkatan setiap tahun dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 6%. Peningkatan produksi daging dipengaruhi oleh tingkat pemotongan. Produksi daging cenderung berkorelasi positif dengan pemotongan ternak dimana semakin tinggi pemotongan maka produksi daging juga semakin tinggi demikian pula sebaliknya. Produksi daging masih dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan pertumbuhan populasi terutama pada komoditas unggulan sapi, babi dan ayam KUB.

2.3. Kesehatan Hewan

Pengendalian dan pemberantasan penyakit hewan menular merupakan salah satu perhatian utama pembangunan peternakan dalam kerangka peningkatan populasi dan produktivitas ternak, sekaligus menjamin keamanan pangan hewani dan ketentraman konsumen. Penyakit menular utama di NTT antara lain SE, Antrax, Brucellosis, Rabies dan Hog Cholera.



Upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan menular terus dilakukan baik melalui pengobatan ternak sakit maupun pencegahan tertularnya penyakit pada ternak sehat melalui vaksinasi secara periodik. Tindakan pencegahan terhadap berbagai penyakit tersebut berupa pengalokasian dan distribusi untuk vaksinasi yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2016 hingga 2020 (Tabel 5).

Tabel 5. Alokasi Vaksin dan Realisasi Vaksinasi Penyakit Hewan Tahun 2016 – 2020

No.	Jenis Vaksinasi	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Anthrax (dosis) : - Alokasi	246.600	50.000	50.000	50.000	50.000
	- Realisasi	192.619	50.000	73.000	50.000	50.000
2	Brucellosis (dosis) : - Alokasi	1.650	15.000	8.000	7.500	8.360
	- Realisasi	1.650	15.000	15.849	7.500	8.360
3	Hog Cholera : - Alokasi	228.740	15.860	70.000	50.000	44.750
	- Realisasi	198.541	15.860	29.003	44.750	44.750
4	Rabies (dosis) : - Alokasi	292.180	262.026	255.000	95.000	90.000
	- Realisasi	273.983	251.435	226.970	95.000	90.000
5	SE (dosis) : - Alokasi	477.800	7.992	71.500	46.000	24.000
	- Realisasi	427.940	7.992	23.450	46.000	24.000

Sumber : Data sektoral Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2016-2020

Sesuai data pada tabel 5, alokasi vaksin bervariasi. Pengalokasian vaksin dapat dikatakan sangat rendah jika dibandingkan dengan populasi ternak yang ada. Pengalokasian vaksin terutama untuk pembebasan pulau Timor dari penyakit brucellosis masih sangat kurang. Demikian juga juga pengalokasian vaksin untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit hog cholera pada ternak babi.

2.4. Pasar dan Harga

Pemasaran sapi potong oleh peternak biasanya setelah ternak dipelihara/digemukan dalam kurun waktu 6 bulan – 12 bulan, pasar untuk ternak potong sangat berpotensi baik untuk kebutuhan dalam daerah (rumah potong hewan) maupun kebutuhan pasar luar daerah ke beberapa provinsi di Indonesia: Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan,

Kalimantan Timur, NTB, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Riau dan DKI Jakarta.

Kebutuhan Sapi potong dalam daerah sebagaimana terlihat pada data pemotongan sapi potong di RPH selama 5 tahun terakhir (Tabel 2). Informasi daftar harga ternak sapi potong diambil berdasarkan harga ditingkat produsen (peternak) sedangkan informasi daftar harga daging yang diambil ditingkat konsumen (pembeli) pada beberapa wilayah kabupaten dengan rincian sebagai berikut:

1. Kabupaten di Pulau Sumba (Kab SBD.Sumba Barat. Sumba Tengah. Sumba Timur), daftar harga diambil di kabupaten Sumba Timur
2. Kabupaten di Pulau Flores (Kabupaten: Lembata, Flotim. Sika, Ende, Nagakeo, Bajawa, Manggarai, Manggarai Timur dan Manggarai Barat), daftar harga diambil di kabupaten Ende
3. Kabupaten di Pulau Timor (Kabupaten: Alor, Malaka, Belu, TTU, TTS, Kupang, Kota Kupang,) daftar harga diambil di Kabupaten Kupang dan TTS
4. Untuk kabupaten di Pulau Rote dan Sabu Raijua, daftar harga diambil di kabupaten Rote Ndao.

Tabel 6. Harga Daging dan ternak sapi potong di NTT Tahun 2018-2020

No	Lokasi	Tahun					
		2018		2019		2020	
		HD (Rp)	HT(Rp)	HD (Rp)	HT(Rp)	HD (Rp)	HT (Rp)
1.	Pulau Timor			89 981	31 699	93 342	32 098
2.	Pulau Sumba	85 000	34 000	89 963	34 014	93 044	35 000
3.	Pulau Flores	100 000	35 000	100 000	35 000	100 524	35 215
4.	Pulau Rote	78 540	32 915	77 738	33 555	82 615	30 398

Keterangan: HD = Harga Daging HT = Harga Ternak

2.5. Kelembagaan Usaha Peternak

Usaha Pembibitan ternak di Nusa Tenggara Timur masih dilakukan secara perorangan dengan memanfaatkan tenaga kerja yang berasal dari dalam rumah tangga peternak. Keberadaan kelompok tani ternak yang semestinya menjadi tempat berkumpul/ wadah bagi para peternak untuk belajar, bekerja sama maupun berusaha bersama jumlahnya



terbatas. Saat ini di masyarakat sudah ada kelompok tani ternak, namun kelompok-kelompok tersebut penumbuhannya atas dasar bukan karena persamaan usaha maupun tujuan tetapi kelompok yang terbentuk karena salah satu persyaratan untuk menjadi calon penerima bantuan pemerintah. Keberadaan kelompok yang terbentuk karena persyaratan calon penerima bantuan tersebut lama kelamaan akan hilang (tinggal papan nama kelompok) dan bantuan yang diberikan tidak berkembang bahkan akan hilang.

Di lain pihak Penumbuhan / pembentukan kelompok tani ternak diharapkan menjadi wadah sekaligus solusi bagi masyarakat peternak untuk meningkatkan Pendidikan non formalnya, mengingat Pendidikan formal peternak rendah. Adapun fungsi kelompok bagi peternak adalah: 1) sebagai kelas belajar untuk meningkatkan pengetahuan, sikap dan ketrampilan. Para anggota kelompok agar tumbuh dan berkembang menjadi usaha peternakan yang maju dan mandiri, 2) sebagai wahana kerjasama dalam menanggulangi masalah masalah peternakan yang dialami seperti pakan, Kesehatan hewan dan 3) sebagai Unit Produksi kelompok peternak harus bisa meningkatkan jumlah populasi ternak dan meningkatkan kualitas ternak menjadi ternak unggul. Data kelembagaan peternak tertera pada tabel 7.

Table 7. Data kelembagaan peternak di NTT

No	Kab./Kota	Kelembagaan Ternak		
		Kelompok Peternak	Gabungan Kelompok	Koperasi Ternak
1	Kota Kupang	18	-	3
2	Kupang	98	-	68
3	TTS	73	-	22
4	TTU	55	-	4
5	Belu	26	-	7
6	Malaka	3	-	-
7	Alor	16	-	1
8	Lembata	17	-	-
9	Flotim	3	-	1
10	Sikka	6	-	-



No	Kab./Kota	Kelembagaan Ternak		
		Kelompok Peternak	Gabungan Kelompok	Koperasi Ternak
11	Ende	14	-	-
12	Ngada	29	-	-
13	Nagakeo	12	-	-
14	Manggarai	9	-	-
15	Manggarai Timur	26	-	-
16	Manggarai- Barat	-	-	1
17	Sumba Timur	-	-	-
18	Sumba Barat	-	-	1
19	Sumba Tengah	-	-	-
20	SBD	-	-	-
21	Rote Ndao	11	-	1
22	Sabu Raijua	20		
Jumlah		436		109

Data pada tabel 7 menunjukkan bahwa di beberapa kabupaten belum terdata kelompok peternak dan belum terbentuk koperasi ternak. Jika 1 kelompok peternak beranggotakan 20 rumah tangga maka jumlah rumah tangga yang tergabung dalam kelompok peternak sebanyak 8.720. Kondisi ini sangat terbuka peluang untuk melibatkan rumah-tangga dalam kelompok-kelompok peternak sehingga dapat tersedia wadah untuk pembentukan kelembagaan peternak guna memajukan usaha.

2.6. Sumber daya lahan

Keberadaan sumber daya alam yang sangat besar di Nusa Tenggara Timur berpotensi dalam mendukung pengembangan ternak besar potong khususnya sapi potong. Ketersediaan lahan berupa padang rumput/savana yang sangat luas menjadi sebuah sumber pakan yang melimpah bagi pengembangan ternak ruminansia besar seperti sapi, kerbau dan kuda. Sumber pakan untuk ternak ruminansia selain berasal dari savana, juga dihasilkan dari lahan kebun, pekarangan, hutan maupun Kawasan pertanian. Data Sumber Daya Alam (Luas lahan sawah, Kebun, Pekarangan, Hutan dan Kawasan Pertanian) di NTT.



Tabel 8. Luas Penggunaan Lahan di NTT Tahun 2019

No	Kabupaten/Kota	Lahan Sawah (Ha)			Jumlah	Lahan Pertanian Bukan Sawah (Ha)	Bukan Lahan Pertanian (Ha)	Total Lahan (Ha)
		Ditanami Padi Setahun						
		1 x	2-3 x	Tidak ditanami				
1	Sumba Barat	7 872	1 718	0	9 590	54 224	9 928	73 742
2	Sumba Timur	18 824	3 985	2 340	25 149	546 405	128 496	700 050
3	Kupang	17 285	1 031	2 917	21 233	589 207	271 465	881 905
4	TTS	5 224	3 300	2 287	10 811	324 071	59 818	394 700
5	TTU	6 962	2 529	4 778	14 269	180 427	72 270	266 966
6	Belu	6 082	1 060	408	7 550	87 485	33 459	128 494
7	Alor	709	187	2 555	3 451	265 141	24 296	292 888
8	Lembata	20	36	13	69	117 532	9 037	126 638
9	Flores Timur	531	288	280	1 099	162 869	17 317	181 285
10	Sikka	1 076	1 595	25	2 696	149 357	21 138	173 191
11	Ende	3 603	2 428	2 311	8 342	181 683	14 635	204 660
12	Ngada	3 372	4 564	0	7 936	80 133	74 023	162 092
13	Manggarai	3 301	10 500	65	13 866	116 330	31 301	161 497
14	Rote Ndao	15 578	4 152	50	19 780	73 346	34 884	128 010
15	Manggarai Barat	5 196	11 679	0	16 875	209 750	68 125	294 750
16	Sumba Tengah	6 353	1 248	0	7 601	160 611	18 706	186 918
17	SBD	5 308	2 027	1 139	8 474	118 277	17 781	144 532
18	Nagekeo	3 640	2 517	1 092	7 249	97 069	37 378	141 696
19	Manggarai Timur	6 576	8 382	259	15 217	215 528	33 548	264 293
20	Sabu Raijua	991	1 048	190	2 229	38 278	7 095	47 601
21	Malaka	5 373	3 171	1 594	10 138	77 719	28 207	116 063
22	Kota Kupang	363	34	13	410	7 284	10 333	18 027
Nusa Tenggara Timur		124 239	67 479	22 316	214 034	3 852 726	1 023 240	5 090 000

Sumber: BPS Prov. NTT 2020

Potensi pertanian lahan sawah 214.034 Ha, dengan tingkat pemanfaatan atau yang ditanami 89.57% atau 191.718 Ha. Potensi limbah yang bisa dihasilkan dari lahan sawah yakni jerami segar 766.872 ton dan gabah kering (bekatul, dedak halus, dedak kasar, sekam) 766.872 ton dengan asumsi perhektar menghasilkan 4 ton limbah jerami segar dan 4 ton limbah gabah kering. Pemanfaatan limbah jerami segar lahan sawah untuk dapat di konsumsi oleh ternak ruminansia 60.029 ekor satuan ternak (1 satuan ternak = 1 ekor sapi dewasa) dengan konsumsi 12,78.

Lahan pertanian bukan sawah juga mempunyai potensi sangat tinggi sebagai sumber limbah bahan pakan. Luas lahan pertanian bukan sawah yakni 3.852.726 Ha yang apabila ditanamai jagung mempunyai potensi limbah jerami jagung 49.700.165 ton dan limbah tongkol jagung 46.232.712 ton. Limbah jagung tersebut apabila digunakan sebagai sumber pakan ruminansia dapat memenuhi kebutuhan untuk 7.506.485 satuan ternak.

2.7. Padang Penggembalan dan Rumah Tangga Pemelihara Ternak

Pemeliharaan ternak di NTT masih dominan menggunakan sistim pasture dimana ternak diikat atau digembalakan dipadang penggembalaan. Kondisi ini membuat padang penggembalaan menjadi sangat penting keberadaannya untuk pengembangan peternakan terutama ternak Ruminasia dan tingkat kepemilikan ternak dominan berada dirumah tangga. Luasan padang penggembalaan dan jumlah rumah tangga pemelihara ternak se-NTT tertera pada tabel 9.

Tabel 9. Rumah tangga pemelihara ternak dan luas padang penggembalaan kabupaten/kota se-NTT

No	Kabupaten/Kota	Padang Penggembalaan (Ha)*	Jumlah Rumah Tangga Peternak RTP) **	
			RTP Babi	RTP Sapi
1	Sumba Barat	3 635	10 350	463
2	Sumba Timur	215 799	18 309	9 248
3	Kupang	159.526	7 727	29 116
4	TTS	114 396	30 457	50 363
5	TTU	86 339	9 701	(25 422
6	Belu	19 698	10 159	12 549
7	Alor	16 166	11 929	1 093
8	Lembata	23 255	3 533	1 260
9	Flores Timur	33 291	22 971	745
10	Sikka	19 389	20 174	5 143
11	Ende	910	8 555	11 640
12	Ngada	7 635	10 698	9 514
13	Manggarai	4 467	14 684	10 964
14	Rote Ndao	8 955	4 598	5 199
15	Manggarai Barat	169	12 556	3 540
16	Sumba Tengah	352	4 096	1 230
17	SBD	741	21 057	800
18	Nagekeo	16 033	9 056	8 187
19	Manggarai Timur	8 828	22 190	4 743
20	Sabu Raijua	910	6 498	884
21	Malaka	4 300	^c	15 074
22	Kota Kupang	150	3 751	1 111
Jumlah		587.245	262 049	208 294

Sumber : * Dinas Peternakan Prov. NTT Tahun 2020, ** Sensus Pertanian Tahun 2013

Padang penggembalaan untuk peternakan sapi, kuda, kerbau dan kambing dan domba 587.245 Ha dapat menampung 587.245 ekor sampai 1.174.490 ekor satuan ternak (1 Ha menampung 1-2 ekor satuan ternak). Kondisi ini menggambarkan bahwa luasan padang penggembalaan saja sebagai sumber pakan ternak ruminansia masih sangat kurang dibanding populasi yang ada (Populasi tabel 1).

Sesuai data pada tabel 9, jumlah rumah tangga pemelihara ternak sapi sebesar 21,83% dan pemelihara ternak babi 17,36 dari total 1.200.140 rumah tangga di NTT. Kondisi ini dapat diartikan bahwa memelihara ternak sangat berpotensi menyerap tenaga kerja terutama skala RT.

2.8. Kebijakan pembangunan peternakan Nasional

Sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 Sesuai arahan RPJPN 2005-2025 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong". Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

Selanjutnya untuk menyelaraskan dan mendukung visi pemerintah tersebut maka visi Kementerian Pertanian mendukungnya dengan: "Pertanian yang maju, mandiri dan modern untuk terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong". Selaras dengan kedua visi di atas, visi pembangunan peternakan dan kesehatan hewan 2020-2024 yakni "Terwujudnya peternakan Indonesia yang berdaya saing berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern". Dengan misi :

1. Meningkatkan ketersediaan bibit/benih ternak yang berkualitas dan berkelanjutan.
2. Meningkatkan ketersediaan pakan yang berkualitas secara berkelanjutan.



3. Mewujudkan kesehatan hewan dalam rangka meningkatkan produktivitas ternak dan mendukung kesehatan masyarakat.
4. Meningkatkan keamanan dan mutu produk hewan serta kesehatan masyarakat.
5. Meningkatkan usaha peternakan, pengolahan dan pemasaran produk peternakan berdaya saing .

Penjabaran visi dan misi tersebut dipetakan pada tujuan dan Indikator tujuan sesuai Renstra Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan sebagai berikut:

1. Tersedianya bibit/ benih ternak berkualitas dan berkesinambungan dengan indikator jumlah bibit/benih ternak tersertifikasi yang tersedia (sertifikat).
2. Tersedianya pakan berkualitas dan berkelanjutan dengan indikator indeks ketersediaan pakan berkualitas (indeks).
3. Meningkatnya kesehatan hewan dengan indikator Status Kesehatan Hewan (%).
4. Terwujudnya kesehatan masyarakat veteriner nasional dengan indikator jaminan kesehatan masyarakat veteriner (%).
5. Tersedianya produk peternakan yang bernilai tambah dan berdaya saing dengan indikator Jumlah produk peternakan yang berhasil dihilirisasi (ton) dan Ekspor produk peternakan (US\$) Kuantitatif.

Program Nasional pembangunan peternakan dan kesehatan hewan tahun 2020-2024 hasil penjabaran tujuan yang telah ditetapkan adalah Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat dengan sasaran program tersebut adalah:

1. Meningkatnya ketersediaan pangan asal ternak.
2. Meningkatnya daya saing komoditas peternakan dan kesehatan hewan.
3. Terjaminnya keamanan mutu pangan asal ternak.
4. Tersedianya sarana peternakan yang sesuai kebutuhan.
5. Meningkatnya luas wilayah yang terbebas dari penyakit hewan menular strategis.
6. Terkendalinya kasus zoonosis pada manusia.



Sebagai penjabaran arah kebijakan nasional dalam RPJMN 2020-2024, dan Renstra Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024, kebijakan peternakan dan keswan diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan peternak dan keberlanjutan sumber daya peternakan dan kesehatan hewan. Dalam rangka mewujudkan: visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan, maka arah kebijakan dan strategi pembangunan peternakan nasional yang ditetapkan oleh Ditjen PKH adalah sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan peternakan yang sesuai dengan Good Breeding dan Good Farming Practises.

Good Breeding Practises dan Good Farming Practises adalah pelaksanaan usaha peternakan dibidang pembibitan dan budidaya yang dilakukan secara baik mengikuti standar yang berlaku. Good Breeding Practises dan Good Farming Practises meliputi 4 (empat) aspek yaitu: sarana dan prasarana; proses produksi bibit; pelestarian lingkungan; serta monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Penyelenggaraan bibit/benih berkualitas dan berkelanjutan.
- b. Penyediaan pakan yang cukup dan berkualitas berbasis bahan pakan lokal.
- c. Pengelolaan usaha peternakan yang terintegrasi dari hulu sampai hilir.

2. Meningkatnya nilai tambah dan daya saing produk peternakan dan kesehatan hewan. Peningkatan nilai tambah merupakan penambahan nilai produk dari proses pengolahan hingga pemasaran peternakan. Daya saing merupakan keunggulan kompetitif (competitive advantage) yang dimiliki produk hewan nasional terhadap produk hewan negara lain. Peningkatan pada dua aspek nilai tambah dan daya saing akan memberikan manfaat terhadap ekonomi nasional dari sektor pertanian.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.



- b. Peningkatan kelembagaan, usaha dan investasi bidang peternakan dan kesehatan hewan
3. Pengelolaan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner.

Pengelolaan kesehatan hewan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan kesehatan hewan agar terbebas dari penyakit hewan. Pengelolaan kesehatan hewan meliputi pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan; pengelolaan obat hewan serta alat dan mesin kesehatan hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner berkontribusi dalam menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit asal hewan. Pengelolaan kesehatan masyarakat veteriner meliputi: pengendalian dan penanggulangan zoonosis; penjaminan keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk hewan; penjaminan higiene dan sanitasi; pengembangan kedokteran dan perbandingan; serta penanganan bencana.

Strategi pelaksanaan dilakukan melalui:

- a. Meningkatkan kesehatan hewan untuk kesehatan manusia.
- b. Meningkatkan kesehatan masyarakat veteriner.

Potensi yang dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan peternakan dan kesehatan hewan nasional antara lain: jumlah penduduk yang besar, keanekaragaman hayati, teknologi dan pasar luar negeri.

1. Jumlah Rumah Tangga Peternakan 13,56 juta orang (Sutas, 2018).

Peternakan merupakan salah satu aktivitas ekonomi yang sudah dilakukan masyarakat Indonesia secara turun menurun. Usaha peternakan dilakukan oleh masyarakat secara polivalen (terpadu) dengan kegiatan ekonomi lainnya di bidang pertanian. Dengan banyaknya masyarakat melakukan usaha peternakan walaupun dengan skala yang kecil dan dikelola secara sambilan, usaha peternakan ini memiliki peran dalam menopang ekonomi masyarakat. Pada tahun 2019 jumlah rumah tangga peternakan sebanyak 13,56 juta rumah tangga atau sebesar 21,43% dari rumah tangga pertanian.



2. Sumber daya peternakan yang cukup tersedia (keragaman genetik ternak, dan ragam pangan olahan).

Indonesia sebagai suatu negara agraris mempunyai sumber daya alam dan ternak yang sangat besar dan beragam. Keberagaman sumber daya ternak yang tersebar diwilayah-wilayah belum mampu dimanfaatkan secara ekonomis dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Dukungan sumber daya alam lainnya, utamanya dalam penyediaan pakan untuk pertumbuhan ternak sangat besar dengan keragaman yang cukup tinggi. Disamping itu, keragaman budaya dari masyarakat yang sangat heterogen menghasilkan berbagai ragam produk pangan hasil ternak yang merupakan kekuatan penyediaan terhadap produk peternakan. Potensi ragamnya genetik ternak dan produk olahan asal ternak dapat mengantisipasi kebutuhan pangan yang semakin meningkat seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan penduduk Indonesia.

3. Sinergi dan dukungan peternak, akademisi dan pemerintah yang tersedia.

Keberhasilan pembangunan peternakan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, antara lain pemerintah, swasta dan akademisi. Peran pemerintah sebagai fasilitator, motivator dan stabilisator merupakan modal penting dalam menumbuhkan usaha peternakan yang kondusif dan berkeadilan utamanya bagi peternak rakyat untuk berkontribusi dalam pembangunan peternakan Indonesia. Untuk itu peternak rakyat, sebagai subjek pembangunan yang kreatif dan dinamik harus terus didorong untuk terlibat dalam proses pembangunan peternakan. Pemberdayaan peternak berarti meningkatkan kemampuan dan kemandirian peternak. Pemberdayaan peternak dapat dilakukan dengan cara: menciptakan iklim usaha yang memungkinkan peternak berkembang; meningkatkan kemampuan peternak melalui berbagai pemberian bantuan dana, pelatihan, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial serta pengembangan kelembagaan di daerah; dan menciptakan kemitraan peternakan yang saling menguntungkan.



4. Pangsa Pasar ekspor produk peternakan meningkat Pada periode 2015-2019.

Beberapa produk ternak mengalami peningkatan produksi antara lain daging ayam ras pedaging (23,39%), telur ayam ras petelur, ayam buras, daging kambing meningkat sebesar 55,66%; 3,82% dan 20,78. Kelebihan produksi ini dapat dijadikan peluang ekspor keluar negeri. Peluang ekspor semakin terbuka dengan status kesehatan hewan yang dimiliki Indonesia yaitu bebas penyakit list A (PMK). Peluang ekspor kambing dan domba sangat potensial mengisi segmen pasar di Asia dan Timur Tengah ditopang dengan keunggulan komparatif yang ada.

5. Kesadaran global tentang keamanan pangan (food safety), bio security dan kesejahteraan hewan.

Beragamnya produk pangan hasil ternak diharapkan dapat meningkatkan pola konsumsi pangan untuk pemenuhan protein hewani asal ternak. Seiring meningkatnya tingkat pendidikan masyarakat akan mendorong kesadaran masyarakat untuk menuntut ketersediaan pangan yang aman dan berkualitas. Pemerintah dan pelaku usaha berkewajiban untuk menyediakan pangan sesuai kebutuhan masyarakat. Dalam penyediaan pangan yang aman dan berkualitas, penerapan cara yang baik di rantai produksi pangan termasuk penerapan kesejahteraan hewan menjadi faktor penting yang harus dilaksanakan

Pembangunan peternakan nasional juga tidak terlepas dari permasalahan disamping potensi yang dimiliki. Beberapa permasalahan pembangunan peternakan nasional antara lain:

1. Usaha peternakan yang bersifat Subsistem dan rendahnya partisipasi kelembagaan Peternak.

Pola pengelolaan usaha peternakan oleh rumah tangga masih sederhana dengan skala kepemilikan yang kecil dan bersifat sambilan, khususnya untuk usaha ternak besar dan kecil. Hampir 95% juta rumah tangga peternak tinggal di pedesaan dan tersebar diberbagai

wilayah dengan orientasinya masih peningkatan produksi. Oleh karena itu, diperlukan penguatan dengan manajemen atau sistem pengelolaan korporasi peternak yang memiliki dimensi strategis dalam pengembangan kawasan peternakan karena dibentuk dari, oleh, dan untuk peternak.

Hasil SOUT 2017 menyebutkan bahwa partisipasi peternak yang mengikuti bimbingan penyuluhan usaha peternakan hanya sebesar 5,65 %, dan dari jumlah tersebut 7,86% adalah peternak sapi potong. Informasi terkait pengolahan hasil produksi, pengobatan ternak dan penyusunan ransum merupakan informasi yang paling dibutuhkan oleh peternak. Sebanyak 82.13% peternak tidak mengikuti penyuluhan dan bimbingan teknis usaha peternakan dimana 79,73 % adalah peternak sapi potong. Alasan dominan peternak tidak mengikuti bimbingan dan penyuluhan usaha peternakan adalah peternak merasa tidak perlu dengan materi penyuluhan yang diberikan. Kondisi ini menjadi salah satu tantangan karena tanpa adanya peningkatan pengetahuan dan ketrampilan pengelolaan ternak dan pengelolaan usaha peternakan melalui kegiatan penyuluhan dan/atau bimbingan teknis dan manajemen usaha maka risiko ketidakberhasilan kegiatan harus dapat segera dimitigasi.

2. Rendahnya pemanfaatan plasma nutfah sebagai keunggulan komparatif untuk dikembangkan secara ekonomis.

Indonesia yang memiliki keanekaragaman plasma nutfah ternak yang tersebar di wilayah Indonesia, namun keunggulan komparatif ini belum dapat dimanfaatkan secara ekonomis untuk didorong sebagai keunggulan kompetitif dalam menghasilkan produk-produk peternakan. Untuk meningkatkan pengembangan dan kontribusi plasma nutfah ternak Indonesia, dapat dilakukan pengembangan dan perbaikan mutu genetik secara terus menerus, sekaligus dikembangkan secara ekonomis melalui kawasan sumber bibit ternak

3. Keterbatasan lahan untuk subsektor peternakan.

Permasalahan yang dihadapi subsektor peternakan adalah kepastian lahan dan semakin berkurangnya lahan peternakan karena



kebutuhan lahan sektor pertanian lainnya lebih diutamakan. Tidak semua daerah dalam Rencana Tata Ruang Daerah menetapkan adanya lahan untuk pengembangan usaha peternakan termasuk penyediaan padang gembala untuk penyediaan pakan dan pelayanan teknis. Selain itu, sebagian besar usaha peternakan merupakan skala rumah tangga dan lokasinya disekitar rumah, sehingga diperlukan pengembangan kawasan peternakan berbasis korporasi.

4. Ketidaksiapan dalam menghadapi persaingan dan liberalisasi pasar.

Persaingan dan globalisasi ekonomi yang melanda dunia, termasuk dalam investasi asing. Liberalisasi pasar dengan semakin terbukanya informasi pasar mendorong negara mencari pasar yang paling menguntungkan. Persaingan dan liberalisasi berdampak pada pesatnya perkembangan teknologi sehingga arus informasi dan transportasi ke negara lain semakin dekat, terutama masuknya barang-barang luar negeri. Selain itu, Indonesia saat ini merupakan negara pengimpor hasil ternak terutama daging sapi, ternak hidup, dan bibit ayam ras. Dari sisi industri, Indonesia mengimpor kulit ternak, bahan baku pakan asal ternak seperti meat meal dan bone meal, tepung ikan, jagung dan berbagai feed suplement pakan ternak. Ketergantungan bahan utama industri dari impor ini sangat mempengaruhi perkembangan peternakan dalam negeri. Untuk mengantisipasi ketergantungan impor produk peternakan, yang dapat dilakukan dengan melakukan pengolahan, distribusi dan pemasaran produk peternakan dan kesehatan hewan yang berkualitas dan berdaya saing.

5. Lemahnya Posisi dalam Perjanjian Internasional

Terbukanya pasar global harus disertai persiapan yang matang terutama perjanjian internasional utamanya dalam hal perdagangan atau arus barang. Perjanjian yang tidak disikapi dengan matang dan lemahnya posisi tawar akan mengancam industri peternakan dalam negeri dan kedaulatan negara Indonesia. Indonesia sebagai negara anggota World Trade Organization (WTO) harus mengantisipasi fenomena dan dinamika perkembangan internasional maupun regional terutama dalam bidang perdagangan hewan dan produknya melalui



reorientasi terhadap kebijakan perdagangan dengan memfokuskan perhatian terhadap salah satu aspek yang sangat penting dari perjanjian GATT yaitu “Perjanjian tentang Kesehatan Manusia, Hewan dan Tumbuhan” (Sanitary and Phytosanitary/ SPS).

Dari aspek kesehatan hewan, meningkatnya lalu lintas hewan dan produknya akan membawa risiko masuknya penyakit hewan ke wilayah Indonesia. Indonesia yang telah dinyatakan bebas terhadap 13 dari 15 penyakit hewan menular menurut daftar A dan beberapa penyakit menurut daftar B dari OIE (Office Internationale des Epizooties) perlu mengantisipasi melalui reorientasi kebijakan dengan menepati kesepakatan perjanjian Sanitary and Phytosanitary untuk keamanan pangan dan perlindungan kesehatan hewan dan tumbuhan



BAB III
RENCANA PENGEMBANGAN PETERNAKAN PROVINSI NTT
(SAPI, BABI DAN AYAM KUB)

3.1. Tujuan

Tujuan pengembangan sapi, babi dan ayam KUB tahun 2021 – 2028 di Provinsi NTT mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) perubahan Dinas Peternakan Tahun 2018 – 2023 sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) perubahan Provinsi NTT Tahun 2018 – 2023 yakni:

1. Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB dengan indikator
 - 1.1. Meningkatnya populasi ternak sapi, babi dan unggas
 - 1.2. Meningkatkan prasarana ternak yang memenuhi standar
 - 1.3. Meningkatkan ternak sehat dari populasi
2. Meningkatkan jumlah unit usaha pangan asal ternak dengan indikator jumlah unit usaha produk asal ternak yang memenuhi standar aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) dan bersertifikat NKV.

3.2. Target

Populasi ternak sapi pada tahun 2020 sebanyak 1.176.317 ekor dan target akhir periode RPJMD di tahun 2023 sebanyak 1.398.972 ekor. Populasi ternak sapi sampai dengan tahun 2021 adalah 1.223.483 ekor (angka sementara) sehingga agar dapat mencapai target di tahun 2023 perlu peningkatan jumlah ternak sapi sebanyak 175.489 ekor. Peningkatan jumlah populasi dapat di support dari : 1) usaha pembibitan ternak di Instalasi milik pemerintah sebanyak 4.000 Ekor dengan rincian tahun 2022 sebanyak 2.000 ekor dan tahun 2023 sebanyak 2.000 Ekor. 2) Usaha pembibitan ternak sapi dimasyarakat sebanyak 171.489 yakni tahun 2022 sebanyak 79.654 ekor dan tahun 2023 sebanyak 91.835 ekor.

Jumlah Rumah Tangga (RT) pemelihara ternak sapi 208.298 (ST 2013). Rata-rata pertumbuhan jumlah RT di NTT tahun 2010 – 2020



adalah 4.2% atau dapat diasumsikan 0,42% per tahun. Jika pertumbuhan RT sapi seiring dengan pertumbuhan rumah tangga maka pada tahun 2023 jumlah RT peternak sapi adalah 217.042. Ini berarti rata-rata kepemilikan ternak per RT peternak pada tahun 2023 adalah 7 ekor dengan kalkulasi penghasilan Rp. 25.200.000/tahun atau Rp. 2.100.000/bulan. Untuk meningkatkan penghasilan menjadi Rp. 3.000.000/bulan maka setiap RT peternak perlu memelihara 10 ekor ternak. Untuk penambahan jumlah ternak ternak tersebut apabila di tahun 2024 sebanyak 1 ekor per RT maka terdapat tambahan jumlah ternak sapi sebanyak 217.042 ekor atau terjadi peningkatan populasi menjadi 1.616.014. Pada tahun 2025 diperlukan tambahan 2 ekor ternak per RT maka terdapat tambahan jumlah sapi sebanyak 434.084 ekor atau terjadi peningkatan populasi menjadi 2.050.098 ekor. Di tahun 2028 jumlah rumah tangga pemelihara ternak sapi dapat diperkirakan sebanyak 221.643 RT maka jumlah ternak sapi dapat mencapai 2.216.430 ekor.

Populasi ternak babi awal pada tahun 2020 sebanyak 2.352.441 ekor dan target akhir periode RPJMD di tahun 2023 sebanyak 3.550.524 ekor. Populasi ternak babi sampai dengan tahun 2021 adalah 2.899.766 ekor (angka sementara) sehingga agar dapat mencapai target di tahun 2023 perlu peningkatan jumlah ternak babi sebanyak 650.758 ekor. Peningkatan jumlah populasi dapat disupport dari : 1) usaha pembibitan ternak di Instalasi milik pemerintah sebanyak 11.600 ekor dengan rincian tahun 2022 sebanyak 5.800 ekor dan tahun 2023 sebanyak 5.800 ekor. 2) Usaha pembibitan ternak babi di masyarakat sebanyak 639.158 ekor yakni tahun 2022 sebanyak 241.141 ekor dan tahun 2023 sebanyak 398.017 ekor

Jumlah Rumah Tangga (RT) pemelihara ternak babi 262.049 (ST 2013). Jika rata-rata pertumbuhan RT peternak babi seiring dengan pertumbuhan rumah tangga maka pada tahun 2023 jumlah RT peternak babi adalah 273.055. Ini berarti rata-rata kepemilikan ternak babi per RT peternak pada tahun 2023 sebanyak 13 ekor dengan kalkulasi penghasilan yang diperoleh Rp. 17.550.000/ 6 bulan atau Rp.



2.925.000/bulan. Untuk meningkatkan penghasilan menjadi lebih dari Rp. 3.000.000/bulan maka setiap RT peternak perlu memelihara 14-15 ekor ternak babi. Untuk penambahan jumlah ternak babi tersebut apabila di tahun 2024 sebanyak 1 ekor per RT maka terdapat tambahan jumlah ternak babi sebanyak 273.055 ekor atau terjadi peningkatan populasi menjadi 3.823.579. Pada tahun 2025 diperlukan tambahan 1 ekor ternak babi per RT maka terdapat tambahan jumlah babi sebanyak 273.055 ekor atau terjadi peningkatan populasi menjadi 4.096.634 ekor. Di tahun 2028 jumlah rumah tangga pemelihara ternak babi dapat diperkirakan sebanyak 278.838 RT maka jumlah ternak babi dapat mencapai 4.182.570 ekor.

Populasi ternak ayam buras awal pada tahun 2020 sebanyak 9.730.191 ekor dan target akhir periode RPJMD di tahun 2023 sebanyak 11.588.772 ekor. Populasi ternak ayam buras sampai dengan tahun 2021 adalah 10.294.542 ekor (angka sementara) sehingga agar dapat mencapai target di tahun 2023 perlu peningkatan jumlah ternak ayam buras sebanyak 1.294.230 ekor. Peningkatan jumlah populasi dapat di suport dari: 1) usaha pembibitan ternak di Instalasi milik pemerintah sebanyak 20.000 ekor dengan rincian tahun 2022 sebanyak 10.000 ekor dan tahun 2023 sebanyak 10.000 ekor. 2) Usaha pembibitan ayam buras di masyarakat sebanyak 1.274.230 ekor yakni tahun 2022 sebanyak 607.673 ekor dan tahun 2023 sebanyak 666.557 (Tabel 2).

Jumlah Rumah Tangga (RT) pemelihara ternak ayam buras diasumsikan 80% dari jumlah RT di NTT Tahun 2020 yakni sebanyak 960.112. Kondisi Ini berarti rata-rata kepemilikan ternak ayam buras per RT peternak pada tahun 2023 adalah 12 ekor dengan kalkulasi penghasilan Rp. 960.000/4 bulan atau Rp. 240.000/bulan. Untuk meningkatkan penghasilan menjadi Rp. 3.000.000/bulan maka setiap RT peternak ayam buras perlu memelihara 150 ekor ternak. Untuk penambahan jumlah ternak tersebut apabila di tahun 2024 menjadi 100 ekor per RT maka terdapat tambahan jumlah ternak ayam buras sebanyak 84.422.428 ekor atau terjadi peningkatan populasi menjadi 96.011.200.



Pada tahun 2025 menjadi 150 ekor ternak per RT maka terdapat tambahan jumlah ayam buras sebanyak 38.405.392 ekor atau terjadi peningkatan populasi menjadi 144.016.800 ekor. Tahun 2028 jumlah rumah tangga pemelihara ternak ayam diperkirakan sebanyak 984.562 RT maka jumlah ternak ayam buras dapat mencapai 147.684.344 ekor.

Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar di tahun 2021 yakni 80% dan target akhir periode RPJMD di tahun 2023 menjadi 100%. Untuk mencapai target 100% di tahun 2023 yakni dengan merevitalisasi sarana prasarana yang sudah ada dan penyediaan baru masing-masing 10% di tahun 2022 dan 10% ditahun 2023. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar pada rencana lanjutan pembangunan sampai dengan tahun 2028 tetap berada pada angka 100%.

Persentase ternak sehat dari populasi pada tahun 2021 sebesar 80% dan target di tahun 2023 tetap konsisten dan tidak terjadi penurunan sehingga jumlah ternak sehat bertambah sesuai peningkatan populasi dengan persentase tetap 80%. Persentase ternak sehat dari populasi pada rencana lanjutan pembangunan sampai dengan tahun 2028 tetap stabil dan berada pada angka 80%.

Jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar kondisi awal RPJMD tahun 2018 adalah belum ber-NKV, capaian sampai dengan tahun 2020 sebanyak 25 unit sudah terstandar dan ber-NKV dengan target pertumbuhan tahun 2021 meningkat 20% dari tahun 2020 menjadi sebanyak 30 unit, tahun 2022 meningkat 40% dari tahun 2020 menjadi 35 unit dan tahun 2023 meningkat 60% dari tahun 2020 atau menjadi 40 unit. Jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar pada rencana lanjutan pembangunan sampai dengan tahun 2028 yakni sebanyak 187 unit.

3.3. Arah kebijakan

Arah kebijakan difokuskan pada pengembangan ternak sapi, babi dan ayam buras tahun 2021 - 2028 merupakan pengejawantahan dari strategi pengembangan peternakan yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan yakni:



- 3.1. Pembibitan ternak sapi bali, sumba ongole dan wagyu, babi dan ayam KUB di instalasi milik pemerintah dan kelompok masyarakat berbasis desa.
- 3.2. Modernisasi Peternakan
- 3.3. Korporasi peternakan
- 3.4. Pengendalian penyakit hewan
- 3.5. Peningkatan unit-unit usaha produk asal ternak yang memenuhi standar

3.4. Strategi

Strategi pengembangan ternak sapi, babi dan ayam KUB tahun 2021 - 2028 dilaksanakan melalui analisis lingkungan strategis internal dan analisis lingkungan strategis eksternal dengan mengidentifikasi kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), kesempatan (*opportunity*) dan ancaman (*threat*). Strategi akan memaksimalkan kekuatan dan peluang dan sekaligus dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman yang ada.

3.4.1. Analisis lingkungan strategis

Skenario rencana pengembangan peternakan Provinsi NTT menggunakan model analisis SWOT sebagai acuan untuk merumuskan strategi pengembangan peternakan Provinsi NTT tahun 2021 - 2028. Pendekatan SWOT tersebut dikembangkan secara kuantitatif yang berawal dari identifikasi unsur-unsur kekuatan (*strength*) dan kelemahan (*weakness*) sebagai unsur lingkungan internal (IFAS/Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan unsur-unsur peluang (*opportunity*) dan ancaman (*threat*) sebagai unsur lingkungan eksternal (EFAS/External Strategic Factors Analysis Summary). Pendekatan kuantitatif dimaksud dilakukan melalui pemberian persepsi oleh sejumlah narasumber yang dianggap ahli/expert dan atau pejabat di lingkup OPD provinsi NTT yang selama ini merupakan pengambil keputusan dan atau berkedudukan penting dalam pengelolaan pembangunan peternakan. Pemberian persepsi oleh narasumber dilakukan melalui suatu forum Focus Group



Discussion/FGD dengan memberikan penilaian atas sejumlah unsur SWOT.

1. Pengembangan Ternak Besar (Sapi) (Gambar 3)

P1	Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strength</i> ; S)	Kelemahan (<i>Weakneses</i> ; W)
Faktor Eksternal	<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi Ternak 2. Angka kelahiran 3. Persentase ternak betina produktif 4. Luas Lahan HMT dan padang Penggembalaan 5. Budaya masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi 2. Sarana Prasarana 3. Ketersediaan pakan 4. Manajemen pemeliharaan 5. Sumber Daya manusia
Peluang (<i>Opportunity</i> ; O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan peternakan Nasional dan Daerah 2. Meningkatnya kebutuhan daging Nasional 3. Pengeluaran ternak keluar daerah NTT 4. Pengembangan kawasan peternakan 5. Pariwisata Estate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi ternak sapi bali 2. Peningkatan produksi ternak sapi sumba ongole 3. Peningkatan produksi ternak sapi premium (Wagyu) 4. Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak 5. Pengawasan lalulintas ternak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penerapan teknologi reproduksi ternak (IB, PKB dan ATR) 2. Pengembangan industry pakan 3. Peningkatan SDM aparatur dan petani ternak kolaborasi dengan Perguruan Tinggi
Ancaman (<i>Threat</i> ; T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian Ternak 2. Penyakit hewan menular strategis (PHMS) 3. Betina Culling 4. Betina majir 5. Perubahan iklim 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan dan pemberantasan PHMS 2. Peningkatan produksi (penggemukan) ternak betina 3. Pengembangan tanaman Hijauan Makanan Ternak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi fasilitas prasarana kesehatan hewan (RSH, Puskesmas, Pos IB, Laboratorium) 2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan hewan 3. Perluasan lahan hijauan makanan ternak.

2. Pengembangan Ternak Kecil (Babi) (Gambar 4)

P2	Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strength</i> ; S)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i> ; W)
Faktor Eksternal	<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi Ternak 2. Litter size (jumlah anak lahir) 3. Budaya masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan teknologi 2. Sarana Prasarana 3. Ketersediaan pakan 4. Manajemen pemeliharaan 5. Sumber Daya manusia
Peluang (<i>Opportunity</i> ; O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan peternakan Nasional dan Daerah 2. Meningkatnya kebutuhan daging Nasional 3. Pengeluaran ternak keluar daerah NTT 4. Pariwisata Estate 	<ol style="list-style-type: none"> A. Peningkatan produksi ternak babi B. Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak babi C. Pengawasan lalulintas ternak D. Pengembangan industry pakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyediaan sarana dan prasarana pendukung peternakan 2. Peningkatan SDM aparatur dan petani ternak kolaborasi dengan Perguruan Tinggi
Ancaman (<i>Threat</i> ; T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian Ternak 2. Penyakit hewan menular strategis Hog Colera dan Asian Swine Fefer (ASF) 3. Peningkatan harga pakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan dan pemberantasan Hog Colera dan Asian Swine Fefer (ASF) 2. Pengaturan siklus reproduksi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi fasilitas prasarana kesehatan hewan (RSH, Puskesmas, Laboratorium) 2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan hewan 3. Biosecurity 4. Penggunaan Teknologi (penyuntikan serum konvalesen)

3. Pengembangan Ternak Unggas (Gambar 5)

P2	Faktor Internal	Kekuatan (<i>Strength</i> ; S)	Kelemahan (<i>Weaknesses</i> ; W)
Faktor	<p style="text-align: center;">IFAS</p> <p style="text-align: center;">EFAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Populasi Ternak 2. Produksi telur 3. Produksi daging 4. Budaya masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan pakan 2. Sarana Prasarana 3. Manajemen pemeliharaan 4. Sumber Daya manusia
Peluang (<i>Opportunity</i> ; O)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pembangunan peternakan Nasional dan Daerah 2. Meningkatnya kebutuhan daging Nasional 3. Pengeluaran ternak keluar daerah NTT 4. Ekspor ternak ayam 5. Kebutuhan daging ayam di NTT 6. Kebutuhan Telur 7. Pariwisata Estate 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi ternak ayam buras 2. Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak unggas 3. Pengembangan industry pakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan industry pakan 2. Peningkatan SDM aparatur dan petani ternak kolaborasi dengan Perguruan Tinggi
Ancaman (<i>Threat</i> ; T)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kematian Ternak 2. Penyakit hewan menular strategis Afian Influence (AI) 3. Peningkatan harga pakan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penanggulangan dan pemberantasan PHMS 2. Pembebasan AI 3. Pengawasan lalulintas ternak 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Revitalisasi fasilitas prasarana kesehatan hewan (RSH, Puskesmas, Laboratorium) 2. Peningkatan kapasitas tenaga kesehatan hewan 3. Biosecurity.

3.4.2. Strategi Pengembangan peternakan Provinsi NTT

Strategi sangat diperlukan untuk efisiensi dan efektivitas dalam penerapan kebijakan dan program/kegiatan pengembangan peternakan di Provinsi NTT sesuai yang ditargetkan dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2018 -2023. Sejumlah strategi sebagai hasil analisis SWOT dipetakan menurut siklus pengembangan peternakan dengan mempertimbangkan masing-masing pada aspek perbibitan dan produksi, Kesehatan hewan, sarana dan prasarana, agribisnis dan kelembagaan, tersaji pada tabel 11.

Tabel 10. Strategi, Aspek perbibitan dan produksi, Aspek Kesehatan hewan, Aspek sarana dan prasarana dan Aspek agribisnis dan kelembagaan pengembangan ternak sapi, babi dan ayam buras

No	Strategi	Aspek perbibitan dan produksi	Aspek Kesehatan hewan	Aspek sarana dan prasarana	Aspek agribisnis dan kelembagaan
P1 - Pengembangan Ternak Sapi					
1	Peningkatan produksi ternak sapi bali, sapi sumba ongole (SO) dan penembangan ternak sapi premium (Wagyu)	√			
2	Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak		√		
3	Pengawasan lalulintas ternak				√
4	Pembentukan ekosistem peternakan sapi	√	√	√	√
5	Pemanfaatan teknologi peternakan dan peningkatan kompetensi SDM	√		√	√
6	Pengembangan pakan terintegrasi integrasi pertanian/TJPS	√	√	√	√
7	Membentuk kelembagaan peternak				√
8	Penguatan Puskesmas dan biosecurity		√	√	
9	Penguatan RPH sapi		√	√	√
10	Pengembangan <i>mini ranch</i>	√		√	
P2 - Pengembangan Ternak Kecil Babi					
1	Peningkatan produksi	√			



	ternak babi				
2	Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak babi		√		
3	Pengembangan industry pakan babi			√	
4	Pembentukan ekosistem peternakan babi	√	√	√	√
5	Pemanfaatan teknologi peternakan dan peningkatan kompetensi SDM	√	√	√	√
6	Membentuk kelembagaan peternak				√
7	Penguatan Puskesmas dan biosecurity		√	√	
8	Penguatan RPH babi		√	√	√
P3- Pengembangan Ternak Ayam Buras					
1	Peningkatan produksi ayam buras	√			
2	Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak unggas		√		
3	Pengembangan industry pakan Unggas			√	
4	Pembentukan ekosistem peternakan unggas	√	√	√	√
5	Pemanfaatan teknologi peternakan dan peningkatan kompetensi SDM				
6	Membentuk kelembagaan peternak				√
7	Penguatan Puskesmas dan biosecurity		√	√	
8	Pembangunan RPU		√	√	√

Terdapat sebanyak 10 (sepuluh) strategi pengembangan ternak sapi, 8 (delapan) strategi pengembangan ternak babi dan 8 (delapan) strategi pengembangan ternak ayam buras yang diharapkan dapat diimplementasikan untuk menjawab kebutuhan empat aspek pengembangan peternakan Provinsi NTT. Keempat aspek dimaksud pada hakekatnya untuk menjawab dan mengantisipasi harapan pengembangan peternakan yang sesuai dengan kebutuhan masa kini dan masa mendatang sebagai bagian dari penumbuhan ekonomi demi terwujudnya masyarakat sejahtera, mandiri dan adil.

3.5. Grand Design Pengembangan Peternakan

Grand Design pengembangan peternakan Provinsi NTT menggambarkan kebijakan makro pengembangan Peternakan di NTT Tahun 2021 - 2028 sebagai suatu arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) sektor peternakan dan penumbuhan unit – unit usaha produk asal ternak yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis (ASUH) di NTT. Grnad design ini juga untuk menjawab visi pembangunan peternakan nasional yaitu terwujudnya peternakan indonesia yang berdaya saing, berkelanjutan dalam mewujudkan pertanian Indonesia maju, mandiri dan modern.

Grand design ini juga diharapkan dapat menjawab tujuan umum pembangunan peternakan daerah NTT dalam pelaksanaan misi mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil sesuai RPJMD Perubahan 2018-2023 adalah mewujudkan masyarakat NTT yang makmur dan sejahtera, dengan sasaran tumbuhnya ekonomi daerah yang stabil dan berkelanjutan, yang dijabarkan ke dalam tujuan jangka menengah Dinas Peternakan Provinsi NTT periode 2018-2023 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB
2. Meningkatkan jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar.

3.5.1. P1 - Rencana Pengembangan Ternak Sapi



Gambar 6. Peta wilayah pengembangan ternak



Perencanaan pengembangan ternak sapi adalah komponen strategis pengembangan ternak besar. Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada di aspek ini, maka tujuan perencanaan pengembangan ternak sapi dalam *grand design* ini adalah mewujudkan pertumbuhan populasi ternak besar dalam mendukung peningkatan PDRB sektor peternakan dan peningkatan unit usaha produk asal ternak sapi yang sesuai standar. Tujuan ini dapat dicapai melalui 8 (delapan) strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan produksi ternak sapi bali, sapi SO dan pengembangan ternak sapi premium (Wagyu).

Terkait dengan strategi ini, untuk peningkatan produksi ternak sapi bali dapat dilakukan melalui pembibitan ternak yang berada di intaslasi milik pemerintah di Lili Kabupaten Kupang, Besipae Kabupaten TTS dan Boawae Kabupaten Nagekeo. Selain di Instalasi Pemerintah juga pembibitan ternak di masyarakat berbasis desa di kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Lembata, Ngada dan Nagekeo.

Peningkatan produksi sapi sumba ongole dilakukan melalui pembibitan ternak di instalasi milik pemerintah di Waihibur/Kondamaloba Kabupaten Sumba Tengah dan pembibitan di masyarakat melalui pengembangan kawasan pembibitan ternak berbasis desa atau VBC di kelompok-kelompok tani ternak. Lokasi pembibitan sapi sumba ongole dimasyarakat difokuskan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba barat, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao.

Pengembangan ternak sapi premium wagyu dapat dilakukan melauai pembibitan ternak sapi persilangan wagyu di Instalasi milik pemerintah dan pembibitan ternak dimasyarakat berbasis desa. Lokasi dan pengembangan sapi persilangan wagyu masih di fokuskan di Instalasi Lili. Untuk pembibitan di masyarakat berada di daratan Timor dan Sumba.

Upaya peningkatan produksi ternak sapi bali, sumba ongole dan pengembangan sapi persilangan wagyu dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya lokal yang dimiliki serta dengan menerapkan

teknologi IB dan sinkronisasi birahi. Sistem pemeliharaan di Instalasi pemerintah secara intensif di kandang-kandang individu dan kandang komunal serta pemeliharaan dalam pedok dan pembangunan *ranch* serta *mini ranch* peternakan sapi. Untuk sistem pemeliharaan di masyarakat dapat dilakukan secara ekstensif, dimana sapi dapat dibiarkan merumput di padang atau diikat. Untuk sapi induk yang mempunyai anak, anaknya dipisah, dikandangan dan mendapat perlakuan khusus pada saat induk dilepas dipadang atau diikat pada pagi hingga sore hari. Pada sore hari anak digabung kembali dengan induknya untuk menyusui.

2. Pengembangan unit usaha produk asal ternak sapi

Strategi Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak sapi dapat dilakukan melalui penumbuhan unit-unit usaha baru dan pembinaan terhadap unit-unit usaha yang sudah ada. Unit-unit usaha diarahkan untuk dapat memenuhi standar mutu melalui penerbitan Nomor Kontrol Veteriner untuk menjamin ketersediaan pangan/produk asal ternak sapi yang ASUH. Lokasi penumbuhan dan pembinaan Unit Usaha Produk asal ternak berada di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Belu, Sumba Timur, Sumba Barat Daya, Rote Ndao, Manggarai Barat, Ende dan Sikka.

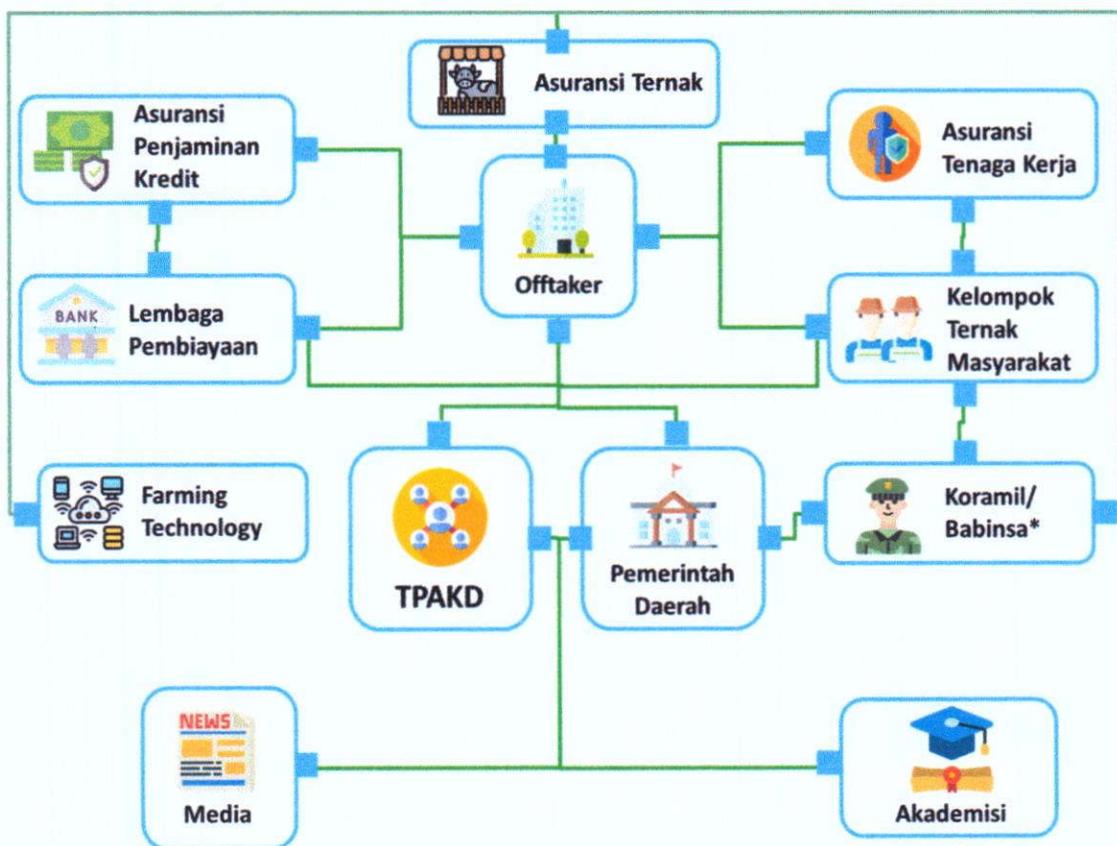
3. Pengawasan lalulintas ternak

Strategi Pengawasan lalulintas ternak dapat dilakukan dengan membentuk satgas terpadu pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dengan melibatkan instansi terkait, karantina hewan dan aparat keamanan (Polisi dan TNI). Pengawasan dilakukan disetiap pintu masuk/keluar ternak dan daerah-daerah perbatasan



4. Pembentukan ekosistem peternakan sapi

Strategi pembentukan ekosistem peternakan sapi dilakukan melalui pola kemitraan Inti-plasma dengan petani/masyarakat peternak sebagai plasma dan pemerintah/pemilik modal/ stakeholder sebagai inti. Pengembangan pusat pembibitan ternak sapi *atau breeding farm* awal dilakukan oleh inti sedangkan plasma melakukan pengembangan ternak sapi melalui pola penggemukan atau *fatering* dengan menjalin kemitraan bersama inti. Dalam pembentukan ekosistem peternakan sapi melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pembiayaan (perbankan), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), peternak, asuransi, offtaker, aparat keamanan, penerapan teknologi, akademisi dan media.

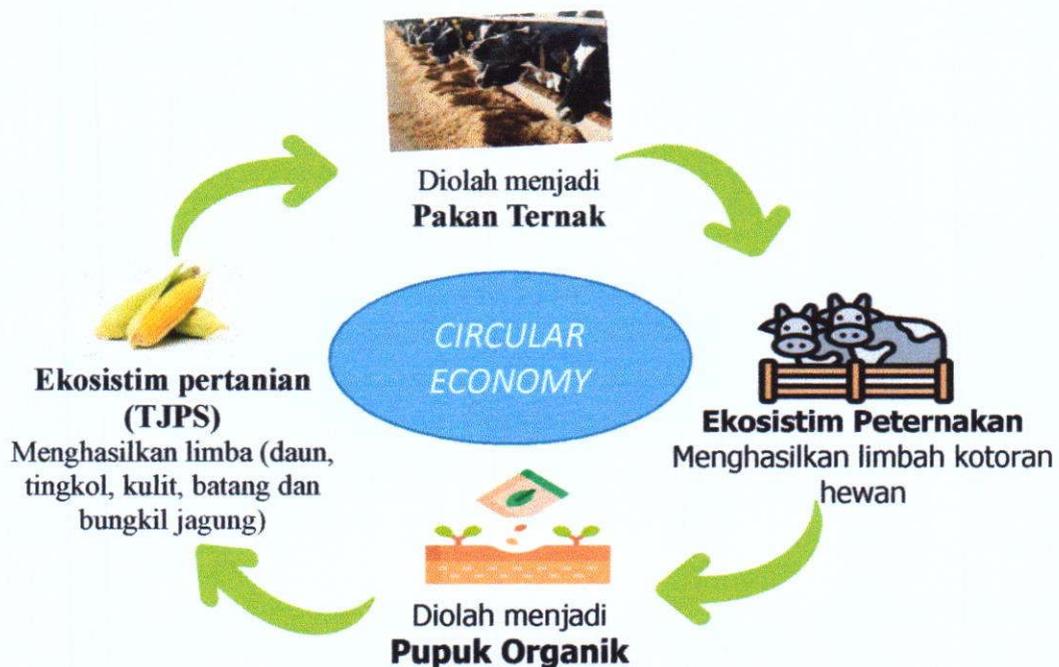


Gambar 7. Inti-Plasma Peternakan

Dalam ekosistem peternakan sapi inti-plasma akan diintegrasikan dengan ekosistem pertanian/TJPS dengan pemanfaatan limbah dari perkebunan jagung menjadi pakan ternak. Sebaliknya, untuk



pemanfaatan limbah ternak menjadi pupuk bagi ekosistem pertanian/TJPS akan diimplementasikan pada pengembangan tahap selanjutnya, sehingga tercipta sistem *Circular Economy*.



Gambar 8. *Circular economy* Integrasi ekosistem peternakan – pertanian

Pada pola kemitraan inti-plasma, juga dibangun penguatan kemitraan pemeliharaan sapi indukan dengan membentuk badan/lembaga antara lain dalam bentuk koperasi atau BUMD yang memiliki kompetensi melakukan *breeding*. Melalui dukungan offtaker dalam pendampingan teknis kepada plasma/masyarakat peternak akan terbangun kemandirian plasma/masyarakat petani ternak untuk melakukan *breeding* dan *fattening* sapi.



Gambar 9. Strategi Kemandirian

5. Pemanfaatan teknologi peternakan dan peningkatan kompetensi SDM

Strategi Pemanfaatan teknologi peternakan untuk pengembangan ternak sapi bali dan sumba ongole yang akan dilakukan yaitu melalui penerapan Inseminasi Buatan dan *Smart farming* ternak sapi..

6. Pengembangan pakan integrasi dengan eskoistim pertanian /TJPS

Strategi pengembangan pakan integrasi dengan ekosistem pertanian akan dilakukan dengan pengembangan dan penanaman hijauan makanan ternak (HMT) dilahan kering yang belum termanfaatkan dan lahan kritis, pemanfaatan kawasan hutan dengan penanaman HMT seperti lamtoro, turi, gamal dan lain-lain, pembuatan pagar hidup pada lahan kebun milik masyarakat dan pembuatan kebun HMT milik masyarakat.

Untuk penyediaan pakan secara kontinnyu dan berkualitas dengan menggunakan teknologi pengolahan pakan silase untuk hijauan dan amoniase untuk pakan kering. Penyediaan pakan silase maupun amoniase selain memanfaatkan sumber daya pakan yang ada juga dapat memanfaatkan limbah pertanian melalui integrasi dengan ekosistem pertanian antara lain pemanfaatan limbah jagung pada

program tanam jagung panen ternak (TJPS) dan limbah pada sawah/jerami.

7. Membentuk kelembagaan peternak

Strategi membentuk kelembagaan peternak berupa klaster atau kelompok peternak sapi dengan jumlah anggota kelompok minimal 10 orang per kelompok. Kelompok-kelompok peternak yang terbentuk akan dibina dan dilakukan pendampingan secara kontinyu. Juga dilakukan peningkatan kompetensi SDM kelompok dan melajui pelatihan-pelatihan secara intensif.

8. Penguatan Puskesmas dan biosecurity

Strategi penguatan puskesmas dan biosecurity dilakukan melalui revitalisasi puskesmas-puskesmas yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT, peningkatan cakupan vaksinasi ternak sapi, peningkatan kapasitas SDM puskesmas melalui pendidikan dan pelatihan, dan fasilitasi sarana kesehatan hewan.

9. Penguatan Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi

Strategi ini dilakukan melalui modernisasi RPH dan sistem manajemen RPH yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT agar memenuhi standar halal dan higienis sehingga tersedia produk daging sapi yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal serta mendorong tersedianya unit-unit usaha produk ternak asal ternak sapi yang bersertifikat NKV.

10. Pengembangan *Mini ranch*

Strategi Pengembangan *Mini ranch* dilakukan melalui pembuatan *mini ranch* yang tersebar di 13 kabupaten sentra kawasan peternakan Provinsi NTT. Introduksi dari berbagai pihak baik pemerintah, swasta dan masyarakat berupa sarana (bibit ternak, benih/anakan HMT dan lain-lain) dan prasarana (bangunan kandang, embung dan lain-lain) dapat masuk ke dalam *mini ranch*.



P2 - Rencana Pengembangan Ternak kecil (babi)

Perencanaan pengembangan ternak babi adalah komponen strategis pengembangan ternak kecil. Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada di aspek ini, maka tujuan perencanaan pengembangan ternak sapi dalam grand desain ini adalah mewujudkan pertumbuhan populasi ternak kecil dalam mendukung peningkatan PDRB sektor peternakan dan peningkatan unit usaha produk asal babi yang sesuai standar. Tujuan ini dapat dicapai melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan produksi ternak babi.

Terkait dengan strategi peningkatan produksi ternak babi dapat dilakukan melalui pembibitan ternak yang berada di intaslasi milik pemerintah di Tarus Kabupaten Kupang dan Boawae Kabupaten Nagekeo. Selain di Instalasi Pemerintah, juga pembibitan ternak di masyarakat dengan lokasi beada di 22 kabupaten/kota se-NTT.

Model pembibitan yang akan dilakukan di instalasi yaitu dengan pemeliharaan secara intensif dan modern. Ternak induk disiapkan untuk menghasilkan bibit anak babi yang akan dijual kepada masyarakat.

2. Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak babi

Strategi Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak babi dapat dilakukan melalui penumbuhan unit-unit usaha baru dan pembinaan terhadap unit-unit usaha yang sudah ada. Unit-unit usaha diarahkan untuk dapat memenuhi standar mutu melalui penerbitan Nomor Kontrol Veteriner untuk menjamin ketersediaan pangan/produk asal ternak babi yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienis. Lokasi penumbuhan dan pembinaan Unit Usaha Produk asal ternak berada di 22 kabupaen/kota se NTT



3. Pengembangan industri pakan babi

Strategi pengembangan industri pakan babi terkait dengan ketersediaan pakan babi untuk mengurangi *Capital Flight*. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pembangunan pabrik pakan. Lokasi pengembangan pembangunan pabrik pakan oleh pemerintah/provinsi berada di Kabupaten Kupang, Manggarai Timur dan Sumba Tengah dan dapat dilakukan oleh swasta/kab/kota untuk pemenuhan kebutuhan pakan di kab/kota lainnya.

4. Pembentukan ekosistem peternakan babi

Strategi pembentukan ekosistem peternakan sapi dilakukan melalui pola kemitraan Inti-plasma dengan petani/masyarakat peternak sebagai plasma dan pemerintah/pemilik modal/ stakeholder sebagai inti. Dalam pembentukan ekosistem peternakan babi melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pembiayaan (perbankan), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), peternak, asuransi, offtaker, babinsa, penerapan teknologi, akademisi dan media.

Pada pola kemitraan inti-plasma juga dibangun penguatan kemitraan dengan membentuk badan/lembaga antara lain dalam bentuk koperasi atau BUMD dan dengan dukungan offtaker dalam pendampingan teknis kepada plasma/masyarakat peternak sehingga plasma/masyarakat petani menjadi mandiri dan dapat berkembang menjadi

5. Pemanfaatan teknologi peternakan dan peningkatan kompetensi SDM

Strategi Pemanfaatan teknologi peternakan untuk pengembangan ternak babi yang akan dilakukan yaitu melalui penerapan Inseminasi Buatan dan *Smart farming* ternak sapi.



6. Membentuk kelembagaan peternak

Strategi membentuk kelembagaan peternak berupa klaster atau kelompok peternak babi dengan jumlah anggota kelompok minimal 10 orang per kelompok dan jumlah ternak 100-150 ekor. Kelompok-kelompok peternak yang terbentuk akan dibina dan dilakukan pendampingan secara kontinyu. Peningkatan kompetensi SDM kelompok akan dilakukan pelatihan-pelatihan secara intensif.

7. Penguatan Puskesmas dan biosecurity

Strategi penguatan puskesmas dan biosecurity dilakukan melalui revitalisasi puskesmas-puskesmas yang tersebar di 22 kabupaten kota se-NTT, peningkatan cakupan vaksinasi dan penyuntikan serum konvalesen serta biosecurity, peningkatan kapasitas SDM puskesmas melalui pendidikan dan pelatihan, dan fasilitasai sarana kesehatan hewan.

8. Penguatan Rumah Potong Hewan (RPH) babi

Strategi ini dilakukan melalui modernisasi RPH dan sistem manajemen RPH yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT agar memenuhi standar higienis sehingga tersedia produk daging babi yang Aman, Sehat, Utuh dan Higienais serta mendorong tersedianya unit-unit usaha produk ternak asal ternak babi yang bersertifikat NKV..

3.5.2. P3 - Rencana Pengembangan Ternak unggas

Perencanaan pengembangan ternak ayam unggas adalah komponen strategis pemenuhan daging dan telur bagi masyarakat terutama daerah kantong kemiskinan dan stunting. Berdasarkan tantangan dan peluang yang ada di aspek ini, maka tujuan perencanaan pengembangan ternak unggas dalam grand desain ini adalah mendukung peningkatan PDRB sektor peternakan dan peningkatan unit usaha produk asal ternak ayam

unggas sesuai standar. Tujuan ini dapat dicapai melalui 3 (tiga) strategi utama, yaitu:

1. Peningkatan produksi ternak ayam KUB.

Terkait dengan strategi peningkatan produksi ternak ayam KUB dapat dilakukan melalui pembibitan ternak yang berada di intaslasi milik pemerintah di Tarus Kabupaten Kupang, juga pembibitan ternak di masyarakat dengan lokasi berada di 22 kabupaten/kota se-NTT. Model pembibitan yang akan dilakukan di instalasi yaitu dengan pemeliharaan secara intensif dan modern. Kedepannya, ternak disiapkan untuk menghasilkan bibit DOC yang akan dijual kepada masyarakat.

2. Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak unggas

Strategi Pengembangan Unit Usaha Produk asal ternak unggas dapat dilakukan melalui penumbuhan unit-unit usaha baru dan pembinaan terhadap unit-unit usaha yang sudah ada. Unit-unit usaha diarahkan untuk dapat memenuhi standar mutu melalui penerbitan Nomor Kontrol Veteriner untuk menjamin ketersediaan pangan/produk asal ternak unggas yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Lokasi penumbuhan dan pembinaan Unit Usaha Produk asal ternak berada di 22 kabupaen/kota se NTT.

3. Pengembangan industri pakan unggas

Strategi pengembangan industri pakan unggas terkait dengan ketersediaan pakan unggas untuk mengurangi *Capital Flight*. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui pembangunan pabrik pakan. Lokasi pengembangan pembangunan pabrik pakan oleh pemerintah/provinsi berada di Kabupaten Kupang, Manggarai Timur dan Sumba Tengah dan dapat dilakukan oleh swasta/kab/kota untuk pemenuhan kebutuhan pakan di kab/kota lainnya.



4. Pembentukan ekosistem peternakan ayam KUB

Strategi pembentukan ekosistem peternakan sapi dilakukan melalui pola kemitraan Inti-plasma dengan petani/masyarakat peternak sebagai plasma dan pemerintah/pemilik modal/ stakeholder sebagai inti. Dalam pembentukan ekosistem peternakan ayam KUB melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, lembaga pembiayaan (perbankan), Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD), peternak, asuransi, oftaker, babinsa, penerapan teknologi, akademisi dan media.

Pada pola kemitraan inti-plasma yang dibangun penguatan kemitraan dengan membentuk badan/lembaga antara lain dalam bentuk koperasi atau BUMD dan dengan dukungan oftaker dalam pendampingan teknis kepada plasma/masyarakat peternak akan terbangun kemandirian plasma/masyarakat petani ternak untuk menjadi inti.

5. Pemanfaatan teknologi peternakan dan peningkatan kompetensi SDM

Strategi Pemanfaatan teknologi peternakan untuk pengembangan ternak babi yang akan dilakukan yaitu melalui penerapan Inseminasi Buatan dan *Smart farming* ternak unggas.

6. Membentuk kelembagaan peternak

Strategi membentuk kelembagaan peternak berupa klaster atau kelompok peternak ayam KUB dengan jumlah anggota kelompok minimal 10 orang per kelompok dengan jumlah ternak minimal 1.500 ekor-. Kelompok-kelompok peternak yang terbentuk akan dibina dan dilakukan pendampingan secara kontinyu. Peningkatan kompetensi SDM kelompok akan dilakukan pelatihan-pelatihan secara intensif.

7. Penguatan Puskeswan dan biosecurity

Strategi penguatan puskesmas dan biosecurity dilakukan melalui revitalisasi puskesmas-puskesmas yang tersebar di 22 kabupaten kota se-NTT, peningkatan cakupan vaksinasi, membangun zona kompartemen bebas dan memperketat biosecurity, peningkatan



kapasitas SDM puskesmas melalui pendidikan dan pelatihan, dan fasilitasai sararan kesehatan hewan.

8. Penguatan Rumah Potong Unggas (RPU)

Strategi ini dilakukan melalui modernisasi RPU dan sistim manajemen RPU yang tersebar di 22 kabupaten/kota se-NTT agar memenuhi standar halal dan higienis sehingga tersedia produk daging asal ternak unggas yang Aman, Sehat, Utuh, Halal dan Higienais serta mendorong tersedianya unit-unit usaha produk ternak asal unggas yang bersertifikat NKV.

3.6. Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan strategis yang dapat dilakukan dalam pengembangan ternak sapi, babi dan ayam KUB yakni :

3.6.1. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian melalui Kapitalisasi dan Optimalisasi Instalasi Peternakan Pemerintah.

Instalasi milik pemerintah provinsi NTT dibawah tanggung jawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas memiliki 8 instalasi yakni



Gambar 10. Peta Sumber Daya Aset UPT Pembibitan Ternak Dan Produksi Pakan Ternak



yang tidak bertanggungjawab, lokasi Instalasi dipindahkan ke dusun Oeboi, Desa Mio (masih dalam kawasan 3780 Ha/lokasi pintu masuk pertama ke ranch Besipae). Lokasi baru Instalasi di Desa Oeboi Mio memiliki sejumlah sarana prasana pendukung kegiatan antara lain: Kantor/Gedung administrasi, mess karyawan (2 unit), gudang pakan, kandang sapi, pos jaga pengamanan ternak, dan kandang penampungan sapi.

Kawasan disekitar Besipae seluas 6.000 Ha, sangat berpotensi untuk dijadikan kawasan pengembangan ternak sapi. Dalam lokasi instalasi tersebar 22 buah Danau Buatan (DAM) yang dibangun oleh NTT – *Livestock Development Project* pada tahun 1984. Pada bulan Oktober 2004, DAM yang ada mengalami kekeringan sehingga semuanya tidak berfungsi dengan baik. Dalam hal produksi hijauan, ditemukan bahwa adanya fluktuasi yang cukup besar sesuai dengan musim. Sehingga pada musim hujan produksi hijauan tinggi dan dapat menampung sapi 8 – 10 ekor per Ha, sedangkan pada bulan Juni dan seterusnya jumlah ternak yang dapat dipelihara adalah sebanyak 1 ekor per 3 - 4 Ha.

Mayoritas penduduk di Kawasan Besipae mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani/peternak. Jenis usaha tani yang di kembangkan oleh penduduk setempat adalah pertanian lahan kering, dengan komoditi utama adalah jagung dan ternak. Dalam pemeliharaan ternak, sebagian besar masih mengusahakan dengan pola tradisional, yakni di lepas bebas di padang rumput, sedangkan sebagian kecil penduduk lainnya telah mengembangkan sistim.

Penggunaan lahan oleh dinas peternakan provinsi NTT untuk kegiatan peternakan adalah seluas 2.300 Ha untuk padang penggembalaan, termasuk penanaman hijauan makanan ternak insentif 245 Ha. Jenis HMT yang dikembangkan adalah jenis Lamtoro, Turi, Gamal dan Kabesak. Seluas 5 Ha di gunakan untuk perumahan karyawan, mess, kandang ternak, gudang dan bak air, sedangkan sisanya adalah kawasan hutan.

Komoditas utama ternak yang dikembangkan di Instalasi Besipae adalah sapi Bali. Jumlah sapi Bali yang masih menjadi milik Pemerintah

adalah sebanyak 278 ekor dengan rincian sebanyak 190 yang dipelihara oleh 50 KK Petani mitra dari 4 desa di sekitar Instalasi Besipae. Sedangkan di dalam pedok dipelihara 88 ekor. Dengan memperhatikan luas kawasan Besipae (4.000 ha) dan diluar kawasan Besipae 6.000 ha maka Instalasi Besipae masih berpotensi untuk ditingkatkannya produksi peternakan melalui pengembangan sapi bali potong.

Prasarana jalan aspal membelah lokasi \pm 20 Km dan pendukung lainnya adalah Kantor instalasi, mess, kandang sapi, jaringan instalasi pipa air dan bak air, tower air dan sumur bor, gedung kantor, pagar hidup dan kawat duri keliling, gudang pakan, deker, kandang tampung sapi, gangway dan bak dipping masing-masing 1 unit. Instalasi Besipae juga didukung oleh SDM yang masih aktif terdiri dari PNS 5 orang, tenaga honorer 17 orang dan tenaga lepas lapangan 1 orang

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak sapi bali di besipae yakni : Pengadaan sapi bali, pembuatan pedok, perencanaan pagar pedok, pembangunan pagar pedok, pembuatan kebun HMT, pembuatan silase, pembuatan amonise jerami, pembangunan embung, pembangunan bak tampung air, pembelian semen beku, Insemiansi Buatan, pelatihan petugas IB, PKB, ATR, medic dan paramedic veteriner, pembangunan kandang, pelatihan kerja lapangan siswa dan mahasiswa dan dapat dikerjasamakan dengan pihak swasta.

3.6.1.2. Pembibitan Ternak Sapi Bali di Instalasi Lili

Instalasi Lili terletak di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu Kabupaten Kupang, sekitar 39 Km dari Ibu kota Propinsi NTT, Kupang. Instalasi Lili di kelilingi oleh 2 desa yaitu Desa Camplong I dan Desa Kuimasi. Berdiri sejak tahun 1979 dengan nama Balai Pembibitan Ternak dan HMT, dibawah Dirjen Peternakan. Namun sejak tahun 2000, diserahkan ke Pemda Provinsi NTT. Instalasi Lili memiliki luas area 38,3 Ha terdiri atas 19,4 Ha kebun HMT dilokasi I dan 18,9 Ha di lokasi II terdiri atas 5 Ha kebun HMT, 12 Ha padang penggembalaan dan sisanya 1,9 Ha adalah gedung kantor, mess, gedung ULIB dan kandang ternak. Lokasi I terletak pada koordinat 10°04'23"S 123°52'42"E sedangkan lokasi II terletak pada



koordinat 10°03'48"S 123°53'08"E. Pada Lokasi I, keadaan topografi landai berkisar antara 0 -15 %, tanah mengandung formasi alluvium yang terdiri atas tanah-tanah lempeng pasiran berwarna hitam. Areal tersebut kedap air sehingga menyebabkan air mudah tergenang. Kondisi drainase jelek karena dilintasi oleh sebuah kali kering dimana pada musim hujan selalu terjadi banjir dan bila tidak dibersihkan alirannya maka akan merusak tanaman yang ada di Lokasi. Pada Lokasi II, topografi didominasi oleh daerah dengan kemiringan 8–15 % sehingga drainase cukup bagus dan tanah mengandung batu gamping terumbu yang dapat digunakan sebagai areal pertanian lahan kering dan pengembangan HMT jenis Legum seperti turi, lamtoro dan gamal.



Gb.12. Dena Lokasi lahan 1 instalasi Lili (sumber : Google Earth)



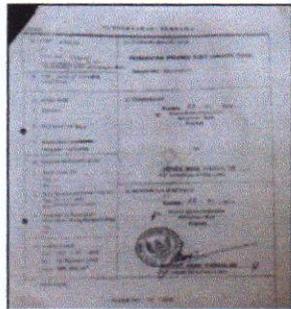
Gb.13. Dena Lokasi lahan 2 instalasi Lili (sumber : Google Earth)

Kegiatan peternakan yang saat ini dikembangkan di Instalasi Lili adalah kegiatan pengembangan ternak Sapi Bali dalam pedok dan pengembangan dengan petani mitra, pengembangan sapi bali - waguay serta pengembangan HMT antara lain pengembangan rumput odot, rumput cipelang, lamtoro taramba, dan gamal.

Kegiatan pengembangan ternak sapi bali dan sapi bali - waguay yang dikembangkan di Instalasi Lili merupakan kegiatan pembibitan ternak dengan sistem pemeliharaan semi intensif dengan pemberian pakan menggunakan sistem *cut and carry*. Sistem perkawinan ternak yang dikembangkan adalah kawin alam dan IB. Kegiatan pengembangan



pakan ternak yang dilakukan di Instalasi Lili meliputi pengembangan HMT unggulan seperti rumput odot dan lamtoro taramba, dan pengolahan pakan ternak seperti jerami olahan dan silase.



Gb. 14. Sertifikat Lahan Lokasi Instalasi Lili (sumber : Dokumen Dinas Peternakan Prov.NTT)

Status kepemilikan lahan Instalasi Lili seluas 38,3 Hektar sudah bersertifikat dengan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemprov) Nusa Tenggara Timur. Status lahan lokasi I sudah bersertifikat sejak 2010 (Sertifikat Hak Pakai No. 4 Tahun 2010) dan lahan lokasi II sudah bersertifikat sejak 1983 (Sertifikat Hak Pakai No. 580 Tahun 1983).

Sarana prasarana pendukung pengembangan pembibitan ternak sapi bali dan menjadi aset Instalasi Lili dilihat pada tabel 11.

Tabel 11. Daftar asset sarana prasarana Instalasi Lili Tahun 2021

NO	Unit	Jumlah	Kondisi
1	Bangunan Kantor	1 unit	Baik
2	Aula	1 unit	Rusak Ringan
3	Mess Karyawan	4 unit	Baik
4	ULIB	1 unit	Baik
5	Gudang Pakan	1 unit	Baik
6	Unit Pengolahan Pakan	1 unit	Baik
7	Rumah Kompos	1 unit	Rusak Sedang
8	Kandang Induk Kering & Bunting	2 unit	Baik
9	Kandang Induk Beranak	2 unit	Baik
10	Kandang Pejantan	1 unit	Baik
11	Kandang Jepit	1 unit	Baik
12	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	13 orang	aktif
13	Tenaga Honorer	5 orang	aktif
14	Tenaga Lepas Lapangan	2 orang	aktif

Model pengembangan pembibitan ternak sapi bali di kawasan Instalasi Lili yaitu model pemeliharaan secara intensif di kandang-kandang individu dan pemeliharaan semi intensif dimana siang di lepas dan malam dikandang komunal.



Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak sapi bali di Instalasi Lili yakni : Penolahan lahan HMT, pengadaan dan penanaman anakan HMT, pembuatan silase, pembuatan amoniase jerami padi, pengadaan ternak sapi bali, pelatihan petugas IB, ATR, PKB, pelatihan petugas medis dan para medis, pembangunan dan pengadaan prasarana peternakan.

3.6.1.3. Pembibitan Ternak Sapi Bali di Instalasi Boawae

Instalasi Boawae terletak di Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yang berjarak \pm 42 km dari ibu kota Kabupaten Nagekoe. Luas Areal Instalasi Boawae \pm 45,5 Ha, lahan HMT \pm 5 Ha, Kebun kelapa 8 Ha dan sisanya belum termanfaatkan secara optimal. Sejak otonomi daerah berdasarkan Perda no.5 Tahun 2000 pemerintah daerah Kabupaten Ngada (sebelum dimekarkan menjadi dua Kabupaten dengan Kabupaten Nagekeo) menyerahkan status tanah bersertifikat nomor AQ-535637 tahun 1955) kepada pemerintah Provinsi yang di kelola oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis) Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak pada Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Mayoritas penduduk di Kawasan Boawae mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani/peternak. Pada musim paceklik, sebagian besar penduduk keluar desa untuk mencari nafkah sebagai tukang, buruh dan sebagainya. Jenis usaha tani yang di kembangkan oleh penduduk setempat adalah pertanian lahan kering, dengan komoditi utama adalah ternak dan jagung serta sebagian lagi yang mengusahakan penanaman leguminose sebagai sumber pakan ternak. Dalam pemeliharaan ternak, selain ternak besar yang masih menggunakan pola tradisional masih dimungkinkan untuk pengembangan ternak kecil (babi) dengan pola pengembangan teknologi agribisnis secara moderen. Populasi ternak babi di Kecamatan Boawae adalah 23.060 ekor.





Gb 15 Denah Lokasi Instalasi Boawae
(sumber : Google Earth)

Komoditas utama ternak yang dikembangkan di Instalasi boawae adalah sapi bali. Jumlah yang masih menjadi milik pemerintah adalah sebanyak 313 yang tersebar di 7 desa di sekitar Instalasi, sedangkan di dalam instalasi dipelihara 31 ekor. Prasarana pendukung yang masih dapat digunakan adalah bangunan kantor, pos jaga, kandang partus, kandang penyapihan, kandang grower, kandang pejantan, kandang

kering bunting, kandang karantina, gudang pakan, gudang pengolahan pakan, insenerator, kandang pemeliharaan sapi, masing-masing 1 unit dan mes karyawan 5 unit.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak sapi bali di Instalasi Boawae yakni pembuatan kebun HMT, Pembuatan kebun sorgum, pengadaan benih lamtoro dan sorgum, penanaman lamtoro dan sorgum, pembuatan silase dan amoniase jerami, pengadaan ternak sapi bali, pelatihan petugas IB, PKB, ATR, praktek kerja lapangan siswa dan mahasiswa, pengadaan dan pembangunan prasarana peternakan

3.6.1.4. Pembibitan Ternak Sapi Sumba Ongole di Instalasi Kondamaloba

Instalasi Kondamaloba terletak di Kabupaten Sumba Tengah, Kecamatan Katikutana ± 13 Km dari Ibukota Kabupaten Sumba Tengah dengan luas +/- 500 Ha memiliki topografi landai sampai dengan kemiringan 5 – 15 % dengan drainase cukup baik. Instalasi ini terletak pada koordinat Lat S -9° 40' " Long E 119° 37". Jenis tanah dalam lokasi adalah formasi gamping terumbu serta mengandung tanah liat dan cocok untuk usaha pertanian dan peternakan. Lokasi tersebut juga dilintasi oleh sebuah sungai kecil yang tidak pernah kering sepanjang tahun. Disamping itu lokasi tersebut mengandung air tanah yang dangkal (5 – 10 meter). Status lahan instalasi Kondamaloba belum bersertifikat.

Instalasi Kondamaloba di Kabupaten Sumba Tengah merupakan lokasi pengembangan Hijauan Pakan Ternak seperti rumput Taiwan, lamtoro taramba, dan sapi sumba ongole dalam pedok dan



pengembangan dengan petani mitra. Kegiatan pengembangan instalasi didukung oleh prasarana: mess karyawan, kendaraan roda 2, kantor, Kandang Sapi, Bak Air, Bak Dipping, Gudang Pakan, sebagai berikut. Sumber daya manusia yang dimiliki sebanyak 12 orang yakni PNS 5 orang, tenaga honorer 4 orang dan tenaga lepas lapangan 3 orang.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk optimalisasi instalasi kondamaloba antara lain Pembuatan kebun HMT, Pembibitan anakan lamtoro, Penanaman & pemeliharaan anakan lamtoro, Pembuatan silase, Pengadaan sapi Sumba Ongole, Pelatihan petugas IB, PKB, ATR, Praktek kerja lapangan mahasiswa dan siswa, Pembangunan kandang kelompok, Pengadaan Mesin Chopper dan Pengadaan Hay Press.

3.6.1.5. Pembibitan Ternak Sapi Wagyu di Instalasi Kabar

Instalasi Kabar terletak di Kabupaten Sumba Timur, Kecamatan Rindi, Desa Kabar ± 94 km dari Ibukota Kabupaten Sumba Timur. Instalasi Kabar berdiri sejak tahun 1979 yang dikelola oleh Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak milik Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Sejalan dengan Otonomi Daerah maka pada tahun 2000, lokasi ini diserahkan ke Pemda Provinsi NTT melalui Dinas Peternakan Provinsi dan saat ini menjadi salah satu instalasi di UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Pakan Ternak. Status lahan instalasi Kabar saat ini belum bersertifikat.

Instalasi Kabar memiliki luas 520 Ha dengan kemiringan 0 – 5 %, Jenis tanahnya adalah kombinasi formasi *alluvial* yang berbentuk batu gamping terumbu, sangat cocok untuk usaha pertanian irigasi serta pertanian lahan kering dan pengembangan hijauan pakan ternak. Dalam lokasi Instalasi terdapat 5 buah sumber air yang terdiri dari 2 buah sumber air besar dengan rata – rata debit air 15 liter / detik dan 3 buah mata air kecil dengan rata - rata debit air 5 - 7 liter / detik. Dari ke 5 buah sumber air dalam lokasi membentuk 2 buah sungai yang melintasi lokasi tersebut.



Kegiatan utama pada instalasi ini adalah pembibitan ternak sapi *Ongole* dan, penanaman Hijauan Pakan Ternak serta penggaduhan ternak sapi dengan petani mitra sekitar instalasi sejak tahun 2007. Pembibitan ternak sapi sangat potensial untuk dikembangkan pada instalasi ini dengan jumlah yang lebih banyak didalam *pedok* maupun dengan petani mitra sekitar instalasi. Fasilitas yang dimiliki instalasi Kabaruu prasarana bangunan.

Saat ini di instalasi kabaruu mulai di kembangkan sebagai pusat pembibitan sapi persilangan wagyu dan juga pembibitan sapi premium wagyu, Kegiatan yang dapat dilakukan di Instalasi Kabaruu yakni Pengadaan pakan konsentrat ruminansia, Pengadaan benih HMT (legume), Pengadaan benih HMT (Rumput), Pengadaan ternak sapi wagyu, Pengadaan mesin press pakan, Pengadaan pompa mobile, Pengadaan traktor roda 4, Pengadaan mesin chopper, Pembangunan jaringan irigasi, Pembangunan reservoir, Pembangunan instalasi biogas.

3.6.1.6. Pembibitan Ternak Sapi Bali di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Lembata, Ngada dan Nagekeo.

Model pembibitan sapi bali di masyarakat dengan pengembangan kawasan pembibitan ternak berbasis desa atau VBC di kelompok-kelompok tani ternak dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Lokasi pembibitan sapi bali di masyarakat difokuskan di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Lembata, Ngada dan Nagekeo.

Kegiatan yang dapat dilakukan pada model pembibitan sapi bali di masyarakat yakni pengolahan kebun HMT, pengadaan bibit lamtoro, penanaman anakan lamtoro, pengenalan pelatihan teknologi pengolahan pakan (silase, amoniase) di kelompok tani ternak, pembuatan silase, pembuatan amoniase, pengadaan bibit sapi bali untuk diserahkan ke masyarakat, pelaksanaan IB pada sapi bali, pemeriksaan kebuntingan, pelatihan pendamping kepada (TLL dan Mahasiswa), pembuatan embung, pengadaan ekskavator untuk mobilisasi pengolahan lahan HMT masyarakat, penyediaan traktor roda 4, penyediaan chooper mobile,



penyediaan mesin high press, penyediaan timbangan ternak elektrik dan penyediaan drum penampungan silase

3.6.1.7. Pembibitan Ternak Sapi Sumba Ongole di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao

Model pembibitan sapi sumba ongole di masyarakat dengan pengembangan kawasan pembibitan ternak berbasis desa atau VBC di kelompok-kelompok tani ternak dengan memanfaatkan sumber daya lokal. Lokasi pembibitan sapi sumba ongole di masyarakat difokuskan di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah, Sumba Barat, Sumba Barat Daya dan Rote Ndao

Kegiatan yang dapat dilakukan pada model pembibitan sapi sumba ongole di masyarakat yakni, pengadaan bibit lamtoro, penanaman anakan lamtoro, pengenalan pelatihan teknologi pengolahan pakan (silase, amoniase) di kelompok tani ternak, pembuatan silase, pembuatan amoniase, pembelian bibit sapi sumba ongole untuk diserahkan ke masyarakat, pelaksanaan IB pada sapi sumba ongole pemeriksaan kebuntingan, pelatihan pendamping kepada (TLL dan Mahasiswa), pembuatan embung, pengadaan ekskavator untuk mobilisasi pengolahan lahan HMT masyarakat, penyediaan traktor roda 4, penyediaan chooper mobile, penyediaan mesin pengolah pupuk organik, penyediaan mesin high press, penyediaan timbangan ternak elektrik dan penyediaan drum penampungan silase

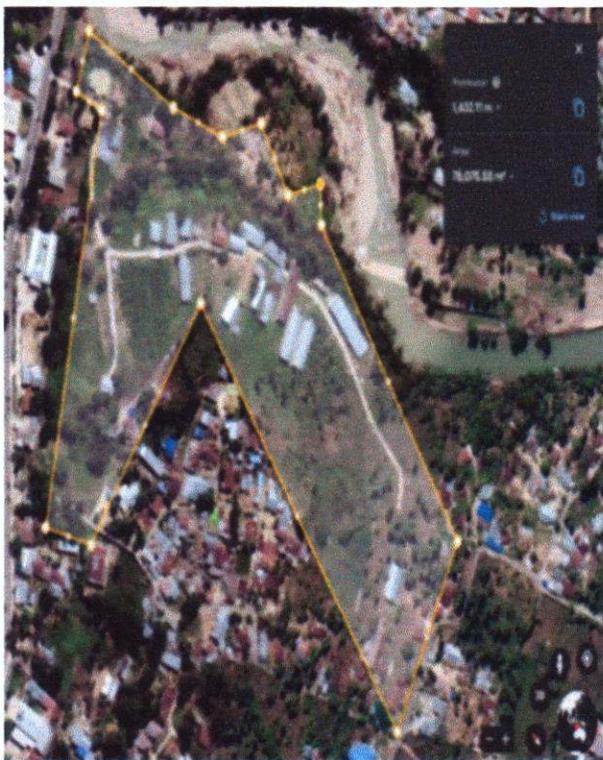
3.6.1.8. Pembibitan Ternak Sapi Persilangan Wagyu di masyarakat

Model pembibitan sapi persilangan wagyu di masyarakat dengan pengembangan kawasan pembibitan ternak berbasis desa atau dengan istilah *Village Breeding Centre* (VBC) di kelompok-kelompok tani ternak dengan memanfaatkan sumber daya lokal (indukan sapi, pakan, dll). Lokasi pembibitan sapi persilangan wagyu di masyarakat dengan lebih difokuskan di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka.



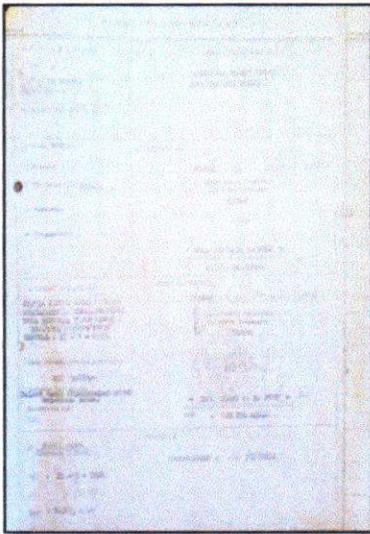
Kegiatan yang dapat dilakukan pada model pembibitan sapi persilangan wagu di masyarakat yakni : Pembuatan kebun HMT, penanaman anakan lamtoro, Pengadaan benih/bibit semen beku untuk Pemurnian bibit sapi Wagyu, Pelaksanaan IB, Pemeriksaan kebuntingan, pembuatan silase, Pembuatan amoniase jerami, Pelatihan pendamping kepada (TLL dan Mahasiswa), Pembangunan embung, Penyediaan Pompa air dan perpipaan, Pembelian Exavator, Pembelian Tractor roda 4, Pembelian Chooper mobile, Pembelian Mesin baler silase, Pembelian Mesin pengolah pupuk organik, Pembelian mesin penepung, Penyediaan Mesin high press, Pembelian Timbangan ternak elektrik, Pembelian Drum penampungan silase.

3.6.1.9. Pembibitan Ternak Babi di Instalasi Tarus



Gb.16 Dena Lokasi Instalasi Tarus
(sumber: Google Earth)

Instalasi Tarus terletak di Kabupaten Kupang, Kecamatan Kupang Tengah, 13 km dari Kota Kupang. Luas areal Instalasi Tarus 7,8 Ha, topografi agak datar dengan derajat kemiringan 5 – 10 % dan drainase sangat baik. Instalasi ini terletak pada koordinat $10^{\circ}08'02''\text{S}$ $123^{\circ}41'07''\text{E}$. Pada lokasi ditemukan formasi batu gamping terumbu yang memungkinkan untuk digunakan sebagai areal pengembangan HMT dengan Jenis *Leguminosa*.



Gb. 17. Sertifikat Lahan Lokasi Tarus (sumber: Dokumen Dinas Peternakan Prov.NTT)

Status lahan sudah bersertifikat dengan kepemilikan oleh Pemerintah Daerah Tingkat I (Pemprov) Nusa Tenggara Timur, bersertifikat hak pakai Nomor 532.1/63/316/KPG/ 1995 sejak Tahun 1995 dan sejauh ini belum pernah diokupasi oleh masyarakat. Permasalahan utama yang dialami di Instalasi Tarus adalah kondisi instalasi yang berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat dan kondisi pagar yang tidak terpagari dengan baik, sehingga masyarakat masih menggunakan akses jalan di kompleks instalasi. Hal ini tentunya mengganggu penerapan sistem biosecurity di instalasi.

Instalasi Tarus merupakan salah satu instalasi dengan potensi pengembangan yang sangat besar karena didukung oleh lahan yang cukup luas, lokasi yang strategis dan mudah diakses, ketersediaan sumber air yang dekat dengan lokasi instalasi, sumber daya manusia yang memadai serta sarana prasarana pendukung seperti bangunan kandang, gudang pakan.



Gb.18. Dena Lokasi bangunan 1 Tarus (sumber: Google Earth)

Keterangan:

1. Bangunan Kantor Baru
2. Mess Karyawan
3. Bangunan Kantor Lama
4. OPAL
5. Kandang Sapihan (Kandang piglet)
6. Kandang Induk
7. Kandang Kering
8. Kandang Induk
9. Mess Karyawan
10. Gudang Pakan Lama
11. Kandang Anak (Piglet)
12. Unit Pengolahan Pakan
13. Gudang Pakan Ayam
14. Rumah Pengering Kelor
15. Kandang Partus
16. Lab dan Kandang Pejantan
17. Kandang Partus
18. Kandang Induk (Rusak)
19. Kandang Partus
20. Kandang Partus

Berdasarkan data aset bangunan dan kandang instalasi di atas, terlihat jelas bahwa instalasi tarus ini memiliki daya dukung bangunan yang memadai untuk program pengembangan ke depannya demi peningkatan populasi ternak sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Sebagai pusat pembibitan ternak babi Instalasi Tarus memiliki daya tampung ternak babi sebanyak 350 ekor indukan, 500 ekor anak babi (piglet) dan 10 ekor pejantan.

Pembibitan ternak babi di Instalasi Tarus dalam 5 tahun ke depan atau sampai dengan tahun 2026 akan dikaji kembali keberlangsungannya apakah perlu direlokasi atau tidak. Apabila hasil kajian memungkinkan harus direlokasi maka pembibitan ternak babi di Instalasi Tarus akan direlokasi ke Instalasi Lili. Sementara itu Instalasi Tarus pasca relokasi akan dijadikan sebagai pusat pendidikan pembibitan ternak saja.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak babi di Instalasi Tarus yakni: Pengadaan pejantan dan induk babi ras, pembuatan pakan, pengadaan dan penyuntikan vaksin Hog Cholera, pengadaan dan penyuntikan serum konvalesen, pejantan, pelatihan petugas IB, pembangunan dan pengadaan prasarana peternakan, praktek kerja lapangan siswa dan mahasiswa.

3.6.1.10. Pembibitan ternak Babi di Instalasi Boawae

Instalasi Boawae selain sebagai kawasan pembibitan ternak besar (Ternak Sapi), juga berpotensi untuk pengembangan ternak kecil terutama babi, sehingga pemerintah daerah melalui UPT Pembibitan Ternak dan Produksi Makanan Ternak Dinas Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur bertekad menjadikan instalasi boawae sebagai kawasan pengembangan pusat pembibitan ternak babi. Hal ini memberikan gambaran bahwa lahan masih dapat dikembangkan dan dimanfaatkan sesuai rencana pengembangan yang dimaksud, bersinergi dengan sekolah, masyarakat sekitar dan stakeholder terkait.

Instalasi boawae saat ini mengembangkan pembibitan ternak babi dengan jumlah 115 ekor. Memperhatikan luas kawasan Instalasi Boawae

dan diluar kawasan Instalasi, masih memungkinkan dan berpotensi untuk ditingkatkannya produksi peternakan melalui pengembangan ternak Babi.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak babi di Instalasi boawae yakni: Pembibitan ternak babi dengan kegiatan pengadaan pejantan dan induk babi ras, pembuatan pakan, pengadaan dan penyuntikan vaksin Hog Cholera, pengadaan dan penyuntikan serum konvalesen, pelatihan petugas IB, pembangunan dan pengadaan prasarana peternakan, praktek kerja lapangan siswa dan mahasiswa.

3.6.1.11. Pembibitan Ternak Babi di Masyarakat

Model pembibitan ternak babi di masyarakat yakni melalui pengembangan pusat-pusat pembibitan di kelompok-kelompok tani ternak, peternak mandiri dan farm-farm pembibitan dengan menganut pola inti – plasma dimana kelompok-kelompok peternak dan peternak mandiri sebagai plasma dan farm pembibitan sebagai inti.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak babi di Instalasi boawae yakni: Pembibitan ternak babi dengan kegiatan pengadaan pejantan dan induk babi ras, pembuatan pakan, pengadaan dan penyuntikan vaksin Hog Cholera, pengadaan dan penyuntikan serum konvalesen.

3.6.1.12. Pembibitan Ternak Ayam KUB di Instalasi Tarus

Instalasi tarus selain sebagai pusat pembibitan babi, juga akan dikembangkan pusat pembibitan ayam KUB. Denah bangunan dan kandang instalasi untuk pembibitan ternak unggas seperti pada gambar



Gb.19 Dena Lokasi bangunan 2Tarus
(sumber: Google Earth)

Keterangan:

1. Bangunan Kandang Ayam Baru
2. Bangunan Kandang Lama (Rusak)
3. Rumah Potong Unggas
4. Unit Pemasaran
5. Mess Karyawan
6. Gudang



Berdasarkan data asset bangunan dan kandang instalasi di atas, terlihat jelas bahwa instalasi tarus ini memiliki daya dukung bangunan yang belum memadai namun untuk program pengembangan ke depannya dapat dilakukan untuk peningkatan populasi ternak sesuai dengan tujuan yang tertuang dalam RPJMD. Sebagai pusat pembibitan dan pengembangan produksi ternak ayam KUB, Instalasi Tarus dapat ditingkatkan daya tampungnya sebanyak 15.500 ekor.

Pembibitan ternak ayam KUB di Instalasi Tarus dalam 5 tahun ke depan atau sampai dengan tahun 2026 akan dikaji kembali keberlangsungannya apakah perlu direlokasi atau tidak. Apabila hasil kajian memungkinkan harus direlokasi maka pembibitan ayam KUB di Instalasi Tarus akan direlokasi ke Instalasi Lili. Sementara itu Instalasi Tarus pasca relokasi akan dijadikan sebagai pusat pendidikan pembibitan ternak saja.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak ayam KUB di Instalasi Tarus yakni : Pengadaan bibit ayam KUB, pembuatan pakan, pengadaan dan penyuntikan vaksin, pengadaan vitamin dan obat-obatan, pembangunan dan pengadaan prasarana peternakan, praktek kerja lapangan siswa dan mahasiswa.

3.6.1.13. Pembibitan Ternakm Ayam KUB di Masyarakat

Model pembibitan ternak ayam KUB di masyarakat yakni melalui pengembangan pusat-pusat pembibitan di kelompok-kelompok tani ternak, peternak mandiri dan farm-farm pembibitan dengan menganut pola inti – plasma dimana kelompok-kelompok peternak dan peternak mandiri sebagai plasma dan farm pembibitan sebagai inti dengan Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pembibitan ternak ayam KUB di masyarakat yakni: pengadaan ternak ayam KUB, pengadaan pakan, pengadaan obat dan vitamin.



3.6.2. Program Penyediaan dan pengembangan Sarana Pertanian melalui Peningkatan Jumlah dan Mutu Genetik Sapi.

Mutu genetik dan kualitas ternak sapi berdampak pada tingkat produktifitas. Untuk menghasilkan ternak sapi dengan kualitas unggul, berbagai terobosan telah dilakukan baik oleh pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota dan stakeholders/swasta. Upaya peningkatan dan perbaikan kualitas ternak sapi lokal bali dan sumba ongole (SO) di NTT terus digalakkan dari tahun ke tahun untuk menghasilkan ternak sapi dengan kualitas unggul.

Peningkatan kuantitas dan kualitas sapi bibit betina sangat diperlukan sehubungan dengan upaya peningkatan populasi ternak melalui peningkatan angka kelahiran. Jumlah dan mutu ternak induk sapi yang banyak tentunya diharapkan dapat meingkatkan jumlah kelahiran dengan mutu yang unggul. Berbagai upaya terus dilakukan untuk peningkatan jumlah sapi bibit betina dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Karantina, aparat penegak, RPH, swasta dan masyarakat

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas dan mutu genetik ternak sapi yakni dengan melakukan Inseminasi Buatan (IB), Introduksi sapi wagyu telah dilakukan di Instalasi Kabaruu oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak swasta (PT Asia Beef) dan terus digalakkan di kabupaten/kota se NTT, Intensifikasi kawin alam (INKA), penerbitan Surat Keterangan Layak Bibit (SKLB) ternak sapi, klasterisasi wilayah bibit/pemurnian genetik pencegahan pengeluaran/pemotongan ternak betina produktif, pemberantasan penyakit hewan menular strategis Brucellosis

3.6.3. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian melalui Pengembangan Pabrik Pakan

Produk unggas dan babi dinilai termasuk jenis produk yang stabil dan mampu bertahan di tengah kisis global karena mampu menyediakan protein hewani dengan harga yang murah. Ketersediaan produk unggas babi perlu di dukung dengan perkembangan industri pakan. Industri pakan berfungsi sebagai penyedia input terbesar dalam



budidaya ternak. Pakan merupakan aspek yang sangat penting selain bibit. Pakan mempunyai peran yang paling besar bisa mencapai 60-70% dibanding faktor lainnya.

Ketersediaan pakan murah dan berkualitas menjadi syarat tumbuh dan berkembangnya suatu usaha peternakan. Berkembangnya industri peternakan menyebabkan meningkatnya permintaan terhadap pakan tersebut karena industri pakan ternak memiliki keterkaitan ke depan (*forward linkage*) berhubungan dengan output pakan yang digunakan sebagai makanan ternak dan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang berhubungan dengan kebutuhan akan input pakan terutama jagung. Oleh karena itu, bisnis pakan merupakan usaha yang sangat strategis. Pangsa pakan terhadap total biaya produksi mencapai 70%, sementara itu biaya bahan baku mencapai 85-90% dari total pakan. Sedangkan pangsa biaya lainnya seperti DOC (bibit) hanya mencapai 13%. Di sisi lain, 83% produksi pakan dialokasikan untuk unggas, 7% untuk budidaya ikan, 6% untuk babi, 1% untuk pakan ternak lainnya (Agustina SE, 2009). *Capital flight* untuk pakan babi dan unggas tahun 2019 sebesar 1,1 Trilyun (Prisma, 2019) setara dengan kebutuhan pakan 129.411.765 kg. Satu unit pabrik pakan dengan kapasitas produksi 3 ton per jam dengan kemampuan produksi selama 18 jam per hari baru bisa memenuhi 15% dari total *capital flight* sehingga sangat terbuka peluang untuk pembangunan pabrik pakan di NTT. Untuk itu pemerintah NTT membuka peluang besar bagi sektor swasta untuk melakukan investasi di industri pakan. Dalam rangka mendukung industri pakan pemerintah NTT telah memulai berbagai program penyediaan input seperti: Program TJPS untuk penyediaan jagung, Peningkatan produksi daun kelor (*Moringa Oleifera*), menjajaki pembuatan pabrik tepung ikan dan tepung tulang, menjajaki kemungkinan pemanfaatan belalang sebagai sumber protein hewani, penjajakan pemanfaatan bungkil kelapa, penjajakan pemanfaatan biji asam (*Tamarindus Indica*), penjajakan putak sebagai sumber pakan dengan potensi pengembangan di kabupaten Kupang Kecamatan Amfoang Selatan.



Sejauh ini pertumbuhan Industri pakan secara Nasional lebih terfokus di Provinsi Jawa Timur. Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai provinsi kepulauan mempunyai potensi sumber daya yang memungkinkan untuk pengembangan industri pakan unggas dan babi. Berbagai upaya terus dilakukan untuk industri pakan di NTT dengan melibatkan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dan swasta. Hasil kajian Prisma (2019), sesuai sumber daya yang ada sangat berpotensi untuk membangun pabrik pakan di Kabupaten Kupang, Sumba Tengah dan Manggarai Timur. Tahun 2021-2023 Pemerintah Provinsi NTT dibawah tanggung jawab OPD Dinas Peternakan telah menganggarkan untuk dibangun pabrik pakan di Kabupaten Kupang.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pendirian pabrik pakan yakni: Pembangunan pabrik pakan di kabupaten Kupang Tahun 2021-2022, DED pabrik pakan di kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Timur Tahun 2022, pembangunan pabrik pakan di kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Timur tahun 2023.

3.6.4. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Peningkatan Vaksinasi, Pengobatan dan Optimalisasi Puskesmas

Penanggulangan penyakit hewan menular strategis di NTT sangat penting dan perlu dilakukan secara massif. Jenis penyakit hewan menular strategis yang mengancam dan perlu penanganan yang lebih intensif dan serius antara lain penyakit brucellosis pada ternak sapi, ASF pada ternak babi dan AI pada ternak unggas. Upaya terobosan perlu dilakukan dan dikembangkan untuk memperoleh daerah atau wilayah dengan zona bebas dari penyakit hewan menular strategis tertentu sehingga dapat memberi nilai tambah pada ternak.

Vaksinasi adalah tindakan memasukan vaksin ke tubuh hewan sehat untuk memancing munculnya antibody agar hewan memiliki kekebalan terhadap penyakit tertentu sesuai jenis vaksin yang disuntikan. Vaksinasi massal perlu dilakukan untuk memberikan kekebalan pada suatu kelompok ternak pada suatu luasan wilayah tertentu. Hal ini dapat tercapai apabila cakupan vaksinasi mencapai



minimal 70% populasi hewan beresiko. Apabila syarat minimal ini tidak terpenuhi, maka sangat sulit untuk mencegah terjadinya kasus penyakit hewan pada ternak/ hewan setiap tahun.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk peningkatan vaksinasi, pengobatan dan optimalisasi puskesmas yakni: Pengadaan vaksin ternak 80% dari populasi, pengobatan ternak 20% dari populasi, pembangunan puskesmas, Revitalisasi puskesmas, peningkatan kuantitas dan kualitas petugas medik veteriner (dokter hewan) dan paramedik veteriner (D3 Kesehatan Hewan).

3.6.5. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Pemberantasan penyakit hewan

Kesehatan Hewan adalah segala urusan yang berkaitan dengan perlindungan sumber daya Hewan, kesehatan masyarakat, dan lingkungan serta penjaminan keamanan Produk Hewan, Kesejahteraan Hewan, dan peningkatan akses pasar untuk mendukung kedaulatan, kemandirian, dan ketahanan pangan asal Hewan. Penyakit hewan stretegia menular (PHMS) masih menjadi masalah klasik dalam pengembangan peternakan di NTT.

Pada hakikatnya upaya kesehatan hewan merupakan tanggung jawab bersama. Munculnya berbagai penyakit hewan di Indonesia menunjukkan bahwa banyak hal yang harus dibenahi dalam sistem kesehatan hewan di Indonesia. Berbagai hal tersebut adalah pengembangan kelembagaan, sumber daya manusia, perkembangan metode diagnosa, pengendalian penyakit, sistem informasi pelaporan penyakit dan sebagainya. Berbagai upaya terus dilakukan untuk pemberantasan penyakit hewan dengan melibatkan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, Karantina, aparat penegak, RPH, swasta, NGO dan masyarakat.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk pemberantasan penyakit hewan yakni: Pembebasan Brucellosis di Pulau Semau dan pulau Timor Tahun 2023, kompartemen bebas AI di Timor barat Tahun 2021, pembebasan AI di pulau Timor Tahun 2024.

3.6.6. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Peningkatan Penyediaan Pangan Asal Hewan yang ASUH

NKV (Nomor Kontrol Veteriner) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene-sanitasi sebagai kelayakan dasar jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.

Tujuan dilakukannya sertifikasi NKV yaitu: 1) Terlaksananya tertib hukum dan tertib administrasi dalam pengelolaan usaha produk pangan asal hewan. 2) Memastikan bahwa unit usaha telah memenuhi persyaratan higiene-sanitasi dan menerapkan cara produksi yang baik, 3) Mempermudah penelusuran kembali apabila terjadi kasus keracunan pangan asal hewan.

Kementerian Pertanian RI (Kementan RI) melalui Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan (Ditjen PKH) mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 11 Tahun 2020 mengenai Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) untuk unit usaha produk hewan yang telah diundangkan pada tanggal 20 Maret 2020. Permentan ini merupakan pengganti dari Permentan No. 381 Tahun 2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan.

Permentan No. 11 Tahun 2020 ini dikeluarkan, untuk melengkapi pengaturan tentang sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner produk hewan pada Permentan 381 tahun 2005 yang masih mengacu kepada Undang-undang Nomor 6 tahun 1967 tentang Peternakan dan kesehatan Hewan. Dalam perkembangannya telah terjadi perubahan menjadi Undang-undang nomor 18 tahun 2009 dan nomor 41 tahun 2014 serta adanya pengaturan pada Peraturan Pemerintah Nomor 95 tahun 2005 tentang Kesehatan Masyarakat veteriner dan Kesrawan. Beberapa perubahan di Permentan 11 tahun 2020 antara lain: penandatanganan NKV dilakukan oleh Pejabat Otoritas Veteriner, penambahan jenis unit usaha produk hewan baik pangan maupun non pangan menjadi 21 jenis, persyaratan dan pengangkatan auditor NKV oleh Gubernur, serta adanya

pengaturan sanksi terhadap pelaku unit usaha produk hewan yang tidak mengajukan permohonan NKV dan yang tidak memenuhi persyaratan.

Sertifikasi NKV unit usaha produk hewan merupakan kewenangan yang dilimpahkan ke Propinsi dan Pusat bertindak sebagai Pembina dan pengawas terhadap pelaksanaan sertifikasi. Pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi NKV mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas Provinsi dengan melampirkan persyaratan yang dibutuhkan secara daring. Apabila persyaratan dinyatakan lengkap, Dinas meneruskan permohonan kepada Pejabat Otoritas Veteriner (POV) Propinsi untuk ditindaklanjuti dengan menurunkan Tim Auditor NKV berdasarkan penugasan dari kepala Dinas Provinsi.

Selanjutnya apabila dalam proses audit ditemukan ketidaksesuaian, maka pelaku usaha diberi waktu untuk melakukan perbaikan. Tahap selanjutnya, Pejabat Otoritas Veteriner melakukan analisis, berdasarkan hasil perbaikan terhadap temuan tersebut dan jika dinilai memenuhi syarat, akan diterbitkan Nomor Kontrol Veteriner yang disampaikan kepada pelaku usaha melalui Dinas. Apabila ternyata tidak memenuhi syarat, hasil tersebut juga disampaikan kepada pelaku usaha dengan menyampaikan melalui daring dan unit usaha akan dilakukan pembinaan oleh dinas kabupaten/kota maksimal selama 5 tahun.

Unit usaha yang tidak mengajukan permohonan sertifikasi NKV atau unit usaha yang masih tidak memenuhi persyaratan setelah dibina selama 5 tahun akan dikenakan sanksi administrasi secara bertahap berupa Peringatan Tertulis I, II dan bila masih tidak mematuhi akan dilakukan Penghentian sementara dari kegiatan produksi sampai kepada pencabutan izin usaha.

Adapun jenis unit usaha yang harus memiliki sertifikat NKV yaitu, rumah potong hewan (RPH) yang terdiri dari RPH ruminansia, babi dan unggas, unit usaha budidaya berupa sapi perah dan unggas



petelur serta unit usaha pengolahan produk pangan asal hewan seperti susu, daging telur dan madu. Selain itu, unit usaha pengolahan hewan non pangan, unit usaha distribusi seperti penampung susu, kios daging, ritel, gudang kering, pelabelan telur konsumsi, serta pengumpulan dan pengemasan telur konsumsi juga wajib memiliki sertifikat NKV. Unit usaha sarang burung walet, baik rumah, pencucian, pengumpulan atau pengolahan. juga diwajibkan memiliki sertifikat NKV.

Untuk menjamin keamanan produk Pangan Asal Hewan (PAH) yang beredar di masyarakat, pemerintah telah mewajibkan setiap pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk hewan untuk memiliki sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) demi terwujudnya kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi pangan asal hewan

NKV ini juga sebagai bukti ikut sertanya pemerintah memberikan jaminan keamanan dan kualitas untuk produk yang akan digunakan dan dikonsumsi oleh masyarakat. Sertifikat NKV adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah, telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan. Penerapan persyaratan NKV ini akan dilaksanakan secara bertahap melalui proses pembinaan yang dilakukan bersama oleh Pusat, Propinsi dan kabupaten/Kota.

Kegiatan yang dapat dilakukan untuk Peningkatan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH yakni: Pembangunan RPH/RPU Terstandar di Kab/Kota se NTT, pembinaan unit-unit usaha produk asal ternak: Unit penyimpanan, unit pengolahan, unit penjualan dan sertifikasi NKV.



TABEL 12
TUJUAN, STRATEGI, KEBIJAKAN, PROGRAM, INDIKATOR KINERJA DAN PROYEKSI OUTCOME
PENGEMBANGAN PETERNAKAN PROVINSI NTT TAHUN 2021-2028

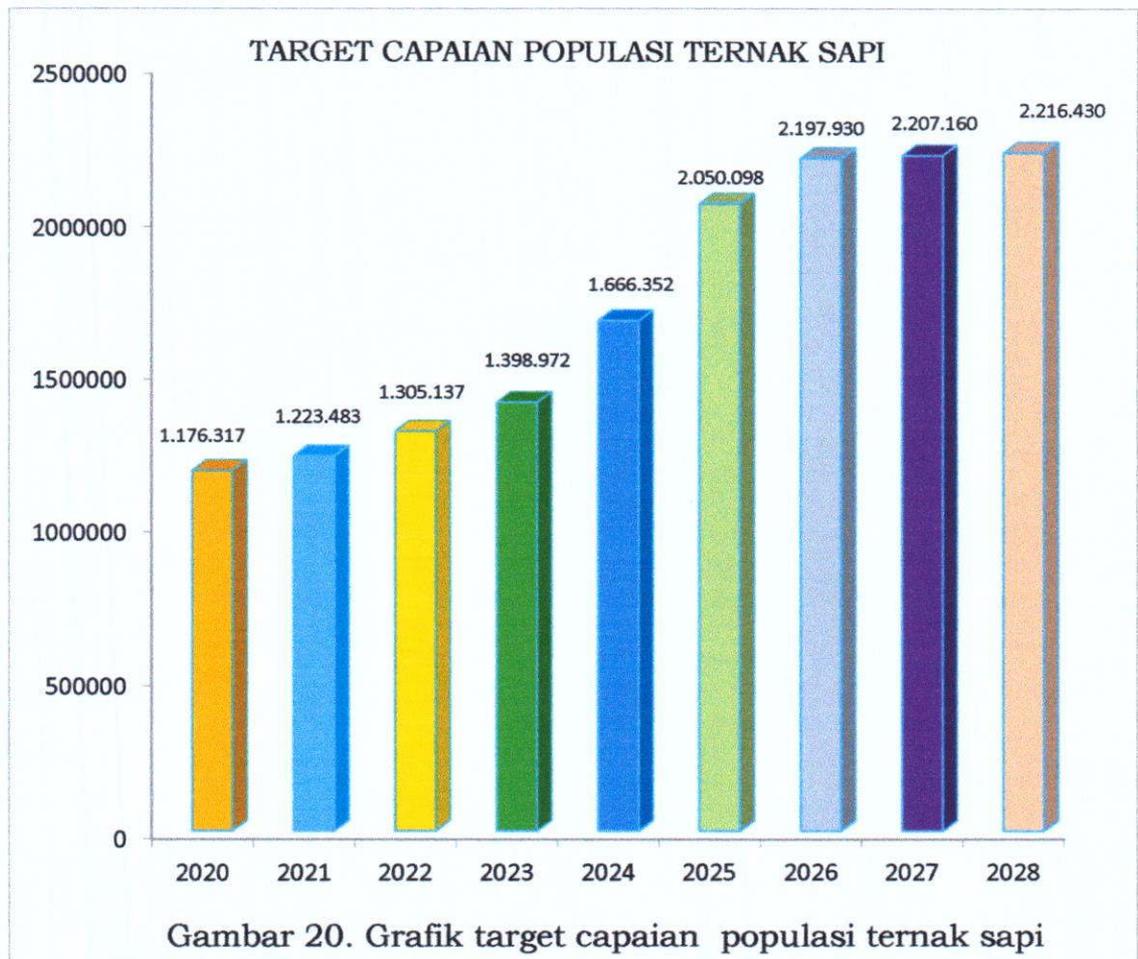
Tujuan	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Proyeksi Outcome
<p>1. Meningkatkan kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB.</p> <p>1.1. Meningkatkan populasi ternak: a. sapi. b. babi. c. unggas.</p>	<p>1.1.1. Peningkatan produksi ternak sapi bali</p> <p>1.1.2. Peningkatan produksi ternak sapi sumba ongole.</p> <p>1.1.3. Peningkatan produksi ternak sapi persilangan wayu.</p> <p>1.1.4. Peningkatan produksi ternak babi</p> <p>1.1.5. Peningkatan produksi ternak unggas</p>	<p>1.1. Pembibitan ternak sapi bali, sapi sumba ongole dan sapi persilangan wayu di Instalasi milik pemerintah kelompok pembibitan milik masyarakat berbasis desa.</p> <p>1.2. Pembibitan ternak babi di Instalasi milik pemerintah dan kelompok masyarakat</p> <p>1.3. Pembibitan ternak Ayam KUB di Instalasi milik pemerintah dan kelompok masyarakat</p>	<p>1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui Kapitalisasi dan Optimalisasi instalasi peternakan pemerintah.</p> <p>2. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui Peningkatan jumlah dan mutu genetik sapi</p>	<p>1.1. Peningkatan populasi ternak :</p> <p>a. Sapi 7,2% (1 398 972 ekor) di tahun 2023 dan 2.216.430 ekor tahun 2028)</p> <p>b. Babi 11,8% (3 550 524 ekor) di tahun 2023 dan 4.182.570 ekor di tahun 2025)</p> <p>c. Ayam Buras 6,2% (11.588.772 Ekor di tahun 2023 dan 147.684.344 ekor di tahun 2028).</p>	<p>1.1. Peningkatan sumbangan PDRB sektor peternakan 10,48% (Rp. 11.634,04 Milyar) Tahun 2023. Tahun 2020 sebesar 9,89% (10.530,458 dari total 106.506,13 Milyar)</p> <p>1.2. Meningkatnya sumbangan Pendapatan Asli Daerah sektor peternakan Rp 18,5 Milyar di Tahun 2023. (Tahun 2020 PAD sebesar 4.8 Milyar)</p> <p>1.3. Meningkatnya pendapatan masyarakat petani peternak perbulan:</p>

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Proyeksi Outcome
					a. Ayam Rp. 3.000.000 b. babi Rp. 3.150.000 c. Sapi Rp. 3.000.000
1.2. Meningkatkan prasarana ternak yang memenuhi standar.	1.2.1. Pengembangan industri pakan babi, unggas dan prasarana peternakan. 1.2.2. Penumbuhan dan penguatan kelompok peternak.	1.2.1. Modernisasi peternakan. 1.2.2. Korporasi peternakan.	Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian melalui Pengembangan pabrik pakan	1.2. Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar 100% di tahun 5	
1.3. Meningkatkan ternak sehat dari populasi	Peningkatan keswan dan kesmavet.	Pengendalian penyakit hewan.	1. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Peningkatan vaksinasi, pengobatan dan optimalisasi puskesmas 2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui	1.3. Persentase ternak yang sehat 80% di tahun 2028.	

Tujuan	Strategi	Kebijakan	Program	Indikator Kinerja	Proyeksi Outcome
			Pemberantasan penyakit hewan		
2. Meningkatkan jumlah unit usaha pangan asal ternak	Pembinaan unit-unit usaha produk asal ternak yang memenuhi standar dan bersertifikat NKV.	Peningkatan unit-unit usaha produk asal ternak yang memenuhi standar.	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Peningkatan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH	Jumlah unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar sebanyak 77 unit di tahun 2023 dan 187 unit di tahun 2028	2.1. Konsumsi daging asal ternak yang ASUH bagi masyarakat 4 kg /kapita/tahun 2.2. Konsumsi protein asal hewan ternak 12.4 gr/kapita /hari

3.7. Road Map

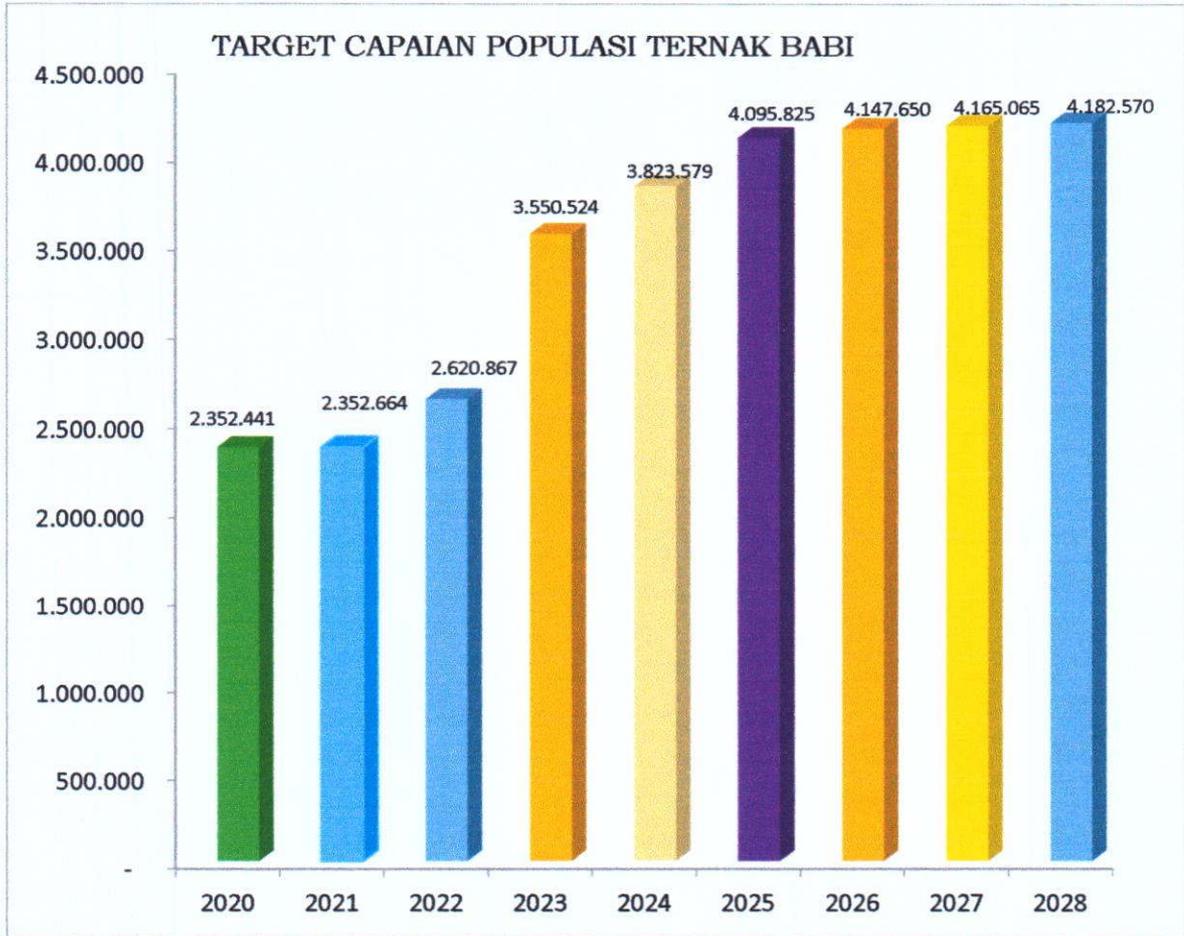
Road map pengembangan peternakan NTT tahun 2021 – 2028 dengan indikator populasi ternak sapi, babi dan ayam buras, persentase prasarana ternak yang memenuhi standar, persentase ternak sehat dan jumlah unit usaha pangan asal tertera pada grafik .



Populasi ternak sapi awal dengan base line tahun 2020 sebanyak 1.176.137 ekor dengan target kinerja tahun 2023 meningkat menjadi 1.398.972 ekor dan target kinerja lanjutan sampai tahun 2028 meningkat menjadi 2.216.430 ekor dengan jumlah rumah tangga peternak 221.643 RT.

Gambar. 21
ROAD MAP PENINGKATAN POPULASI TERNAK SAPI TAHUN 2021 - 2028

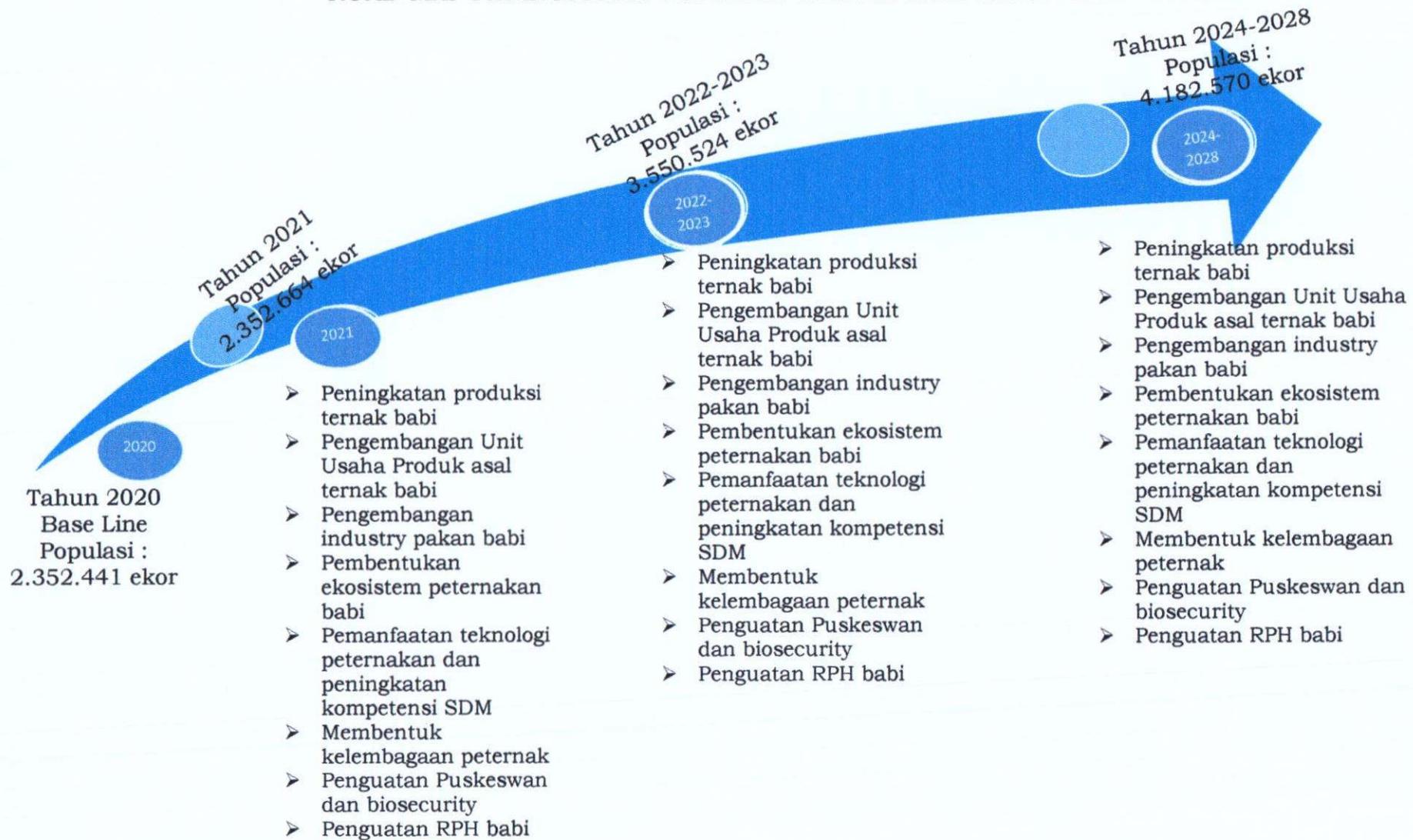


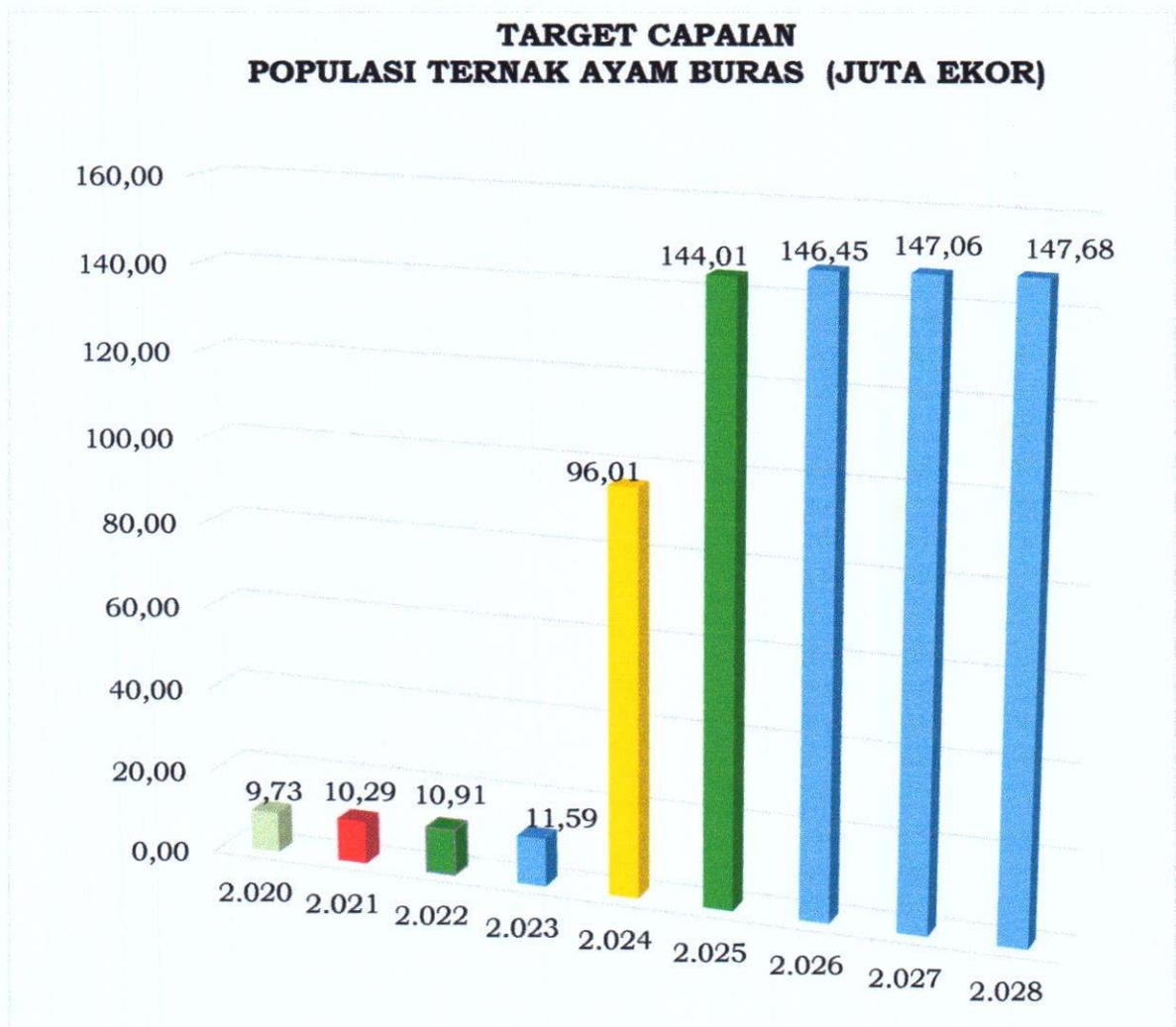


Gambar 22. Grafik target capaian populasi ternak babi

Populasi ternak babi awal dengan base line tahun 2020 sebanyak 2.352.441 ekor dengan target kinerja tahun 2023 meningkat menjadi 3.550.524 ekor dan target lanjutan sampai dengan tahun 2028 sebanyak 4.182.570 ekor

Gambar. 23
ROAD MAP PENINGKATAN POPULASI TERNAK BABI TAHUN 2021 - 2028

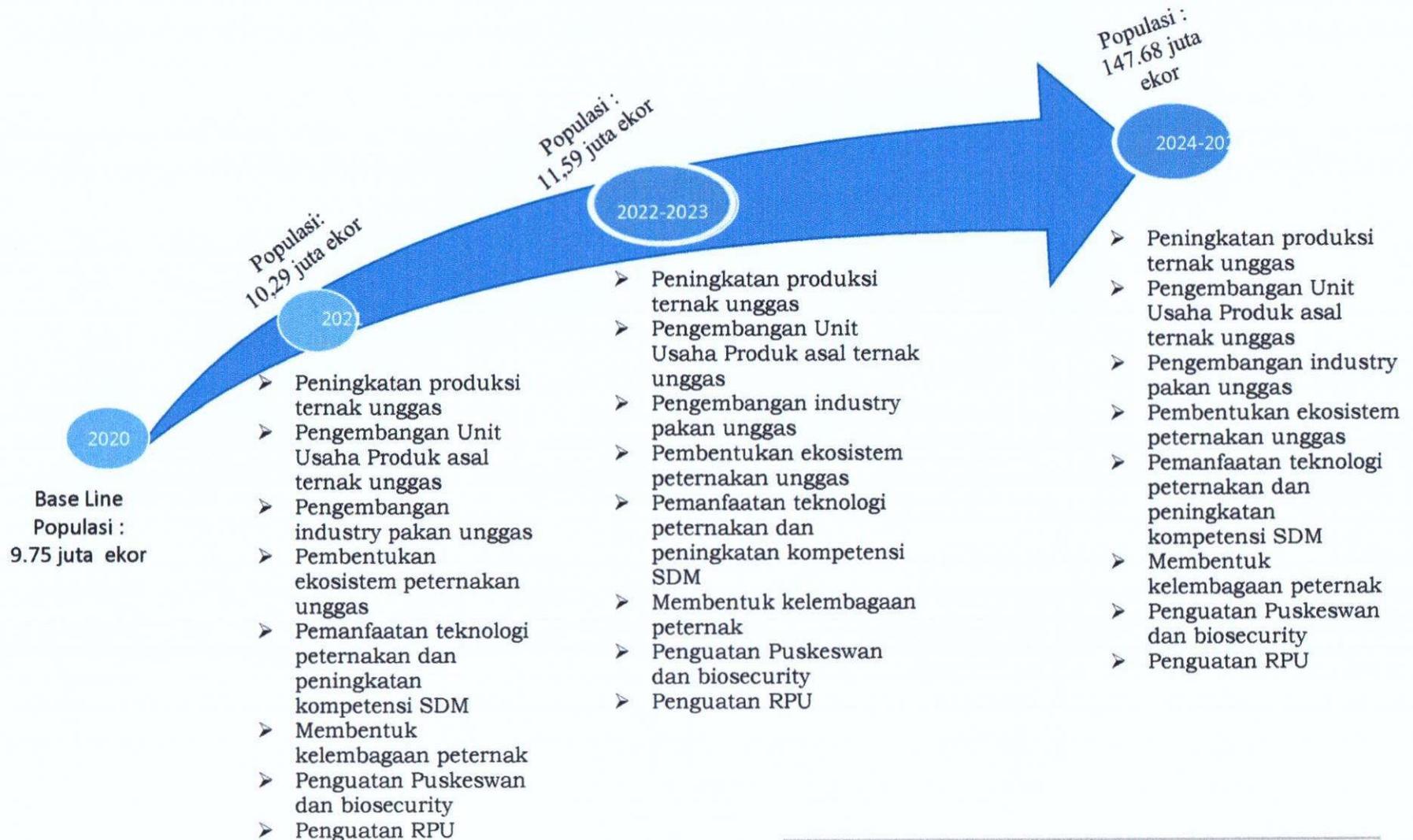




Gambar 24. Grafik target capaian populasi ternak ayam buras

Populasi ternak ayam buras awal dengan base line tahun 2020 sebanyak 9,73 juta ekor dengan target kinerja tahun 2023 meningkat menjadi 11,59 juta ekor dan target kinerja lanjutan sampai tahun 2028 meningkat menjadi 147,68 juta ekor. Untuk pencapaian target populasi pengembangan pembibitan ayam buras lebih difokuskan pada jenis ternak ayam KUB.

Gambar. 25
 ROAD MAP PENINGKATAN POPULASI TERNAK AYAM BURAS
 DENGAN FOKUS PENGEMBANGAN TERNAK AYAM KUB
 TAHUN 2021 - 2028





Gambar 26. Grafik target capaian Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar

Persentase prasarana ternak yang memenuhi standar dengan base line data tahun 2020 adalah sebesar 80% dengan target kinerja tahun 2023 100% dan target lanjutan tahun 2028 juga tetap 100%.



Gambar. 27
 ROAD MAP PENCAPIAN PERSENTASE PRASARANA TERNAK
 YANG MEMENUHI STANDAR
 TAHUN 2021 - 2028



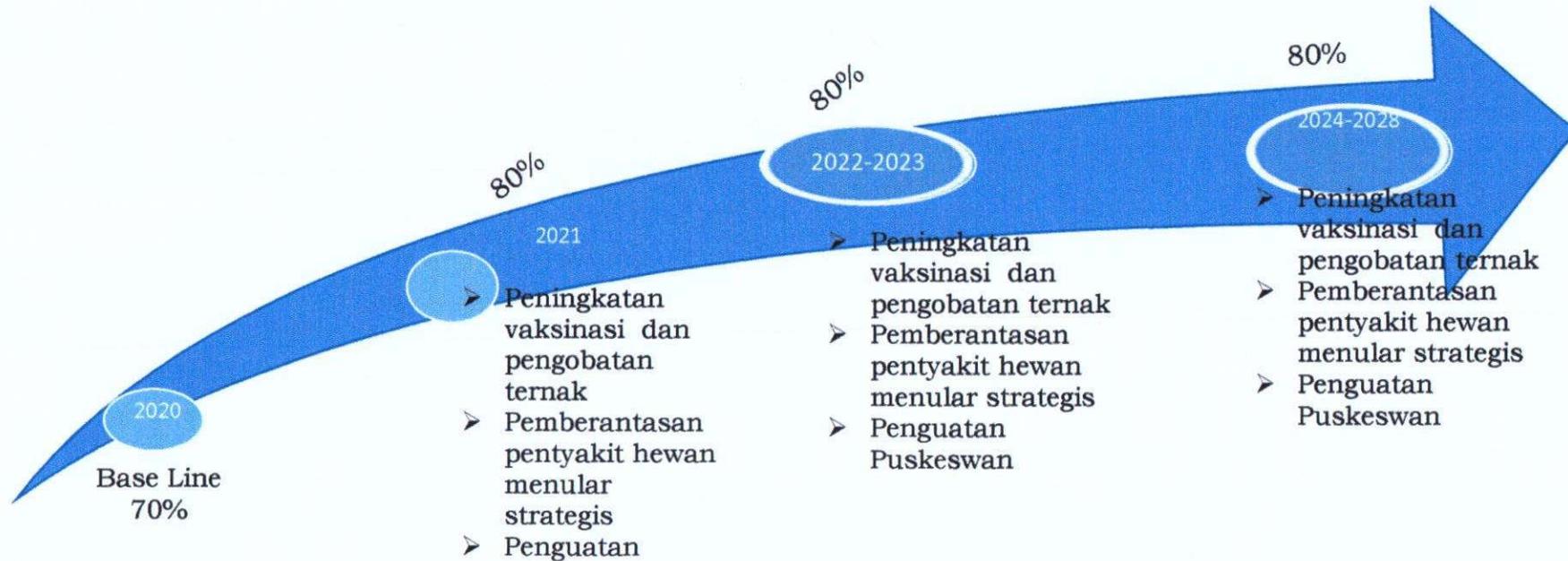


Gambar 28. Grafik target capaian persentase ternak sehat

Persentase ternak sehat dengan base line data tahun 2020 adalah sebesar 70% dengan target kinerja tahun 2023 80% dan target lanjutan tahun 2028 juga tetap 80%.



Gambar. 29
ROAD MAP PENCAPAIAN PERSENTASE TERNAK YANG SEHAT
TAHUN 2021 - 2028



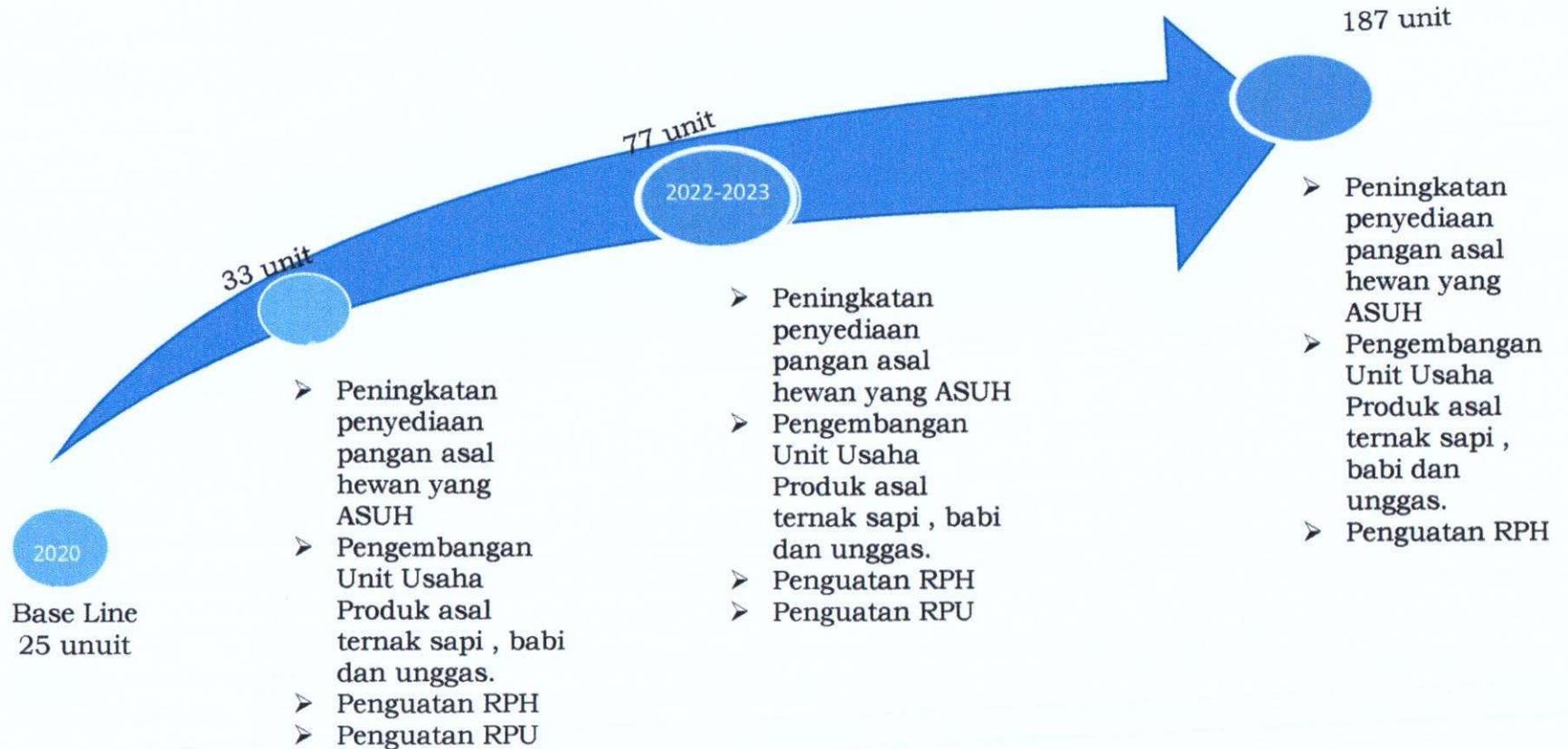


Gambar 30. Target capaian persentase ternak sehat

Jumlah unit usaha pangan asal ternak memenuhi standar dengan base line data tahun 2020 sebanyak 25 unit dengan target kinerja tahun 2023 77 unit dan target lanjutan tahun 2028 menjadi 187 unit.



Gambar. 31
 ROAD MAP PENCAPAIAN JUMLAH UNIT USAHA PANGAN
 ASAL TERNAK YANG MEMENUHI STANDAR
 TAHUN 2021 - 2028



Handwritten signature

TABEL 13
RENCANA AKSI PROGRAM, KEGIATAN STRATEGIS, STAKEHOLDER, PENANGGUNGJAWAB, PERKIRAAN BIAYA
SERTA SUMBER PENDANAAN PENGEMBANGAN TERNAK SAPI, BABI DAN AYAM KUB
TAHUN 2021 -2028

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah															
No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.1	Pembibitan sapi bali di Instalasi Besipae												Dinas Peternakan	98,58	APBD. APBN
	Pembibitan ternak sapi	ekor	52	0	0	500	1.500	0	0	0	0	Masyarakat , sektor swasta	Masyarakat sektor swasta	16,00	Masyarakat , sektor swasta
	Pembuatan pedok di lahan 1.000 Ha	50 Ha/unit			5	15						Dinas peternakan, sektor swasta	Dinas peternakan, sektor swasta	10,00	APBD swasta
	Perencanaan jalan produksi	paket			1							Dinas PUPR	Dinas PUPR	1,40	APBD.
	Pembangunan jalan produksi	Meter			7.000	7.000	7.000	7.000				Dinas PUPR	Dinas PUPR	28,00	APBD.
	Pembuatan kebun HMT di	Ha			75	200	150	100	0	0	0	Dinas LHK,	Dinas LHK,	1,3	APBD APBN

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	lahan seluas 525 Ha											masyarakat , sektor swasta UNDANA	masyarakat , sektor swasta UNDANA		Sektor swasta.
	Pembuatan silase 45.166 ton	ton			281	2.981	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381	Dinas peternakan, masyarakat	Dinas Peternakan	22,59	APBD.
	Pembuatan amoniase jerami padi 45.166 ton	ton			281	2.981	8.381	8.381	8.381	8.381	8.381	Dinas peternakan, masyarakat , dinas pertanian	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian	11,3	APBD APBN.
	Pembangunan embung 3 unit	unit				1	1	1				Dinas PUPR, Sektor swasta	Dinas Peternakan	1,40	APBD. APBN
	Pembangunan bak Tampung Air 4 unit	unit			1	1	1	1				Dinas peternakan, Sektor swasta	Dinas Peternakan	0,20	APBD. APBN
	pembelian bibit semen beku 21.000	strow				1.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Dinas peternakan, Ditjen	Dinas Peternakan	0,42	APBD. APBN

I. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	strow											PKH			
	Pelatihan petugas IB, ATR, PKB bagi 252 orang	orang				42	42	42	42	42	42	Dinas Peternakan, BBPP, Ditjen PKH	Dinas Peternakan	2,50	APBD, APBN
	Bimtek Manajemen Peternakan Sapi	orang				40	40	40	40	40	40	Undana, BBPP kupang, Ditjen PKH	Dinas Peternakan	0,60	APBD
	Pelatihan kerja lapangan siswa dan mahasiswa	orang				50	50	50	50	50	50	Dinas Peternakan, Undana	Dinas Peternakan, Undana	0,32	APBD, APBN
	Pembangunan mini ranch di Oeboi Besipae 50 Ha	Unit			1							Sektor swasta	Dinas Peternakan, Sektor swasta	2,00	Sektor swasta
	Penyediaan Mesin Chopper ST-50 kapasitas 9 – 12 Ton per jam 2 unit	unit				1	1					Kementan, Dinas peternakan, Dinas Perindag	Dinas Peternakan, Dinas Perindag	0,4	APBD, APBN



I. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Mesin Baller besar	unit				1						Kementan, Dinas peternakan	Dinas Peternakan	0,15	APBD, APBN
1.2.	Pembibitan sapi bali di instalasi Lili												Dinas Peternakan		APBD, APBN
	Pengolahan lahan HMT 30 Ha	Ha				5	5	5	5	5	5	Dinas peternakan, masyarakat, PT,	Dinas Peternakan	0,075	APBD, APBN
	Penyediaan dan penanaman anakan lamtoro terambah 30 Ha	Anakan				25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	1,5	APBD, APBN
	Penyediaan dan penanaman rumput odot 30 Ha	2 Stek/ko ker				50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	3,0	APBD, APBN
	Pembibitan ternak sapi bali 600 ekor	Anakan					120	120	120	120	120	Dinas peternakan, PT.	Dinas Peternakan	4.8	APBD, APBN
	Pembuatan	Ton				630	630	630	630	630	630	Dinas	Dinas	1,89	APBD,

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	silase rumput/leguminosa 3.780 ton											peternakan, masyarakat, PT, dinas pertanian	Peternakan		APBN
	Pembuatan amoniase jerami padi 3.780 ton	Ton				100	100	100	100	100	100	Dinas peternakan, masyarakat, PT, dinas pertanian	Dinas Peternakan	0,945	APBD, APBN
	Pembangunan pagar tembok 10.000 meter	Meter				5.000	5.000					Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	5,00	APBD, APBN
	Pelatihan petugas IB, ATR, PKB	orang				2	2	2	1	1	1	Dinas peternakan, Ditjen PKH	Dinas Peternakan	0,06	APBD, APBN
	Pelatihan petugas medis dan para medis	orang				2	2	2	1	1	1	Dinas peternakan, Ditjen PKH	Dinas Peternakan	0,06	APBD, APBN
	Pelatihan kerja lapangan siswa dan mahasiswa	orang			10	10	10	10	10	10	10	Dinas Peternakan, PT	Dinas Peternakan, PT	0,08	APBD, APBN
	Bangunan	unit				1	2						Dinas	0,30	APBD



I. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan	
				TARGET												
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	pengolahan limbah												Peternakan			
	Kandang Beranak	unit				1	1	1					Dinas peternakan	Dinas Peternakan	1,50	APBD, APBN
	Kandang Pedet	unit				1	1	1					Dinas peternakan	Dinas Peternakan	0,45	APBD, APBN
	Penyediaan Mesin Chopper ST-50 kapasitas 9 – 12 Ton per jam 2 unit	unit				1							Kementan, Dinas peternakan, Perindag	Dinas Peternakan	0,075	APBD, APBN
	Penyediaan Mesin Baller bszr	unit				1							Kementan, Dinas peternakan	Dinas Peternakan	0,15	APBD, APBN
1.3.	Pembibitan ternak sapi bali di instalasi Boawae													Dinas Peternakan		APBD, APBN
	Pengelolaan kebun HMT 10 Ha	Ha				10	10	10	10	10	10		UPT, Kelompok Tani Penggaduh, PT, SMK	Dinas Peternakan	0,30	APBD, APBN



1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Boawae			
	Penanaman & pemeliharaan anakan lamtoro ditambah 50.000 anakan	Anakan				50.000						UPT, Kelompok Tani Penggaduh, PT, SMK Boawae	Dinas Peternakan	0,20	APBD, APBN
	Pembelian benih sorgum	Kg				5	5	5	5	5	5	UPT, Kelompok Tani Penggaduh, PT, SMK Boawae	Dinas Peternakan	0,001	APBD, APBN
	Pembibitan sapi bali 240 ekor	ekor					240					Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	2,12	APBD, APBN
	Pelatihan petugas IB, PKB, ATR	orang				1	1	1	1	1	1	BPPTP (Ditjen PKH), Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,04	APBD, APBN
	Bimtek Manajemen Peternakan	orang				60	60	60	60	60	60	UNDANA, Politeknik Wilhelmus, SMK	Dinas Peternakan	2,40	UNDANA, Politeknik Wilhelmus, SMK



1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sapi											Boawae, UPT,			Boawae APBD, APBN
	Pembangunan kandang kelompok	unit				1	1	1				UPT, Kelompok Tani Penggaduh, PT, SMK Boawae	Dinas Peternakan	1,50	APBD, APBN
	Penyediaan Mesin Chopper ST-50 kapasitas 9 – 12 Ton per jam 2 unit	unit				1						Kementan, Dinas peternakan	Dinas Peternakan	0,075	APBD, APBN
1.4.	Pembibitan sapi sumba ongole di Instalasi Kondamaloba												Dinas Peternakan Provisi		APBD, APBN, Sektor swasta, KUR
	Pembuatan kebun HMT 100 Ha	Ha				50	50					Dinas Peternakan, Kelompok Tani Penggaduh,	Dinas Peternakan	0,20	APBD, APBN

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pembibitan, Penanaman & pemeliharaan lamtoro	Anakan				250.00 0	250.00 0					Dinas Peternakan, Kelompok Tani Penggaduh,	Dinas Peternakan	0,20	APBD, APBN
	Pembuatan pedok di lahan 300 Ha	75 Ha/unit				4						Dinas Peternakan Prov	Dinas Peternakan	15,0	
	Pembuatan silase 9.450 ton	Ton				1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	1.575	Dinas Peternakan, Kelompok Tani Penggaduh,	Dinas Peternakan	4,725	APBD, APBN
	Penyediaan sapi Sumba Ongole	ekor					300					Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	9,90	APBD, APBN
	Pelatihan petugas IB, PKB, ATR	orang				1	1	1	1	1	1	BBPP (Ditjen PKH), Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,04	APBD, APBN
	Praktek kerja lapangan mahasiswa dan	orang			60	60	60	60	60	60	60	Dinas Peternakan, Perguruan	Dinas Peternakan	2,40	APBD, APBN

I. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	siswa											Tinggi			
	Pembangunan kandang kelompok	unit				3						Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	1,50	APBD, APBN
	Penyediaan Mesin Chopper ST-50 kapasitas 9 – 12 Ton per jam 2 unit	unit				1						Kementan, Dinas peternakan	Dinas Peternakan	0,075	APBD, APBN
1.5.	Pembibitan sapi Wagyu di Instalasi Kabar												Dinas Peternakan, Sektor swasta		APBD, Sektor swasta,
	Penyediaan pakan konsentrat ruminansia	Kg			173.930	173.930	173.930	173.930	173.930	173.930	173.930	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan,	3,13	APBD,
	Penyediaan benih HMT (legume)	Kg			235							Dinas Peternakan, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Sektor swasta	0,014	APBD, Sektor swasta

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan benih HMT (Rumput)	pols			500							Dinas Peternakan, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Sektor swasta	0,007	APBD, Sektor swasta
	Penyediaan ternak sapi wagyu	ekor				100						Kementan	Dinas Peternakan.	3,50	Sektor swasta, APBN
	Penyediaan mesin press pakan	unit	-	-	1	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,02	APBD
	Penyediaan pompa mobile	unit	-	-	2	-	-	-	-	-	-	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,30	APBD
	Penyediaan traktor roda 4	unit			1							Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,54	APBD
	Penyediaan mesin choper	unit				2						Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,03	APBD
	Pembangunan jaringan irigasi	paket			1							Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	1,20	APBD
	Pembangunan reservoir	paket			1							Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	1,60	APBD
	Pembangunan instalasi biogas	paket				1						Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,035	APBD

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
1.6.	Pembibitan sapi bali di kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu, Malaka, Rote Ndao, Lembata, Ngada dan Nagekeo														APBD, APBN, Sektor swasta, Masyarakat
	Pengolahan kebun HMT 494.250 Ha	Ha				82.375 per tahun					Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta	1.434,370	APBD, APBN, Sektor swasta, Masyarakat	
	Penyediaan & penanaman benih lamtoro 1.974.000.000 anakan	anakan				329.500.000					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga	12.749,96	APBD, APBN, Sektor swasta, Masyarakat	
						Kabupaten Kupang: 24.552, TTS: 18.141, TTU: 11.802, Belu: 6.288, Malaka: 7.001, Rote Ndao: 7.043, Lembata: 435, Nagekeo: 2.538 dan Ngada: 4.575									
						Kabupaten Kupang: 98.209.112, TTS: 72.563.900, TTU: 47.209.561, Belu: 25.151.211, Malaka: 28.003.289, Rote Ndao: 28.171.211, Lembata: 1.740.057, Nagekeo: 10.152.928, dan Ngada:									

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						1.298.070						perbankan Sektor swasta	perbankan Sektor swasta		
	Pembuatan silase 308.250 ton	Ton				51.375 per tahun Kabupaten Kupang: 8.738, , TTS: 10.429, TTU: 5.637, Belu: 8.456, , Malaka: 9.020, Rote Ndao: 2.613, Lembata: 933, Nagekeo: 2.737, dan Ngada: 2.813						Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kot Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta a	153,00	APBD. APBN, Sektor swasta, Masyarakat
	Pembuatan amoniase 308.250 ton	Ton				51.375 per tahun Kabupaten Kupang: 2.380, , TTS: 1.760, TTU: 1.150, Belu: 610, , Malaka: 680, Rote Ndao: 680, Lembata: 50, Nagekeo: 250, dan Ngada: 440						Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga perbankan	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Lembaga perbankan	153,30	APBD. APBN, Sektor swasta, Masyarakat

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
												Sektor swasta	Sektor swasta		
	Pembibitan Bibit sapi bali di masyarakat introduksi pemerintah 48.000 ekor	ekor			240	8.000 per tahun Kabupaten Kupang: 11.015, , TTS: 5.608, TTU: 7.402, Belu: 3.917, , Malaka: 5.259, Rote Ndao: 10.261, Lembata: 36, Nagekeo: 3.760, dan Ngada: 4.117					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta	192,00	APBD, APBN, Sektor swasta, Masyarakat	
	Pelaksanaan IB pada sapi bali 48.000 dosis	ekor				8.000 per tahun Kabupaten Kupang: 11.015, , TTS: 5.608, TTU: 7.402, Belu: 3.917, , Malaka: 5.259, Rote Ndao: 10.261, Lembata: 36, Nagekeo: 3.760, dan Ngada: 4.117					Dinas Peternakan Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota	1,20	APBD, APBN, Sektor swasta, Masyarakat	
	Pemeriksaan kebuntingan 48.000 ekor induk	ekor				8.000 per tahun Kabupaten Kupang: 11.015, , TTS: 5.608, TTU: 7.402, Belu: 3.917, , Malaka: 5.259, Rote Ndao: 10.261, Lembata: 36, Nagekeo: 3.760, dan Ngada: 4.117					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota	1,20	APBD, APBN,	
	Pembangunan mini ranch	unit			1 unit di	9 per tahun Kabupaten Kupang: 1, , TTS: 1, TTU: 1, Belu: 1, ,					Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	275	APBD, Sektor	

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pengembangan sapi bali 55 unit				Instalasi Besipae	Malaka: 1, Rote Ndao: 1, Lembata:1, Nagekeo: 1, dan Ngada: 1					Provisi, Kab/ Kota, sektor swasta	Provisi, Kab/ Kota, sektor swasta		swasta	
	Pelatihan pendamping kepada (TLL dan Mahasiswa)	orang			283 per tahun Kabupaten Kupang: 49, , TTS: 65, TTU: 49, Belu: 25, , Malaka: 25, Rote Ndao: 17, Lembata:19, Nagekeo: 15, dan Ngada: 19					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota	2,788	APBD. APBN,		
	Pembuatan embung 70 unit	unit			16	9 per tahun Kabupaten Kupang: 1, , TTS: 1, TTU: 1, Belu: 1, , Malaka: 1, Rote Ndao: 1, Lembata:1, Nagekeo: 1, dan Ngada: 1					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Dinas PUPR	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota, Dinas PUPR	14,00	APBD. APBN,	
	Penyediaan Eksavator untuk mobilisasi pengolahan lahan HMT Masyarakat 6 unit	Unit			-	6 Daratan Timor (Kab' Kupang, TTS, TTU, Belu, malaka): 3, Daratan Fkores (Ngada, nagekeo): 1, Lembata: 1, Rote Ndao: 1					Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Pro/Kab/ Kota, kementan	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Pro/Kab/ Kota, kementan	1,25	APBD. APBN,	
	Penyediaan Tractor roda 4	Unit			-	6 Daratan Timor (Kab' Kupang, TTS, TTU, Belu,					Dinas Peternakan,	Dinas Peternakan	8,00	APBD. APBN,	

I. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	150 PK 6 unit					malaka): 3, Daratan Fkores (Ngada, nagekeo): 1, Lembata: 1, Rote Ndao: 1					Dinas Pertanian, Pro/Kab/ Kota, kementan	Provisi dan Kab/Kota, Dinas Pertanian, kementan			
	Penyediaan Chooper mobile 6 unit	Unit				6 Daratan Timor (Kab: Kupang, TTS, TTU, Belu, malaka): 3, Daratan Fkores (Ngada, nagekeo): 1, Lembata: 1, Rote Ndao: 1					Dinas Peternakan Prov dan /Kab/ Kota, kementan	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota, kementan Masyarakat	3,00	APBD. APBN	
	Penyediaan chopper mini 137 unit	Unit				137 Kabupaten Kupang: 24, , TTS: 32, TTU: 24, Belu: 12, , Malaka: 12, Rote Ndao: 8, Lembata: 9, Nagekeo: 7 dan Ngada: 9					Dinas Peternakan Prov dan /Kab/ Kota, kementan, masyarakat	Dinas Peternakan Prov dan /Kab/ Kota, kementan, masyarakat	1.37	APBD. APBN Masyarakat	
	Penyediaan Mesin baler silase mobile 6 unit	Unit				6 Daratan Timor (Kab: Kupang, TTS, TTU, Belu, malaka): 3, Daratan Fkores (Ngada, nagekeo): 1, Lembata: 1, Rote Ndao: 1					Dinas Peternakan, Pro/Kab/ Kota	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota	6,00	APBD. APBN,	
	Penyediaan Mesin baler					54					Dinas Peternakan,	Dinas Peternakan	6,00	APBD. APBN,	

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	silase kecil 54 unit					Kabupaten Kupang: 6 , TTS: 6, TTU: 6, Belu: 6, Malaka: 6, Rote Ndao: 6, Lembata: 6, Nagekeo: 6 dan Ngada: 6					Pro/Kab/Kota, Masyarakat	Provisi dan Kab/Kota, Masyarakat		Masyarakat	
	Penyediaan Mesin pengolah pupuk organic 54 unit	Unit				54 Kabupaten Kupang: 6 , TTS: 6, TTU: 6, Belu: 6, Malaka: 6, Rote Ndao: 6, Lembata: 6, Nagekeo: 6 dan Ngada: 6					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota	2,00	APBD. APBN, Masyarakat	
	Timbangan ternak elektrik di Pasar Ternak 9 unit	Unit				9 Kabupaten Kupang: 1, , TTS: 1, TTU: 1, Belu: 1, , Malaka: 1, Rote Ndao: 1, Lembata:1, Nagekeo: 1 dan Ngada: 1					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota,	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota	0,20	APBD. APBN,	
	Drum penampungan silase 256.875 buah	Buah				256.875 Kabupaten Kupang: 43.689, , TTS: 52.144, TTU: 28.186, Belu: 42.279, Malaka: 45.098, Rote Ndao: 13.064, Lembata:4.665, Nagekeo: 13.684 dan Ngada: 14.065.					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota	30,66	APBD. APBN, Masyarakat	
1.7.	Pembibitan sapi sumba ongole di Kabupaten Sumba Timur, Sumba Tengah,												Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota		APBD. APBN, Sektor swasta, KUR Masyarakat

I. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sumba Barat Daya dan Rote Ndao														
	Pembuatan kebun HMT 60.000 Ha	Ha			10.000	10.000 per tahun Kabupaten Sumba Timur:7.792, Sumba Tengah:1.273, Sumba Barat:330, Sumba Barat Daya 605:					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Sektor swasta Masyarakat	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota, Sektor swasta masyarakat	180,00	APBD, APBN, Sektor swasta Masyarakat	
	Penyediaan & penanaman benih lamtoro 40 juta anakan	anakan				40.000.000 Kabupaten Sumba Timur: 31.167.613, Sumba Tengah:5.090.177, Sumba Barat:1.323.700, Sumba Barat Daya 2.418.510:					Dinas Peternakan Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota, Sektor swasta masyarakat	1.600,00	APBD, APBN, Sektor swasta Masyarakat	
	Pembuatan silase	Ton				12.600 per tahun Kabupaten Sumba Timur:3.967, Sumba Tengah:1.658, Sumba Barat:362, Sumba Barat Daya 6.612					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Dinas Pertanian, Masyarakat Sektor swasta	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota, Dinas Pertanian, Sektor swasta masyarakat	37,80	APBD, APBN, Sektor swasta Masyarakat	

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pembuatan amoniase	Ton				12.600 per tahun Kabupaten Sumba Timur:3.236, Sumba Tengah:1.885, Sumba Barat:2.378, Sumba Barat Daya 2.101						Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Dinas Pertanian, Masyarakat Sektor swasta	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota, Dinas Pertanian, Sektor swasta masyarakat	37,80	APBD, APBN, Sektor swasta Masyarakat
	Pembibitan sapi sumba ongole untuk diserahkan ke masyarakat	ekor				2.000 per tahun Kabupaten Sumba Timur:1.272, Sumba Tengah:208, Sumba Barat:54, Sumba Barat Daya 99, Rote Ndao: 367						Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Lembaga perbankan Sektor swasta	48,00	APBD, APBN, Sektor swasta Masyarakat
	Pelaksanaan IB pada sapi SO	ekor				2.000 per tahun Kabupaten Sumba Timur:1.272, Sumba Tengah:208, Sumba Barat:54, Sumba Barat Daya 99, Rote Ndao: 367						Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Sektor swasta	0,30	APBD, APBN, Sektor swasta Masyarakat
	Pemeriksaan	ekor				2.000 per tahun						Dinas	Dinas	0,30	APBD,

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	kebuntingan					Kabupaten Sumba Timur:1.272, Sumba Tengah:208, Sumba Barat:54, Sumba Barat Daya 99, Rote Ndao: 367					Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Sektor swasta	Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Masyarakat, Sektor swasta		APBN, Sektor swasta Masyarakat	
	Pelatihan pendamping kepada (TLL dan Mahasiswa)	orang			332	86 per tahun Kabupaten Sumba Timur:45, Sumba Tengah:11, Sumba Barat:13 Sumba Barat Daya 17					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Sektor swasta	2,788	APBD. APBN, Sektor swasta	
	Pengembangan mini ranch	Unit				24 Kabupaten Sumba Timur: 6, Sumba Tengah: 6, Sumba Barat:6, Sumba Barat Daya 6									
	Pembuatan embung	unit			10	4 per tahun Kabupaten Sumba Timur:1, Sumba Tengah:1, Sumba Barat:1 Sumba Barat Daya 1					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Dinas PUPR	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Dinas PUPR	14,00	APBD. APBN	
	Penyediaan Eksavator untuk mobilisasi pengolahan	Unit			-	2 Kabupaten Sumba Timur: 1, Sumba Tengah-Sumba					Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Dinas	Dinas Peternakan Provisi dan Kab/Kota, Dinas	1,25	APBD. APBN,	

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Ilahan HMT Masyarakat					Barat-Sumba Barat Daya: 1						Pertanian,	Pertanian		
	Penyediaan Tractor roda 4	Unit			-	2 Kabupaten Sumba Timur: 1, Sumba Tengah-Sumba Barat-Sumba Barat Daya: 1						Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, PT, Dinas Pertanian, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Dinas Pertanian Prov./Kab/Kota,	8,00	APBD. APBN, Sektor swasta,
	Penyediaan Chooper mobile	Unit			-	2 Kabupaten Sumba Timur: 1, Sumba Tengah-Sumba Barat-Sumba Barat Daya: 1						Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	3,00	APBD. APBN, Sektor swasta, masyarakat
	Penyediaan Chooper mini	unit				49 Kabupaten Sumba Timur: 22, Sumba Tengah: 5, Sumba: Barat: 6, Sumba Barat Daya: 8						Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor	0.49	APBD. APBN, Sektor swasta, masyarakat



1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan	
				TARGET												
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
												swasta	swasta			
	Penyediaan Mesin baler silase mobile	Unit			-			2				Kabupaten Sumba Timur: 1, Sumba Tengah-Sumba Barat-Sumba Barat Daya: 1	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	0.4	APBD, APBN, Sektor swasta, masyarakat
	Penyediaan Mesin baler silase kecil	Unit			-			24				Kabupaten Sumba Timur:6, Sumba Tengah:6, Sumba Barat:6 Sumba Barat Daya 6	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	0.4	APBD, APBN, Sektor swasta, masyarakat
	Penyediaan Mesin pengolah pupuk organik	Unit			-			24				Kabupaten Sumba Timur:6, Sumba Tengah:6, Sumba Barat:6 Sumba Barat Daya 6	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	2,00	APBD, APBN, Sektor swasta, masyarakat
	Timbangan ternak elektrik di pasar ternak	Unit			-			4				Kabupaten Sumba Timur:1, Sumba Tengah:1, Sumba	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota	0,20	APBD, APBN, Sektor

I. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
						Barat:1 Sumba Barat Daya 1						ota, Masyarakat, Sektor swasta	ota, Masyarakat, Sektor swasta		swasta, masyarakat
	Drum penampungan silase	Buah				63.800 Kabupaten Sumba Timur:19.836, Sumba Tengah:8.292, Sumba Barat:1.812, Sumba Barat Daya 33.060						Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan, Pro/Kab/Kota, Masyarakat, Sektor swasta	7,56	APBD. APBN, Sektor swasta, masyarakat
1.8.	Pembibitan sapi persilangan wagyu di Kabupaten Kupang, TTS, TTU, Belu dan Malaka												Dinas Peternakan		APBD. APBN, Sektor swasta, KUR
	Pembuatan kebun HMT	Ha			250	250 per tahun Kabupaten Kupang:91, TTS: 67, TTU: 44, Belu: 23, Malaka: 26,						Dinas Peternakan. PT, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan. PT, Masyarakat, Sektor swasta	4,50	APBD. APBN, Sektor swasta, Masyarakat

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penanaman anakan lamtoro	Anakan			1.000.000	1.000.000 Kabupaten Kupang: 362.211, TTS: 267.628, TTU: 174.117, Belu: 92.762, Malaka: 103.281					Dinas Peternakan. PT, Masyarakat, Sektor swasta	Dinas Peternakan. PT, Masyarakat, Sektor swasta	40,00	APBD. APBN, Sektor swasta, Masyarakat	
	Penyediaan benih/bibit semen beku untuk Pemurnian bibit sapi Wagyu					1030 per tahun Kabupaten Kupang: 373, TTS: 276, TTU: 179, Belu: 96, Malaka: 106					Kementan, Dinas Peternakan, Sektor swasta	Kementan, Dinas Peternakan, Sektor swasta	0,927	APBD. APBN, Sektor swasta	
	Pelaksanaan IB					1030 per tahun Kabupaten Kupang: 373, TTS: 276, TTU: 179, Belu: 96, Malaka: 106					Kementan, Dinas Peternakan. Masyarakat, Sektor swasta	Kementan, Dinas Peternakan. Masyarakat, Sektor swasta	0,154	APBD. APBN, Sektor swasta, Masyarakat	
	Pemeriksaan kebuntingan					1030 per tahun Kabupaten Kupang: 373, TTS: 276, TTU: 179, Belu: 96, Malaka: 106					Dinas Peternakan.	Dinas Peternakan	0,154	APBD. APBN,	
	Pembuatan silase					9.560 Kabupaten Kupang: 1.976, TTS: 2.358, TTU: 1.275,					Dinas Peternakan. PT, Dinas	Dinas Peternakan. PT, Dinas	0,029	APBD. APBN, Sektor	

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan	
				TARGET												
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
						Belu: 1.912, Malaka: 2.039						Pertanian, Masyarakat, Sektor swasta	Pertanian, Masyarakat, Sektor swasta		swasta, Masyarakat	
	Pelatihan pendamping kepada (TLL dan Mahasiswa)					213 per tahun Kabupaten Kupang: 49, TTS: 65, TTU: 49, Belu: 50, Malaka: 50						Kementan, Dinas Peternakan. PT.	Kementan, Dinas Peternakan. PT	1,033	APBD. APBN,	
1.9.	Pembibitan ternak babi di instalasi Tarus												Dinas Peternakan			
	Penyediaan pejantan babi ras	ekor		20			20	20					Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,48	APBD
	Penyediaan induk babi ras	ekor		180			180	180					Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	4,32	APBD
	Penyediaan pakan	Ton			268	280	280	280	280	280	280		Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	21,024	APBD
	Penyediaan Vitamin dan obat-obatan	Paket			1	1	1	1	1	1	1		Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0.40	APBD
	Pembangunan bak	unit				2	2	2					Dinas	Dinas	2,00	APBD

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	penampung											Peternakan	Peternakan		
	Pembangunan sumur bor	unit		1		1						Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,20	APBD
	Jaringan air	unit				1	1	1				Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	1,00	APBD
	Penyuntikan serum konvalesen	Ekor		200	3.800	3.800	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,393	APBD
	Penyutikan vaksin Hog Cholera	ekor		200	3.800	3.800	7.200	11.400	11.400	11.400	11.400	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,393	APBD
1.10.	Pembibitan ternak babi di instalasi Boawae														
	Penyediaan pejantan babi ras	ekor				20			20			Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,48	APBD
	Penyediaan induk babi ras	ekor				180			180			Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	4,32	APBD
	Penyediaan Pakan	Kg			125.925	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	43.800	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	2,190	APBD

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Penyediaan Pakan	Kg			125.92 5	43.800	43.800	43.80 0	43.800	43.800	43.80 0	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	2,190	APBD
	Penyediaan Vitamin dan obat-obatan	Paket			1	1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0.40	APBD
	Penyutikan vaksin Hog Cholera	dosis			115	630	630	630	630	630	630	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,031	APBD
	Penyuntikan serum konvalesen				115	630	630	630	630	630	630	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,031	APBD
1.11.	Pembibitan ternak babi di Masyarakat														APBD, APBN, Sektor swasta, Masyarakat
	Pembibitan ternak babi melalui bantuan pemerintah/ekosistem peternakan (dalam bentuk paket : Bibit	paket			22	22	22	22	22	22	22	Dinas peternakan Prov/Kab/ Kota, Masyarakat , Sektor swasta, Lembaga	Dinas peternakan Prov/Kab/ Kota, Masyarakat , Sektor swasta, Lembaga	8,00	APBD, Lembaga Perbankan



1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	babi, pakan, kandang, obat obatan dan vitamin, penjualan)											perbankan,	perbankan,		
	Penyuntikan vaksin Hog Cholera di 22 kabupaten/kota	dosis				2.078.696	2.078.696	2.078.696	2.078.696	2.078.696	2.078.696	Dinas peternakan Prov/Kab/ Kota, Masyarakat, Sektor swasta, Lembaga perbankan,	Dinas peternakan Prov/Kab/ Kota, Masyarakat, Sektor swasta, Lembaga perbankan	68,63	APBN, Sektor swasta, Masyarakat
	Penyuntikan serum konvalesen di 22 kabupaten/kota	dosis				2.078.696	2.078.696	2.078.696	2.078.696	2.078.696	2.078.696	Dinas peternakan Prov/Kab/ Kota, Masyarakat, Sektor swasta, Lembaga perbankan,	Dinas peternakan Prov/Kab/ Kota, Masyarakat, Sektor swasta, Lembaga perbankan	68,63	APBN, Sektor swasta, Masyarakat
1.12	Pembibitan ternak ayam KUB di											Dinas Peternakan	Dinas Peternakan		APBD, APBN



1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	instalasi Tarus														
	Penyediaan ayam KUB	ekor				6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,27	
	Rehap kandang pemeliharaan	unit										Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,20	
	Pembangunan kandang	unit										Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,70	
	Pembangunan RPU	unit				1						Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	1,50	
	Pembelian tempat makan	Buah				180	180	180	180	180	180	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,14	
	Pembelian tempat minum	Buah				180	180	180	180	180	180	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,17	
	Pembelian vitamin dan obat	Paket				1	1	1	1	1	1	Dinas Peternakan	Dinas Peternakan	0,06	
1.13	Pembibitan ternak ayam di 22 kabupaten/ kota se-NTT.												Dinas Peternakan. PT Masyarakat , Lembaga perbankan,		Dinas Peternakan Masyarakat , Lembaga perbankan, Sektor



1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
													Sektor swasta		swasta
	Pembibitan ternak ayam KUB melalui bantuan pemerintah/ek osistim peternakan (dalam bentuk paket : Bibit ayam KUB, pakan, kandang, obat obatan dan vitamin, peenjualan)	paket			22	22	22	22	22	22	22	Dinas Peternakan Masyarakat , Lembaga perbankan, Sektor swasta	Dinas Peternakan Masyarakat , Lembaga perbankan, Sektor swasta	4,95	APBD, APBN, lembaga perbankan
	Inseminasi Buatan (IB)	Ekor			9.800	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			2,00	APBD, APBN
	Introduksi sapi wagyu di Instalasi kabaru	Ekor				100						Pemerintah dan Sektor swasta/PT AB		3.50	APBD, APBN
	Penyediaan	Ekor				1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Pemerintah		60.00	APBD,

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	pemacek (Intensifikasi Kawin Alam)											pusat/Prov/Kab/Kota			APBN
	Penerbitan surat keterangan layak bibit	Setifikat			9.800	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	Pemerintah pusat/Prov/Kab/Kota		0.5	APBD, APBN
	Klasterisasi wilayah bibit ternak /pemurnian genetik	Lokasi						1				Pemerintah dan masyarakat /sektor swasta		1.61	APBD, APBN
	Introduksi sapi betina unggul dari luar NTT	Ekor				13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	Pemerintah dan Sektor swasta		780,00	APBD, APBN
	Pencegahan pengeluaran/ pemotongan ternak betina	Paket				1	1	1	1	1	1	Pemerintah pusat Aparat penegak, Karantina, RPH, Masyarakat, Pem		1,20	APBD, APBN

1. Program penyediaan dan pengembangan sarana pertanian melalui kapitalisasi dan optimalisasi instalasi peternakan pemerintah

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Pemberantasan Brucellosis di pulau Timor	Paket			1	1	1	1	1	1	1	Pemerintah dan masyarakat /Sektor swasta		1,61	APBD, APBN

2. Program penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian melalui pengembangan pabrik pakan

	Pembangunan pabrik pakan di kabupaten Kupang Tahun 2021-2022	unit			1							Pemprov dan Sektor swasta		55.00	APBD
	DED pabrik pakan 1 unit di kabupaten Sumba Tengah dan 1 unit di Kabupaten Manggarai Timur Tahun 2022	paket				2						Pemprov dan Sektor swasta		1.26	APBD

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan	
				TARGET												
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Pembangunan pabrik pakan di kabupaten Sumba Tengah dan Manggarai Timur	unit				2							Pemprov dan Sektor swasta		110.00	APBD
	Penumbuhan pabrik pakan	unit				1	1					2	Pemkab/Sektor swasta		220,00	APBD
3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Peningkatan vaksinasi, pengobatan dan optimalisasi puskesmas																
	Penyediaan vaksin ternak 80% dari populasi	Paket				1	1	1					Pemerintah Masyarakat /Sektor swasta		343.11	APBD, APBN
	Pengobatan ternak 20% dari populasi	Paket				1	1	1					Pemerintah Masyarakat /Sektor swasta		247.04	APBD, APBN
	Pembangunan puskesmas	unit				30	30	25					Pemerintah		29.75	APBD, APBN
	Revitalisasi puskesmas	unit				12	12	13					Pemerintah		9.25	APBD, APBN

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Pemberantasan penyakit hewan

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Peningkatan kuantitas dan kualitas Petugas medik veteriner (dokter hewan) dan paramedik veteriner (D3 Kesehatan Hewan)	orang				500	500	250				Pemerintah		-	APBN
	Pembebasan Brucellosis di Pulau Semau dan pulau Timor	Paket				1						Pemerintah		0,92	APBD, APBN
	Kompartemen bebas AI di Timor barat	Paket			1							Pemerintah, NGO, Sektor swasta Pemerintah		9,01	APBD, APBN
	Pembebasan AI di pulau Timor	Paket					1					Pemerintah		1,61	APBD, APBN

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Peningkatan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Modernisasi RPH sapi	unit				13 Kabupaten Kupang: 1, TTS: 1, TTU: 1, Belu: 1, Malaka: 1, Rote Ndao: 1, Lembata:1, Ngada: 1, Nagekeo: 1, Sumba Timur: 1, Sumba Barat:1, Sumba Tengah:1, Sumba Barat Daya: 1						Pemerintah dan sawata	Pemerintah dan sawata	91,00	APBD, APBN, Sektor swasta
	Modernisasi RPH babi					13 Kabupaten Kupang: 1, TTS: 1, TTU: 1, Belu: 1, Malaka: 1, Rote Ndao: 1, Lembata:1, Ngada: 1, Nagekeo: 1, Sumba Timur: 1, Sumba Barat:1, Sumba Tengah:1, Sumba Barat Daya: 1						Pemerintah dan sawata	Pemerintah dan sawata	91,00	APBD, APBN, Sektor swasta
	Modernisasi RPU					13 Kabupaten Kupang: 1, TTS: 1, TTU: 1, Belu: 1, Malaka: 1, Rote Ndao: 1, Lembata:1, Ngada: 1, Nagekeo: 1, Sumba Timur: 1, Sumba Barat:1, Sumba Tengah:1, Sumba Barat Daya: 1						Pemerintah dan sawata	Pemerintah dan sawata	91,00	APBD, APBN, Sektor swasta
	Pembinaan unit-unit usaha produk asal ternak : Unit penyimpanan, unit pengolahan, unit penjualan 121 unit	unit	25	33	55	77	99	121	143	165	187	Pemerintah		0,73	APBD, APBN

3. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner melalui Peningkatan penyediaan pangan asal hewan yang ASUH

No	Kegiatan Strategis	Satuan	Base line (2020)	TAHUN								Stakeholders	Penanggung jawab	Perkiraan biaya (Milyar)	Sumber Pendanaan
				TARGET											
				2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Sertifikasi Nomor Kontrol Veteriner (NKV) 121 unit	Unit	25	33	55	77	99	121	143	165	187	Pemerintah		0,73	APBD, APBN

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Salah satu tahapan dalam pelaksanaan program kegiatan adalah melakukan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi (monev) pada umumnya dilakukan untuk melihat sejauhmana suatu program/kegiatan telah dilaksanakan mulai dari proses perencanaan sampai dengan hasil yang telah dicapai. Menurut World Health Organization (WHO), Monitoring adalah suatu proses pengumpulan dan menganalisis informasi dari penerapan suatu program termasuk mengecek secara reguler untuk melihat apakah kegiatan/program itu berjalan sesuai rencana sehingga masalah yang dilihat/ditemui dapat diatasi (Internet; Kumpulan Pengertian diakses 9 agustus 2021).

Monev suatu program/kegiatan sangat diperlukan untuk memberikan penilaian tingkat keberhasilan terhadap pelaksanaan program/kegiatan dalam kurun waktu tertentu dan sebagai pedoman perencanaan tahap berikutnya untuk mencapai tujuan pokoknya. Monitoring merupakan suatu proses assessment yang dilakukan secara berkesinambungan terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan yang bermanfaat untuk memberikan informasi berupa umpan balik yang berkelanjutan dari pelaksanaan suatu program/kegiatan. Melalui Monitoring, diharapkan mampu mengidentifikasi keberhasilan dan permasalahan sejak awal. Evaluasi merupakan suatu proses assessment yang dilakukan secara periodik atau berkala terhadap relevansi, kinerja, efisiensi dan dampak baik yang diharapkan maupun tidak diharapkan dalam kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan pada awal desain program/kegiatan. Indikator keberhasilan yang perlu di monev antara lain meliputi, masukan, keluaran, hasil, dan dampak.

Dalam pelaksanaan program/kegiatan untuk pencapaian indikator peningkatan populasi ternak sapi, babi dan unggas serta indikator pertumbuhan unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar perlu dilakukan monev. Monev dilakukan oleh Tim yang di bentuk dari

pelaksana teknis (Sekretariat, perbibitan dan produksi, Keswan dan Kesmavet, Sarana dan Prasarana, Agribisnis dan Kelembagaan) dan unit pelaksana teknis (UPT) untuk efisiensi dan keterpaduan. Monev dilakukan dua kali dalam setahun yakni pada bulan juni dan bulan oktober. Monev bulan Juni untuk melihat sejauhmana pelaksanaan kegiatan, permasalahan yang ada dan langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan saat itu juga. Monev bulan Oktober dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan secara utuh dan pelaporan serta sebagai acuan untuk pelaksanaan program/kegiatan ke depannya atau tahun berikutnya.

Monev yang dilakukan menyangkut indikator peningkatan populasi ternak sapi, babi dan unggas serta indikator pertumbuhan unit Unit usaha pangan asal ternak yang memenuhi standar, yakni :

1. Masukan
 - a. Jumlah ternak jantan
 - b. Jumlah ternak betina
 - c. Jumlah bibit (semen)
 - d. Jumlah IB
 - e. Jumlah vaksin
 - f. Jumlah pendamping
 - g. Jumlah dokter hewan
 - h. Jumlah puskesmas
 - i. Jumlah sarana prasarana
 - j. Jumlah anggaran
2. Keluaran
 - a. Jumlah ternak kelompok
 - b. Jumlah kebuntingan
 - c. Jumlah kelahiran ternak
 - d. Tingkat kematian ternak
 - e. Jumlah kelompok ternak
 - f. Cakupan vaksinasi
 - g. Jumlah unit usaha



- h. Jumlah koperasi
- i. Jumlah prasarana pendukung (Kandang, embung, sumur bor dll)
- 3. Hasil
 - a. Pendapatan peternak
 - b. Pendapatan instalasi
- 4. Dampak
 - a. Perbaikan ekonomi peternak (masyarakat)
 - b. Pendapatan Asli Daerah (pemerintah)
 - c. Peluang investasi (Pengusaha/Sektor swasta)

Tabel 14. Monitoring dan evaluasi Bulan Juni

Uraian	Waktu Pelaksanaan								
	Jan	Feb	Mar	Apr l	Mei	Juni/Minggu			
						1	2	3	4
I. Persiapan									
1. Pembentukan tim monev									
2. Penyusunan jadwal monev									
3. Penyusunan dan pengandaan bahan/kuisisioner monev									
4. Rapat tim monev									
II. Pelaksanaan									
1. Masukan									
a. Jumlah ternak jantan									
b. Jumlah ternak betina									
c. Jumlah bibit (semen)									
d. Jumlah IB									
e. Jumlah vaksin									
f. Jumlah pendamping									
g. Jumlah dokter hewan									
h. Jumlah puskesmas									
i. Jumlah sarana prasarana									
j. Jumlah anggaran									
2. Keluaran									



4. Rapat tim monev									
II. Pelaksanaan									
1. Masukan a. Jumlah ternak jantan b. Jumlah ternak betina c. Jumlah bibit (semen) d. Jumlah IB e. Jumlah vaksin f. Jumlah pendamping g. Jumlah dokter hewan h. Jumlah puskesmas i. Jumlah sarana prasarana j. Jumlah anggaran									
2. Keluaran a. Jumlah ternak kelompok b. Jumlah kebuntingan c. Jumlah kelahiran ternak d. Tingkat kematian ternak e. Jumlah kelompok ternak f. Cakupan vaksinasi g. Jumlah unit usaha h. Jumlah koperasi i. Jumlah prasarana pendukung (Kandang, embung, sumur bol, dll)									
3. Hasil a. Pendapatan peternak b. Pendapatan instalasi									
4. Dampak a. Perbaikan ekonomi peternak (masyarakat) b. Pendapatan Asli Daerah (pemerintah) c. Peluang investasi (Pengusaha/Swasta)									



BAB V PENUTUP

Grand Design Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2021-2025 yang berisikan arahan tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan, program dan rencana aksi ini merupakan pedoman bagi seluruh jajaran aparatur pemerintah di lingkungan Dinas Peternakan Provinsi NTT maupun para pemangku kepentingan (*stakeholders*) lainnya dalam pelaksanaan pembangunan peternakan daerah NTT periode tahun 2021 hingga tahun 2025.

Keberhasilan pelaksanaan *Grand Design* Dinas Peternakan Provinsi NTT Tahun 2021-2025 ini sangat bergantung pada kerja keras, kerja cerdas dan kerja tuntas serta konsistensi dan komitmen pimpinan PD dan seluruh aparatur pelaksana hingga tingkat lapangan. Selain itu bergantung juga pada fasilitasi dan dukungan dari pimpinan daerah, lembaga legislatif, lembaga pemerintah terkait baik di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota, lembaga/organisasi mitra, asosiasi kelompok usaha bidang peternakan maupun masyarakat peternak.

Perencanaan yang ada harus diikuti oleh pelaksanaan dan evaluasi yang baik pula agar dapat memberikan umpan balik bagi perbaikan rencana di masa depan. Sebaik apa pun rencana yang telah dibuat, apabila tidak didukung oleh kebersamaan dan partisipasi aktif semua pihak terkait, maka akan sia-sia dan tidak dapat memberi nilai tambah yang berarti. Oleh karena itu, bagi semua *stakeholders* pembangunan peternakan diharapkan dapat memberi kontribusi sesuai kemampuan, kedudukan dan kewenangan masing-masing, dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).


W. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

B
R. VIKTOR BUNGTILS LAISKODAT